

PENGANTAR AUDIT

Penulis :

- Dini Haryati
- Mulyati
- Sasmita Nabila Syahrir
- Fitria Ningrum Sayekti
- Selvia Eka Aristantia
- Nurchayati
- I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi
- Nita Andriyani Budiman
- Rabiyatul Jasiyah
- Rida Ristiyana
- Arnadi Chairunnas
- Parju
- Tri Irawati
- Sri Suharti



ISBN 978-623-8051-63-2



9 786238 051632

PENGANTAR AUDIT

Dini Haryati

Muliyati

Sasmita Nabila Syahrir

Fitria Ningrum Sayekti

Selvia Eka Aristantia

Nurchayati

I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi

Nita Andriyani Budiman

Rabiyatul Jasiyah

Rida Ristiyana

Arnadi Chairunnas

Parju

Tri Irawati

Sri Suharti



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PENGANTAR AUDIT

Penulis:

Dini Haryati
Mulyati
Sasmita Nabila Syahrir
Fitria Ningrum Sayekti
Selvia Eka Aristantia
Nurchayati
I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi
Nita Andriyani Budiman
Rabiyatul Jasiyah
Rida Ristiyana
Arnadi Chairunnas
Parju
Tri Irawati
Sri Suharti

ISBN: 978-623-8051-63-2

Editor: Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatrini Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id

Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, November 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga buku kolaborasi dengan judul Pengantar Audit dapat diselesaikan. Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini, terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan, mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Penulis, November 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PERMINTAAN JASA AUDIT	1
1.1 Definisi Auditing.....	1
1.2 Jenis-Jenis Audit	3
1.3 Jenis Auditor	6
1.4 Definisi Layanan Jaminan.....	8
1.5 Nilai Jasa Audit dan Jaminan	13
1.6 Permintaan Untuk Mengaudit.....	16
1.7 Aspek Ekonomi dalam Permintaan akan Auditing	21
BAB 2 PERMINTAAN JASA ASURANSI.....	25
2.1 Pendahuluan.....	25
2.2 Pengertian Asuransi.....	27
2.3 Peranan Asuransi	33
2.3.1 Peranan Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi.....	35
2.3.2 Peran Perusahaan Asuransi Bagi Nasabah.....	36
2.3.3 Peran Asuransi Sebagai Dana Investasi	36
2.3.4 Peranan Asuransi Dalam Perusahaan	37
2.3.5 Peran Asuransi dalam Perekonomian dan Pembangunan Bangasa Indonesia.....	39
2.3.6 Peran Lembaga Asuransi.....	39
2.3.7 Peran Asuransi Ekspor.....	41
2.3.8 Peran Asuransi dalam Pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs	41
2.3.9 Peranan Asuransi Syariah.....	43
2.4 Kerugian Akibat Asuransi.....	46
2.5 Kesimpulan dan Saran.....	48
BAB 3 PROFESI AKUNTAN PUBLIK.....	51
3.1 Sejarah Munculnya Profesi Akuntan Publik.....	51
3.2 Definisi Profesi Akuntan Publik	52
3.3 Bidang Jasa Akuntan Publik.....	52
3.3.1. Jasa Atestasi.....	52
3.3.2. Jasa Non Atestasi.....	53
3.4 Perizinan Akuntan Publik.....	53
3.6 Tugas Akuntan Publik.....	54
3.7 Akuntan Publik Profesional	54
3.8 Peran Akuntan Publik	55

3.9 Opini Laporan Keuangan	56
3.10 KAP Big Four	58
BAB 4 LAPORAN AUDIT	61
4.1 Pendahuluan	61
4.2 Komponen Laporan Audit	62
4.3 Elemen Laporan Audit	62
4.4 Jenis Opini Auditor	65
4.5 Materialitas	74
4.6 Pernyataan Opini Kelangsungan Hidup	75
4.7 Tahapan Pengambilan Keputusan oleh Auditor untuk Menerbitkan Laporan Audit	77
4.8 Kesimpulan	79
BAB 5 ETIKA PROFESI	81
5.1 Definisi	81
5.2 Prinsip dasar Etika	82
5.2.1 Integritas	82
5.2.2 Objektivitas	83
5.2.3 Kompetensi dan kehati-hatian profesional	83
5.2.4 Kerahasiaan	84
5.2.5 Perilaku profesional	84
BAB 6 KEWAJIBAN HUKUM	87
6.1 Lingkungan Hukum yang Berubah	87
6.2 Membedakan antara Kegagalan Bisnis Kegagalan Audit, dan Risiko Audit	88
6.3 Kewajiban Hukum Para Auditor	90
6.4 Respon Profesi terhadap Kewajiban Hukum AICPA	96
6.5 Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum	96
BAB 7 TANGGUNG JAWAB	99
7.1 Tanggung Jawab Auditor Independen	99
7.2 Tanggung Jawab Auditor Internal	107
7.2.1 Teknik Review Terhadap Pengendalian Internal	112
7.2.2 Survei Pendahuluan	112
7.2.3 Penilaian Akhir Terhadap Risiko Pengendalian	115
7.2.4 Bukti Audit	117
BAB 8 TUJUAN AUDIT	123
8.1 Tujuan Pengauditan Laporan Keuangan	123
8.2 Tanggung Jawab Manajemen	124
8.3 Tanggung Jawab Auditor	126
8.3.1 Salah Saji Material	126
8.3.2 Keyakinan Memadai	127

8.3.3 Kesalahan dan Kecurangan	127
8.3.4 Skeptisme Profesional	127
8.4 Siklus Laporan Keuangan	128
8.5 Asersi Manajemen (<i>Management Assertion</i>)	128
8.6 Tujuan Audit Terkait Transaksi	131
8.6.1 Tujuan Umum Audit Terkait Transaksi	131
8.6.2 Tujuan Khusus Audit Terkait Transaksi	132
8.7 Tujuan Audit Terkait Saldo	132
8.7.1 Tujuan Umum Audit Terkait Saldo	132
8.7.2 Tujuan Khusus Audit Terkait Saldo	133
8.8 Tujuan Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan	133
8.9 Tahapan dalam Audit Laporan Keuangan	133
BAB 9 BUKTI AUDIT	137
9.1 Pendahuluan	137
9.2 Bukti Audit	139
9.3 Tingkat Keyakinan Bukti Audit	141
9.4 Tipe Bukti Audit	144
9.5 Pertimbangan Auditor	148
BAB 10 PERENCANAAN AUDIT	155
10.1 Pendahuluan	155
10.2 Definisi Perencanaan Audit	156
10.3 Fungsi dan Tujuan Perencanaan Audit	156
10.4 Metode Pemilihan Auditee	157
10.5 Hal-Hal Yang Perlu di Pertimbangkan Dalam Merencanakan Audit	158
10.6 Tata Cara Perencanaan, Pengawasan dan Penyusunan Laporan Rencana Audit	158
10.7 Tahap Awal Perencanaan Audit	160
10.8 Unsur-Unsur Rencana Audit	165
10.9 Prosedur Perencanaan Audit	167
10.10 Isi Perencanaan Audit	169
10.11 Penilaian Resiko Perencanaan Audit	170
BAB 11 PROSEDUR ANALITIS	173
11.1 Pendahuluan	173
11.2 Definisi Prosedur Analitis	173
11.3 Jenis Prosedur Analitis	174
11.3.1 Short-Term Debt-Paying Ability	175
11.3.2 Liquidity Activity Ratio	176
11.3.3 Ability to Meet Long-Term Obligations	179
11.4 Manfaat Prosedur Analitis	180

BAB 12 AUDITING KECURANGAN DAMPAK TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PROSES AUDIT	183
12.1 Pengertian Audit Kecurangan	183
12.2 Jenis-Jenis Kecurangan.....	185
12.3 Teknologi Informasi.....	187
12.4 Peranan Teknologi Informasi dalam Pengendalian Internal	188
12.5 Dampakteknologi Informasi dalam Proses Audit.....	189
12.6 Masalah dalam Lingkungan Teknologi Informasi dalam Proses Audit.....	197
BAB 13 PROGRAM AUDIT	203
13.1 Pendahuluan.....	203
13.2 Tujuan Program Audit.....	205
13.3 Manfaat Audit Program	209
13.4 Program Kerja Audit.....	210
13.5 Implementasi Program Audit.....	213
BAB 14 KERTAS KERJA PEMERIKSAAN	221
14.1 Pendahuluan.....	221
14.2 Fungsi Kertas Kerja Pemeriksaan	222
14.3 Jenis Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan	223
14.4 Isi Kertas Kerja Pemeriksaan.....	226
14.5 Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi Kertas Kerja Pemeriksaan.....	227
14.5.1 Kepemilikan.....	227
14.5.2 Kerahasiaan Informasi Kertas Kerja Pemeriksaan	227
14.6 Dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan	229
14.7 Indeks Kertas Kerja.....	231
14.8 Kertas Kerja Elektronik.....	236
14.9 Penelaahan Kertas Kerja.....	238
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	43
Tabel 8.1 Asersi Manajemen untuk Setiap Kategori Asersi	129
Tabel 9.1 Informasi yang Sering Dikonfirmasi	146
Tabel 14.1 Kertas kerja schedule uji transaksi penjualan dan piutang.....	231
Tabel 14.2 Hubungan kertas kerja WBS dan WBL.....	233
Tabel 14.3 Hubungan supporting schedule dengan jurnal koreksi.	234
Tabel 14.4 Pencantuman Indeks pada Audit Program	235

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Struktur Laporan Audit	64
Gambar 4.2: Opini Audit WTP dengan Paragraf Penjelasan	67
Gambar 4.3 Opini Audit WDP (Wajar dengan Pengecualian)	69
Gambar 4.4: Pendapat Tidak Wajar (TW)	71
Gambar 4.5: Penafian Pendapat	73
Gambar 8.1 Langkah-langkah Tujuan Audit	124
Gambar 8.2 Empat Tahap Audit Laporan Keuangan	134
Gambar 9.1 Hubungan antara reliabilitas dan bukti audit	148

BAB 1

PERMINTAAN JASA AUDIT

Oleh Dini Haryati

1.1 Definisi Auditing

Auditing menawarkan beragam peluang karir dalam akuntan publik, industri, dan pemerintahan. Pada abad yang lampau, jasa auditing yang disediakan oleh profesi akuntan publik telah meningkat sebagai salah satu komponen penting dalam pasar bebas ekonomi A.S. Peran profesi akuntan public di A.S. dalam pelaporan keuangan berlanjut sebagai pemberi jasa yang digunakan sebagai model pengembangan profesi auditor di seluruh dunia yang digunakan sebagai model pengembangan profesi auditor di seluruh negri di atas muka bumi ini. Selain itu, tidak ada profesi sebaik profesi auditor dalam memahami sasaran dalam tujuan organisas, system informasinya, serta kecakapannya.

Definisi Auditing sesuai dari ASOBAC (*a Statement Of Basic Auditing Concepts*): Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Dari definisi tersebut ada tujuh (7) elemen yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Proses yang sistematis rangkaian proses & prosedur yang bersifat logis, terstruktur dan terorganisasi.

2. Menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif, mengungkapkan fakta apa adanya, tidak bias, tidak memihak dan tidak berprasangka buruk.
3. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Pernyataan tentang tindakan dan kejadian ekonomi yang merupakan hasil proses akuntansi dan yang dinyatakan dalam satuan uang dan harus dipertanggung jawabkan oleh manajemen.
4. Menentukan tingkat kesesuaian (*degrees of correspondence*). Penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti dengan maksud untuk menentukan dekat tidaknya pernyataan-pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Kriteria yang ditentukan. Merupakan standar pengukuran berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK), aturan spesifik yang ditentukan oleh badan legeslatif atau anggaran/ukuran lain kinerja manajemen.
6. Menyampaikan hasil-hasilnya. Hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara aseri-asersi dengan kriteria yang telah ditentukan.
7. Para pemakai yang berkepentingan. Meliputi : investor maupun calon investor di pasar modal, pemegang saham, kreditor maupun calon kreditor, badan pemerintahan, manajemen dan publik pada umumnya.

Definisi menurut *Auditing Practices Committee* (APC) dapat disimpulkan menjadi tiga (3) elemen fundamental dalam auditing yaitu :

1. Seorang auditor harus independen
2. Auditor bekerja mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung pendapatnya.
3. Hasil pekerjaan auditor adalah laporan (*report*)

Apabila ingin melakukan audit seorang auditor harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut, yang dapat dan memang memiliki banyak bentuk. Bukti (*evidence*) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang audit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti terdiri dari :

- ✓ Kesaksian lisan pihak yang diaudit (klien)
- ✓ Komunikasi tertulis dengan pihak luar konfirmasi
- ✓ Observasi oleh auditor
- ✓ Data elektronik dan data lain tentang transaksi

Auditor harus memperoleh bukti dengan bukti yang kualitas dan jumlah yang mencakupi. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

1.2 Jenis-Jenis Audit

Ada Tiga jenis audit biasanya menunjukkan karakteristik utama yang termasuk dalam definisi audit: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Laporan audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan merupakan variasi dari audit kepatuhan. Sifat dari setiap jenis audit dijelaskan secara singkat di halaman-halaman berikut:

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan melibatkan perolehan dan evaluasi bukti tentang penyajian entitas atas posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas untuk tujuan menyatakan pendapat tentang apakah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan biasanya diterima secara umum. Prinsip akuntansi (GAAP). Dikebanyakan

negara bagian, hanya CPAS yang dapat melakukan audit laporan keuangan, dan perusahaan yang laporannya diaudit biasanya menyewa perusahaan audit eksternal. Hasil audit laporan keuangan didistribusikan ke berbagai spektrum pengguna seperti pemegang saham, kreditor, badan pengatur, dan masyarakat umum melalui laporan auditor atas laporan keuangan. Selain itu, auditor eksternal juga membuat laporan kepada komite audit dewan direksi tentang kebijakan akuntansi perusahaan, pengendalian internal, dan temuan audit lainnya. Audit laporan keuangan untuk perusahaan besar sangat diperlukan untuk berfungsinya pasar sekuritas nasional kita. Banyak pemberi pinjaman dan kreditor juga mengandalkan audit laporan keuangan untuk mendapatkan jaminan tentang keandalan informasi yang digunakan untuk mendukung keputusan pemberian pinjaman. Audit keuangan berkualitas tinggi secara signifikan mengurangi risiko bahwa investor dan kreditor akan menggunakan informasi berkualitas rendah saat membuat berbagai keputusan investasi. Selain itu, logika audit yang dikembangkan untuk audit laporan keuangan adalah landasan di mana auditor telah mengembangkan audit kepatuhan, audit operasional, dan beragam layanan pengesahan dan jaminan. Akibatnya, teks ini memberikan pertimbangan ekstensif pada logika yang mendasari audit atas laporan keuangan.

2. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan melibatkan perolehan dan evaluasi bukti untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi, aturan, atau regulasi tertentu. Kriteria yang ditetapkan dalam jenis audit ini dapat berasal dari berbagai sumber. *Sarbanes-Oxley Act of 2002* mengharuskan perusahaan untuk memiliki audit bertujuan ganda yang mengaudit laporan keuangan dan pernyataan manajemen, apakah

telah memenuhi kriteria mengenai sistem pengendalian internal yang memadai atas pelaporan keuangan. Audit kepatuhan juga dapat didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh kreditor. Misalnya, perjanjian obligasi mungkin memerlukan pemeliharaan rasio lancar yang ditentukan. Penerapan audit kepatuhan yang paling luas mungkin terkait dengan kriteria berdasarkan peraturan pemerintah. Perusahaan, misalnya, harus mematuhi pajak penghasilan ekstensif dan peraturan pemerintah lainnya yang harus diaudit. Kontraktor pertahanan harus mematuhi syarat dan ketentuan kontrak pemerintah. Beberapa laporan auditor independen berupa laporan audit atas kecukupan pengendalian internal bagi pengguna umum. Laporan lain tentang audit kepatuhan dapat diarahkan ke otoritas yang menetapkan kriteria dan dapat mencakup (1) ringkasan temuan atau (2) ekspresi jaminan tentang tingkat kepatuhan terhadap kriteria tersebut.

3. Audit Operasional

Audit operasional melibatkan perolehan dan evaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas aktivitas operasi entitas dalam kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan. Jenis audit ini terkadang disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen. Dalam perusahaan bisnis, ruang lingkup audit dapat mencakup semua aktivitas (1) departemen, cabang, atau divisi, atau (2) fungsi yang dapat melintasi lini unit bisnis seperti pemasaran atau pemrosesan data. Di pemerintah federal, audit operasional dapat meluas ke semua aktivitas (1) lembaga, seperti *Federal Emergency Management Agency* (FEMA) atau (2) program tertentu, seperti distribusi kupon makanan. Kriteria atau tujuan yang menjadi dasar pengukuran efisiensi dan efektivitas dapat ditentukan, misalnya, oleh manajemen atau undang-undang yang memungkinkan. Dalam kasus lain, auditor operasional dapat membantu dalam menentukan kriteria

yang akan digunakan. Laporan audit semacam itu biasanya mencakup tidak hanya penilaian efisiensi dan efektivitas, tetapi juga rekomendasi untuk perbaikan. Ketika dilakukan oleh perusahaan CPA, audit tersebut kemungkinan besar melibatkan individu dari departemen konsultasi, atau individu dengan keahlian industri yang luas, seperti staf audit.

Perbedaan Auditing dan Akuntansi adalah : Auditing mempunyai sifat analisis karena auditor memulai tahapan audit dari angka yang berada di bukti, jurnal, buku besar dan menjadi laporan keuangan. Sedangkan Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan. Laporan keuangan yang dicocokkan dengan general ledger, jurnal dan sampai ke bukti.

1.3 Jenis Auditor

Individu yang terlibat untuk mengaudit tindakan dan peristiwa ekonomi untuk individu dan badan hukum umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: (1) auditor independen, (2) auditor internal, dan (3) auditor pemerintah.

1. Auditor Independen

Auditor independen biasanya CPAS yang merupakan praktisi individu atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan layanan audit profesional kepada klien. Secara umum, perizinan melibatkan lulus ujian CPA seragam dan mendapatkan pengalaman praktis dalam audit. Berdasarkan pendidikan, pelatihan mereka. dan pengalaman, auditor independen memiliki kualifikasi untuk melaksanakan setiap jenis audit yang dijelaskan sebelumnya. Klien independen dapat mencakup perusahaan bisnis yang menghasilkan laba, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah. Seperti anggota profesi medis dan hukum, auditor independen bekerja atas dasar

bayaran. Terdapat kesamaan antara peran auditor independen pada Kantor Akuntan Publik dengan Pengacara yang merupakan anggota pada Kantor Hukum. Namun ada juga perbedaan utama: Auditor diharapkan independen terhadap klien dalam melakukan audit dan melaporkan hasilnya, sedangkan attorney diharapkan menjadi advokat bagi klien dalam memberikan jasa hukum. Pengguna mengandalkan independensi auditor dan memperoleh nilai dari fakta bahwa auditor tidak bias sehubungan dengan klien yang diaudit. Lebih banyak perhatian akan diberikan pada kemandirian di bab-bab selanjutnya

2. Auditor Internal

Auditor internal adalah karyawan dari organisasi yang mereka audit. Jenis auditor ini terlibat dalam evaluasi bukti independen, yang disebut audit internal. Dalam suatu organisasi sebagai layanan kepada organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Ruang lingkup fungsi audit internal meluas ke semua fase aktivitas organisasi. Auditor internal terutama terlibat dengan kepatuhan dan audit operasional. Namun, seperti yang akan dijelaskan kemudian, pekerjaan auditor internal dapat melengkapi pekerjaan auditor independen dalam audit laporan keuangan. Banyak auditor internal memegang kredensial auditor internal bersertifikat (CIA) dan beberapa juga CPAS. Asosiasi internasional audit internal adalah Lembaga Auditor Internal (IIA), yang menetapkan kriteria sertifikasi dan mengelola pemeriksaan auditor internal bersertifikat. Selain itu, IIA telah menetapkan standar praktik untuk audit internal dan kode etik.

3. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah dipekerjakan oleh berbagai badan pemerintah lokal, Negara bagian, dan federal. Di tingkat federal, tiga badan utama adalah Kantor Akuntansi Umum (GAO), *Internal Revenue Service* (IRS), dan Badan Audit Kontrak Pertahanan (DCAA). Dalam melakukan fungsi audit untuk Kongres, auditor GAO terlibat dalam berbagai aktivitas audit, termasuk audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Hasil audit ini dilaporkan ke Kongres A.S. dan publik. Auditor GAO juga terlibat dalam pencarian fakta dan evaluasi alternatif untuk Kongres. Auditor IRS (atau agen) mengaudit pengembalian wajib pajak untuk kepatuhan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Temuan mereka umumnya terbatas pada lembaga dan wajib pajak. Badan Audit Kontrak Pertahanan, seperti namanya, melakukan audit terhadap kontraktor pertahanan dan operasi mereka, dan melapor ke Departemen Pertahanan. Organisasi nasional untuk akuntan pemerintah adalah Association of Government Accountant (AGA). Saat ini sebagian besar auditor pemerintah memegang sertifikat CPA dan / atau CIA.

1.4 Definisi Layanan Jaminan

Layanan jaminan adalah istilah yang lebih luas yang mencakup audit dan berbagai jaminan lainnya tentang berbagai representasi manajemen. Komite Khusus AICPA tentang Layanan Jaminan mengembangkan definisi berikut. Layanan jaminan adalah layanan profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi, atau konteksnya, bagi pengambil keputusan. Ada beberapa perbedaan penting antara definisi AAA tentang audit dan definisi AICPA tentang layanan asuransi yang berkaitan dengan kualitas auditor, bukan hanya

proses audit. Konsep kemandirian adalah aspek kunci dari layanan jaminan. Pengguna mengandalkan independensi CPA dan memperoleh nilai dari fakta bahwa CPA tidak bias dan objektif. Konsep layanan profesional mencakup penerapan penilaian profesional yang merupakan atribut unik yang dibawa CPA ke dalam keterlibatan. CPAS membawa skeptisisme dan objektivitas profesional mereka ke dalam suatu keterlibatan. Meskipun kemajuan teknologi informasi dapat mempercepat akumulasi atau analisis data, teknologi tidak dapat menggantikan pertimbangan profesional praktisi.

Tujuan dari layanan penjaminan adalah untuk meningkatkan kualitas informasi atau konteksnya. Kualitas, sebagaimana dibahas oleh Pansus Assurance Services, mencakup konsep kegunaan keputusan. Layanan jaminan meningkatkan kualitas informasi dengan meningkatkan keandalan atau relevansinya. Pansus mendefinisikan reliabilitas dan relevansi sebagai berikut :

- ✓ Reliabilitas mencakup kejujuran representasi, netralitas, dan konsistensi antar periode.
- ✓ Relevansi mencakup dapat dipahami, dapat dibandingkan dengan entitas lain, kegunaan, dan kelengkapan.

Pengambil keputusan ditampilkan secara mencolok dalam definisi layanan. Jasa asuransi dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan mungkin klien atau pihak ketiga di luar. Audit hanyalah salah satu jenis layanan jaminan. Audit berfokus terutama pada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Layanan jaminan menangani beragam informasi yang digunakan oleh pembuat keputusan, bukan hanya pengguna laporan keuangan.

Perikatan Audit, Tujuan perikatan audit adalah untuk memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan, bahwa informasi keuangan bebas dari salah saji material. Jenis audit melibatkan perolehan dan pengevaluasian bukti tentang laporan keuangan historis suatu entitas. Meskipun laporan keuangan perusahaan publik disusun sesuai dengan GAAP, laporan keuangan perusahaan swasta dapat diaudit sesuai dengan basis akuntansi pajak penghasilan federal atau basis akuntansi kas. Auditor juga dapat mengaudit hanya elemen laporan keuangan seperti hutang royalti. Selain itu, auditor perusahaan publik mengaudit efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Layanan Pengesahan, Layanan pengesahan adalah layanan di mana KAP mengeluarkan komunikasi tertulis yang mengungkapkan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Dalam beberapa tahun terakhir, pengakuan yang meningkat atas keterampilan dan pengalaman CPAS telah menghasilkan permintaan dari klien, badan pengatur, dan lainnya untuk berbagai layanan pembuktian. Istilah pemeriksaan digunakan untuk mendeskripsikan layanan lain yang berujung pada ekspresi positif dari suatu opini, apakah pernyataan pihak lain sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau tidak. Contohnya termasuk pemeriksaan atas (1) laporan keuangan prospektif (bukan historis) dan (2) kepatuhan entitas terhadap hukum atau peraturan tertentu. Dalam suatu pemeriksaan, seperti dalam audit, CPA juga mengeluarkan pernyataan opini "positif" tentang apakah asersi manajemen disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa pernyataan manajemen bebas dari kesalahan pernyataan material. Review informasi keuangan juga termasuk dalam kategori layanan pembuktian karena CPAS memberikan jaminan negatif tentang informasi keuangan.

Perikatan reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas dan analisis komparatif informasi keuangan. Cakupan layanan ini jauh lebih kecil daripada ruang lingkup audit atau pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan negatif yang bertentangan dengan ekspresi positif dari opini yang diberikan dalam audit. Jadi, alih-alih menyatakan bahwa laporan keuangan "disajikan secara adil sesuai dengan GAAP", laporan tinjauan menyatakan bahwa peninjau "tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dilakukan pada laporan agar sesuai dengan GAAP. "Layanan ini terkadang dilakukan atas laporan interim perusahaan publik dan laporan tahunan perusahaan non publik. CPAS juga dapat meninjau representasi manajemen tentang kepatuhan dengan perjanjian utang.

Auditor juga dapat menyelesaikan perikatan prosedur yang telah disepakati. Perikatan prosedur yang disepakati adalah prosedur yang auditor melaksanakan prosedur khusus untuk membuktikan asersi manajemen (misalnya, jumlah royalti yang harus dibayar) untuk pihak ketiga di luar (entitas yang menerima royalti). Prosedur spesifik yang akan dilaksanakan disepakati oleh pihak yang membuat asersi, pihak yang menggunakan asersi tersebut, dan CPA. Tingkat jaminan bergantung pada sifat dan luasnya prosedur pengesahan yang disepakati oleh semua pihak. Jasa Akuntansi dan Kompilasi Sebuah firma CPA dapat dilibatkan oleh klien untuk melakukan berbagai layanan akuntansi, termasuk melakukan pembukuan manual atau otomatis, penjurnalan, dan posting jurnal penyesuaian. CPA juga dapat dilibatkan untuk melakukan layanan kompilasi melalui CPA, yang merupakan ahli tentang GAAP, membuat draf dan menyusun laporan keuangan untuk klien. Ketika CPA "menyusun" sekumpulan laporan keuangan, CPA tidak memberikan jaminan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP, karena CPA belum memperoleh bukti yang mendukung laporan keuangan. Namun

demikian, ini adalah layanan jaminan penting yang meningkatkan relevansi informasi bagi pembuat keputusan di entitas Nonpublik.

Jasa akuntansi adalah aktivitas utama untuk beberapa praktisi tunggal dan firma CPA lokal. Jasa Assurance Lainnya Jasa Assurance umumnya difokuskan pada peningkatan relevansi atau reliabilitas informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Contoh jenis lain dari layanan jaminan meliputi: - Layanan Penasihat Risiko CPA di mana CPA dapat meningkatkan kualitas informasi risiko untuk pembuat keputusan internal melalui penilaian independen dari kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau tindakan akan berdampak negatif pada organisasi. CPA Performance View layanan yang berfokus pada penyediaan jaminan terkait penggunaan organisasi atas ukuran finansial dan nonfinansial untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi aktivitasnya.

Tingkat Jaminan CPAS dapat memberikan beberapa tingkat jaminan saat melakukan layanan jaminan. Tingkat jaminan umum yang dibahas di atas adalah sebagai berikut:

- Jaminan yang wajar. Ini adalah tingkat jaminan yang sangat tinggi tetapi bukan jaminan. Dalam penugasan audit dan pemeriksaan, CPA perlu memperoleh bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opini positif bahwa pernyataan tersebut disajikan secara adil dalam semua hal material.
- Jaminan negatif atau jaminan tingkat tinjauan. Ini secara substansial kurang dari audit atau pemeriksaan. Dalam peninjauan, CPA meminta keterangan dan melakukan prosedur analitis sehingga peninjau dapat menyatakan bahwa dia "tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap pernyataan manajemen."
- Prosedur yang disepakati. Dalam beberapa kasus, entitas yang membuat asersi dan entitas yang menggunakan

asersi akan menyetujui prosedur khusus yang akan dilakukan oleh CPA. Tingkat jaminan yang diperoleh tergantung pada sifat dan luasnya prosedur yang disepakati yang dilakukan oleh CPA.

- Kompilasi tanpa jaminan. Dalam beberapa kasus CPA dapat mengumpulkan informasi untuk memberikan informasi yang relevan kepada pembuat keputusan. Dalam hal ini CPA tidak memberikan jaminan tentang keandalan informasi yang mendasarinya.

1.5 Nilai Jasa Audit dan Jaminan

Akuntan menyediakan beragam layanan yang membantu pengambil keputusan. Memahami rantai nilai ini dapat membantu dalam memahami nilai jasa audit dan asuransi. Langkah-langkah dalam rantai nilai akuntan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menangkap peristiwa bisnis dalam bentuk data. Ini adalah tugas dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi. Selain itu, banyak kontrol internal yang berfungsi pada level ini untuk memastikan bahwa data akuntansi akurat. Pada langkah awal, misalnya, data dapat diinput tentang transaksi persediaan.
- b. Mengkomunikasikan gambaran total dengan integritas dan objektivitas. Ini adalah proses penyusunan laporan keuangan dan informasi lain yang mungkin dilaporkan kepada manajemen, dewan direksi, atau kreditor dan investor luar. Langkah kedua ini dapat dicontohkan dengan mengembangkan laporan keuangan yang melaporkan persediaan dan transaksi lainnya.
- c. Mengubah informasi kompleks menjadi pengetahuan. Ini adalah proses memberikan konteks informasi dan

membuatnya dapat digunakan. Contoh langkah ketiga mungkin menentukan bahwa perusahaan mengubah persediaan empat kali setahun. Namun, informasi ini tidak terlalu berguna tanpa konteks perusahaan, industrinya, dan pesaingnya. Penjual eceran atau pembuat bir berharap untuk mengubah inventarisnya lebih sering daripada empat kali setahun. Namun, ini akan menjadi perputaran inventaris yang sangat tinggi untuk kilang anggur. Toko perhiasan dan perusahaan farmasi juga memiliki perputaran persediaan yang lebih lambat. Nilai yang signifikan ditambahkan dengan menetapkan pengaturan yang luas tentang bagaimana informasi akan digunakan

- d. Mengantisipasi dan menciptakan peluang. Jika sebuah perusahaan memutar persediaannya empat kali setahun, dan itu lambat untuk industri, maka pertanyaan berikutnya menjadi salah satu cara menentukan bagaimana meningkatkan perputaran persediaan. Langkah ini mungkin melibatkan mengidentifikasi inventaris yang bergerak lambat dan menentukan strategi untuk menjual inventaris itu.
- e. Pengambilan keputusan. Pada akhirnya, manajemen memutuskan suatu tindakan untuk meningkatkan manajemen inventaris. Manajemen harus melakukan penjualan dan merampingkan proses manajemen persediaan untuk meningkatkan perputaran persediaan.

Peran audit laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kumpulan informasi yang dikenal sebagai laporan keuangan yang disusun sesuai dengan GAAP disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Laporan keuangan yang mengandung salah saji material sering kali menyebabkan keputusan yang buruk. Misalnya, banyak investor di WorldCom membuat keputusan investasi

berdasarkan informasi yang tidak secara akurat mencerminkan profitabilitas yang mendasari perusahaan. Ketika informasinya terkoreksi, harga saham turun dan investor merugi miliaran dolar. Bayangkan betapa berharganya investor memiliki informasi yang benar secara material pada awalnya. Nilai ini tidak terbatas pada investor luar.

Banyak direktur mengandalkan informasi yang diaudit untuk memenuhi peran mereka dalam mengevaluasi kinerja manajemen dan membimbing perusahaan. Manajemen membutuhkan informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Tanpa informasi yang disajikan secara adil, keputusan yang dibuat oleh para anggota manajemen ini menjadi sangat cacat. Informasi yang dapat diandalkan adalah dasar dari banyak keputusan.

Tujuan audit adalah untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dapat diandalkan. Tanpa audit, pihak luar yang menggunakan informasi yang disediakan oleh manajemen mungkin tidak memiliki dasar yang memadai untuk membuat keputusan penting. Itu nilai dari setiap langkah di atas informasi pada rantai nilai bergantung pada kredibilitas informasi tersebut. Selain itu, auditor internal memberikan berbagai layanan dalam rantai nilai ini. Misalnya, mereka mungkin menguji pengendalian internal dan melakukan prosedur lain untuk memberikan jaminan tentang keakuratan yang mendasari informasi yang digunakan oleh manajemen. Selain itu, mereka mungkin melakukan audit operasional yang menggunakan informasi yang berasal dari sistem akuntansi yang dikombinasikan dengan pengetahuan bisnis dan industri untuk merekomendasikan perbaikan operasional.

Audit operasional membantu manajemen dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan profitabilitas atau untuk mengurangi risiko likuiditas atau solvabilitas. Layanan jaminan lainnya juga ditujukan untuk memberikan

informasi berharga kepada para pembuat keputusan. Meskipun layanan kompilasi tidak memberikan jaminan tentang kredibilitas informasi yang mendasarinya, layanan ini biasanya menyediakan informasi bagi pembuat keputusan yang tidak akan mereka miliki.

Layanan peninjauan menambahkan beberapa kredibilitas ke informasi yang mendasarinya (jaminan negatif vs. jaminan yang wajar), tetapi tingkat kredibilitas ini menguntungkan pembuat keputusan dengan biaya yang wajar. Layanan seperti CPA Performance View dirancang untuk memberi pembuat keputusan informasi tambahan yang relevan yang mungkin tidak mereka miliki. Layanan seperti CPA Risk Advisory membantu pengambil keputusan dalam memahami risiko yang terkait dengan berbagai peluang bisnis. Masing-masing layanan ini memberikan nilai kepada pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang lebih relevan atau lebih dapat diandalkan.

1.6 Permintaan Untuk Mengaudit

1. Akar audit

Awal audit perusahaan dapat dikaitkan dengan undang-undang Inggris selama Revolusi Industri pada pertengahan 1800-an. Kemajuan dalam transportasi dan teknologi industri menghasilkan skala ekonomi baru, perusahaan besar, munculnya manajer profesional, dan pertumbuhan beragam kepemilikan konseptif. Perkembangan manajer profesional yang terpisah dari investor dan kreditor menciptakan permintaan bagi seseorang untuk menambah kredibilitas pada perwakilan keuangan manajemen. Awalnya, audit perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham, yang bukan petugas perusahaan dan yang ditunjuk oleh pemegang saham lain sebagai perwakilan mereka. Profesi audit dengan

cepat muncul untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan undang-undang segera direvisi untuk mengizinkan orang selain pemegang saham untuk melakukan audit, memunculkan pembentukan perusahaan audit. Beberapa dari perusahaan-perusahaan Inggris awal ini, seperti Deloitte & Co, Gumbut, Marwick, & Mitchell, dan harga Water House & Co., dapat ditelusuri ke perusahaan yang hari ini berlatih pada skala internasional.

Pengaruh Inggris bermigrasi ke Amerika Serikat pada akhir 1800-an sebagai investor Inggris dan Skotlandia mengirim auditor mereka sendiri untuk memeriksa negara manajemen tentang kondisi perusahaan-perusahaan Amerika di mana mereka telah berinvestasi. Fokus audit ini adalah menemukan kesalahan dalam akun neraca dan membendung pertumbuhan penipuan yang terkait dengan peningkatan fenomena manajer profesional dan pemilik absen. Selama awal 1900-an, permintaan audit sangat berkembang karena pertumbuhan pesat dalam hubungan masyarakat sekuritas perusahaan setelah diselesaikan dalam pelaporan keuangan, dan profesi tersebut ditantang untuk memberikan kepemimpinan yang lebih kuat dalam pengembangan akuntansi dan audit lebih lanjut.

Pada saat itu, laporan laba rugi telah memperoleh status, dan perhatian harus diberikan pada ukuran kinerja operasi dan konsep pendapatan serta kondisi keuangan. Untuk meningkatkan kredibilitas informasi yang disiapkan untuk investor, Bursa Efek New York, pada tahun 1932, mengadopsi persyaratan bahwa semua kecelakaan pasar saham tahun 1929, kekurangan yang signifikan adalah perusahaan yang terdaftar sebagai sertifikat audit dari CPA independen. Bagian dari Undang-Undang Efek 1933 dan Undang-Undang Bursa Efek 1934 lebih lanjut menambah permintaan layanan audit untuk perusahaan publik.

Pada 1980-an profesi audit berada di bawah pengawasan oleh Kongres yang menindaklanjuti penipuan keuangan di beberapa perusahaan publik seperti ekuitas. Pada saat ini prosesi akuntansi publik mengambil langkah lain dalam memastikan layanan audit berkualitas tinggi. Berbagai negara mengadopsi persyaratan bahwa CPA melibatkan kation untuk mempertahankan lisensi mereka. Profesi Akuntan Publik juga mengambil langkah sukarela dengan melembagakan program review peer. Di bawah program ini, sebuah perusahaan CPA akan menyerahkan praktik akuntansi dan auditnya ke tinjauan oleh rekan-rekan independen setiap tiga tahun.

Selama tahun 1980-an profesi akuntansi perlahan-lahan membahas masalah tanggung jawabnya untuk menemukan penipuan keuangan. Komisi Nasional Pelaporan Keuangan Penipuan Membuat Rekomendasi untuk Perbaikan dalam Pengendalian Internal, dan Dewan Standar Audit mengeluarkan serangkaian 10 standar audit baru pada tahun 1988 untuk mempersempit "kesenjangan harapan" yang dirasakan untuk membawa tanggung jawab auditor lebih sejalan dengan investor. Profesi ini juga mengembangkan standar pengesahan baru karena CPA diminta untuk membuat penilaian profesional independen mereka tentang pernyataan selain dari pernyataan pemerintah keuangan.

CPA secara rutin disewa untuk memberikan jaminan tingkat peninjau kepada pemberi pinjaman tentang kepatuhan perusahaan dengan perjanjian utang atau untuk prosedur dan perusahaan yang sub-accontrak bekerja akuntansi ke organisasi luar, CPA diminta untuk membuktikan kontrol internal penyedia layanan luar. Dari 1990 hingga 2000 perusahaan CPA menjadi perusahaan jasa profesional, menyewa berbagai macam profesional bisnis yang menjual layanan konsultasi kepada klien mereka. Pada tahun 2000 pendapatan konsultasi melebihi pendapatan audit di semua perusahaan CPA nasional, dan dalam beberapa kasus biaya

konsultasi dengan klien audit melebihi ukuran biaya audit.

Sec dan publik investasi mulai mempertanyakan bagaimana CPA dapat mandiri pada masalah audit ketika perusahaan begitu tergantung pada pendapatan konsultasi. Kualitas audit selanjutnya ditanyai ketika serangkaian Restyat-Knimb dari perusahaan publik seperti Sunbeam, Pengelolaan Sampah, Xerox, Adelphia, Enron, dan Worldcom membawa krisis kepercayaan pada pekerjaan auditor. Meskipun peristiwa-peristiwa ini relatif jarang dari sekitar 15.000 audit perusahaan publik tahunan, konsekuensi bagi pemegang saham berjumlah kerugian dalam miliaran dolar. Selama bertahun-tahun permintaan audit telah dipengaruhi oleh manajer profesional yang menyesatkan investor secara materi performa keuangan Investor mengharapkan auditor untuk menginterapi dan menemukan salah saji laporan keuangan. Selama abad ke-20 auditor diatur sendiri, dan profesi menetapkan standar sendiri. Badan standar audit berjuang untuk menemukan keseimbangan menetapkan standar untuk mengharapkan auditor untuk menemukan sebagian besar salah saji laporan keuangan, tetapi untuk tidak menetapkan standar sehingga auditor tampaknya mementingkan diri sendiri. Manajemen korporat memprotes standar yang akan menyebabkan peningkatan signifikan dalam biaya audit.

Pada tahun 2002 runtuhnya Kongres LED Enron dan WorldCom untuk lulus *Sar-Banes-Oxley Act* 2002. Undang-undang ini menciptakan perusahaan publik yang akuntansi (PCAOB) dan memberikan tanggung jawab untuk menetapkan audit, etika, indikasi kontrol, dan kontrol kualitas Kongres percaya bahwa pengaturan diri auditor tidak bekerja dan bahwa SEC diposisikan untuk melindungi kepentingan investor. *Sarbanes-Oxley Act of 2002* juga memperpanjang pekerjaan auditor di luar Audit Laporan Keuangan. Sejumlah komisi penting telah mengakui pentingnya konsekuensi internal yang baik dalam mencegah salah saji laporan

keuangan. Bagian 404 *Sarbanes- Oxley áct* tahun 2002 juga mensyaratkan auditor untuk mengaudit pernyataan manajemen tentang kecukupan pengendalian internal atas.

2. Kebutuhan Pelaporan Keuangan akan Audit Laporan Keuangan

FASB, dalam pernyataan konsep akuntansi keuangan menyatakan bahwa relevansi dan rel Pengguna Laporan Keuangan Melihat ke Laporan Audian Independen untuk jaminan tentang keandalan informasi dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (ukuran relevansi informasi keuangan). Kebutuhan akan audit independen dari laporan keuangan dapat lebih lanjut adalah atribut untuk empat kondisi sebagai berikut:

- a. Konflik kepentingan. Banyak pengguna laporan keuangan berkaitan dengan konflik kepentingan aktual atau potensial antara diri mereka dan manajemen entitas pelaporan. Kekhawatiran meluas ke ketakutan bahwa laporan keuangan yang diperoleh dengan manajemen dapat secara signifikan bias dalam mendukung pengelolaan survei pekan bisnis tahun 1998 menemukan bahwa 67 persen CFO telah diminta untuk salah mengartikan hasil dan bahwa 12 persen melakukannya. Pada tahun yang sama majalah CFO melakukan survei yang menemukan bahwa 45 persen CFO diminta untuk salah mengartikan hasil keuangan dan bahwa 38 persen dari kelompok melakukannya. Pengguna mencari jaminan dari luar auditor independen bahwa laporan keuangan bebas dari bias manajemen untuk memerangi tekanan ini.
- b. Konsekuensi. Laporan keuangan yang dipublikasikan mewakili yang penting dan, dalam beberapa kasus, satu-satunya sumber informasi yang digunakan dalam membuat pinjaman yang signifikan. Investasi, dan

- keputusan lainnya. Dengan demikian, pengguna menginginkan laporan keuangan untuk memuat informasi yang relevan dan dapat diandalkan sebanyak mungkin.
- c. **Kompleksitas.** Tingkat kompleksitas meningkat, demikian pula risiko salah menafsirkan dan salah saji yang disengaja atau tidak diinginkan. Menemukannya mustahil untuk mengevaluasi kualitas pernyataan finansial itu sendiri, pengguna mengandalkan auditor independen untuk menilai kualitas informasi yang terkandung dalam laporan tersebut.

1.7 Aspek Ekonomi dalam Permintaan akan Auditing

Suatu bank yang memberikan pinjaman memberikan suku bunga yang mana ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- a. **Suku bunga bebas risiko**
Suku bunga yang dapat diperoleh bank dengan berinvestasi dalam surat utang Negara selama jangka waktu yang sama dengan pinjaman usaha. Suku bunga bebas risiko adalah suku bunga pinjaman dimana peminjamnya tidak akan gagal memenuhi kewajiban apapun.
- b. **Risiko bisnis bagi nasabah**
Perusahaan tidak sanggup melunasi pinjamannya karena kondisi-kondisi ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan yang buruk, atau persaingan tak terduga, dll.
- c. **Risiko Informasi**
Informasi yang melandasi keputusan risiko usaha dibuat tidak akurat. Penyebab kemungkinan risiko informasi adalah kemungkinan laporan keuangan tidak akurat. Risiko informasi yang dialami oleh para pengambil keputusan dapat terjadi karena:

- **Jauhnya informasi**
Hubungan yang tidak dekat (ada gap) antara penerima dan pemberi informasi. Seorang pengambil keputusan tidak mungkin mengetahui seluruh informasi secara langsung. Sehingga, informasi yang didapat diterima dari pihak lain karena itu peluang kemungkinan informasi yang salah lebih besar.
- **Keberpihakan (bias) dan motif si penyedia**
Sikap memihak dan motif lain yang melatarbelakangi pemberian informasi. Misalnya manajer keuangan melaporkan profit yang tinggi untuk tujuan tertentu.
- **Data yang berlebihan**
Jumlah transaksi sangat banyak sehingga memungkinkan informasi yang dicatat tidak tepat.
- **Transaksi pertukaran yang kompleks**
- Transaksi perusahaan yang kompleks antarorganisasi yang membuat transaksi lebih sulit dicatat dengan tepat. Contohnya, menggabungkan dan mengungkapkan dengan tepat hasil operasi anak perusahaan dalam industri yang berbeda.

Adapun Cara Mengurangi Risiko Informasi:

1. Verifikasi informasi oleh pihak pemakai. Memperoleh informasi tentang keandalan dan reabilitas secara langsung. Misalnya pemegang saham melakukan verifikasi/audit sendiri, pihak bank melakukan verifikasi sendiri, petugas pajak melakukan verifikasi sendiri, dll. Cara ini tidak praktis, dan tidak efisien dari segi biaya.
2. Pemakai berbagi resiko informasi dengan manajemen. Menanggung risiko informasi secara bersama-sama dengan manajemen, misalnya jika informasi tidak benar pemakai dapat menuntut

manajemen. Namun dalam prakteknya pihak yang merugi tidak selalu berhasil menerima penggantian atas kerugian yang dideritanya.

3. Laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Dilakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik sebagai pihak independen. Cara ini praktis, murah, efisien dan efektif. Hendaknya perusahaan menggunakan jasa akuntan publik untuk verifikasi laporan keuangannya. Pengambilan keputusan dapat memanfaatkan hasil audit dengan asumsi lengkap, akurat, dan tidak bias. Jika laporan tidak benar auditor dapat dituntut baik oleh pemakai maupun manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing, (Pemeriksaan Akuntan oleh KAP), Jilid 1 dan 2, Edisi 3, LPFEIU.
- Agoes, Sukrisno. 2012. Bunga Rampai Auditing. Penerbit Salemba Empat.
- Arens A, Alvin and Loebbecke K. James. 1986. Auditing An Integrated Approach, Prentice Hall International, Inc., Penerbit Erlangga,
- Astuti, Partiw Dwi. 2012. Akuntansi Keuangan Dasar 1. Penerbit CAPS. Yogyakarta.
- Dria, Catur, dkk. 1988. Soal Jawab Auditing, Ganeca, Bandung.
- Haryono Yusuf. 2002. Al, Auditing (Pengauditan), Buku 1 dan 2, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi,
- Jusup, Al. Haryono. 2001. Pengauditan. Buku 1. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN
- Kell G Walter, Boynton C William and Ziegler E Richard. 2003. Modern Auditing, Jilid 1 dan 2, Edisi 7.
- Konrath, Laweey F. 2002. Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach, 5th Edition. West Publishing Company
- Kosasih, Ruchyat. 1981. Auditing, Penerbit Ananda, Yogyakarta
- Mulyadi. 2017. Auditing. Edisi 6, Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Tuanakotta. 2012. Audit Berbasis ISA. Penerbit Salemba Empat.

BAB 2

PERMINTAAN JASA ASURANSI

Oleh Muliwati

2.1 Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha tidak dapat diprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang secara tepat, setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang dilakukan. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan atau resiko lain. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Asuransi dapat dijadikan acuan dalam mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit pertanggungan yang mungkin terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup atau lebih besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila sesuatu kerugian yang diramalkan itu terjadi maka beban akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan pertanggungan itu.

Perkembangan asuransi di Indonesia semakin berkembang dapat dilihat pesatnya perkembangan lembaga-lembaga asuransi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap lembaga asuransi. Pada awalnya asuransi di Indonesia hanya berbentuk konvensional namun sejalan dengan beroperasi sejumlah perbankan khususnya bank syariah maka dibentuklah perusahaan

asuransi berbasis syariah. Perusahaan jasa asuransi berfungsi dalam menanggulangi risiko yang tidak terduga. Fungsi asuransi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Selain itu juga berfungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat bila terjadi musibah dan kecelakaan yang tidak diinginkan.

Asuransi di Indonesia telah dilindungi oleh Pemerintah yang tertuang dalam UU No.2 tahun 1992. UU tersebut terkandung di dalamnya tentang pembangunan ekonomi yang memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai dan pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri dan sehingga diperlukan usaha yang serius untuk mengerahkan dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan kepada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri ataupun keluarga dan orang lain yang mempunyai kepentingan dengannya. Keadaan yang tidak pasti terhadap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk peristiwa atau peristiwa yang belum tentu ini akan terjadi sehingga menimbulkan rasa tidak tenteram yang disebut resiko. Dalam memperkecil suatu risiko umumnya manusia mencari usaha dalam mengatasi rasa tidak tenteram yang dialaminya akibat ketidak pastian yang akan terjadi pada diri seseorang.

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut “Verzekering”, berarti pertanggungan. Dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu satu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak yang lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Asuransi kecelakaan diri memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena aktivitas masyarakat semakin meningkat setiap hari sehingga memerlukan rasa aman dan terbebas dari

rasa kekhawatiran. Sebagai manusia biasa, mungkin sulit untuk mencegah terjadinya kecelakaan tapi yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi akibat yang muncul dari terjadinya resiko-resiko kecelakaan Usaha asuransi mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha jasa pada umumnya. Dasar pertimbangan asuransi didirikan untuk saling tolong menolong dengan menyisihkan dana sebagai iuran premi yang harus dibayarkan setiap bulan. Sistem ini merupakan pembagian risiko terhadap peserta untuk saling menanggung (*risk sharing*).

Bila seseorang menjadi anggota atau klien asuransi maka orang tersebut akan memiliki jaminan berdasarkan jenis asuransi yang telah dipilih. Keuntungan bagi anggota asuransi adalah memiliki jaminan untuk memperoleh ganti rugi atas apa yang menyimpannya. Sedangkan dari sisi pemilik asuransi, memiliki keuntungan dengan premi yang dibayarkan klien.

2.2 Pengertian Asuransi

Ilmu ekonomi menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi, dapat dihimpun dana dalam jumlah besar yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan, selain bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan atas keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tak di duga sebelumnya. Dari sisi bahasa, asuransi berasal dari bahasa belanda, *assurantie* yang artinya pertanggungan, dan dari istilah tersebut lalu timbul istilah *assurateur* yang ditujukan bagi penanggung, sedangkan *geassureerde* yang ditujukan untuk tertanggung. Istilah *assurantie* sesungguhnya berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang artinya meyakinkan orang. Asuransi dalam bahasa inggris menjadi *insurance* dan *assurance* yang berarti pertanggungan. Kedua istilah tersebut

sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi sedangkan *assurance* berarti menanggung yang pasti terjadi, yang selanjutnya dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

Berbagai pendapat para ilmuwan tentang pengertian asuransi, di antaranya Greene menyatakan bahwa asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang diderita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil. Untuk keseragaman pengertian di Indonesia, dituangkan dalam UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian akibat kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan dan terjadinya suatu peristiwa tidak terduga. Pihak-pihak yang memegang peranan dalam asuransi adalah:

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau mengangsur
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan memberikan proteksi tertanggung (*insured*) yang menerima proteksi.
- c. Peristiwa (*accident*), yang tidak diduga atau yang tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang memungkinkan terjadinya kerugian.
- d. Kepentingan (*interest*), yang mungkin dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi.

Memahami jasa perasuransian bagi calon nasabah sangat diperlukan sebelum memutuskan membeli jasa tersebut. Jenis-

jenis asuransi yang sering ditawarkan kepada masyarakat antara lain:

- a. Asuransi Jiwa, asuransi mencakup perlindungan: 1) Yang dipertanggungkan jiwa manusia; 2). Risiko yang dihadapi adalah kematian tetapi kejadian kematian belum diketahui; 3). Risiko hanya terjadi dan klaim dibayar sekali; 4). Dalam premi terdapat unsur gabungan dan proteksi dan 5). Kontrak pada umumnya jangka panjang
- b. Asuransi Umum, mencakup: 1). Yang dipertanggungkan adalah benda yang bergerak atau yang tidak; 2). Risiko yang dihadapi tidak pasti, bisa terjadi bisa juga tidak; 3).Risiko bisa terjadi beberapa kali dan klaim dibayar beberapa kali; 4). Dalam premi hanya terdapat unsur proteksi; 5). Kontrak pertahun dan bisa diperpanjang.
- c. Asuransi jiwa, yaitu a).Asuransi jiwa biasa, adalah asuransi yang diperuntukkan bagi perorangan yang umum dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.
- d. Asuransi rakyat yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil (buruh, nelayan, karyawan rendah dan lain-lain).
- e. Asuransi kumpulan yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah/swasta, para buruh yang jumlahnya lebih dari 3 orang.
- f. Asuransi dunia usaha yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi pejabat dan karyawan perusahaan Negara maupun swasta dan pemilik perusahaan.
- g. Asuransi orang muda, yaitu asuransi yang diperuntukkan bagi orang-orang muda yang telah mempunyai penghasilan.
- h. Asuransi keluarga, yaitu asuransi yang ditujukan untuk memberikan ketenteraman kehidupan ekonomi keluarga.
- i. Asuransi kecelakaan, yaitu asuransi yang ditujukan untuk melindungi diri dari kecelakaan, melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan melindungi dari kecelakaan akibat pengangkutan darat, laut dan udara.

Beberapa manfaat jasa asuransi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Dapat memberikan rasa aman dan perlindungan. Artinya, bila memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul risiko kerugian dikemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan ini diberikan jaminan oleh penanggung.
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil (*the equitable assetment of cost*) yang artinya, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungsannya.
- 3) Memberi kepastian. Artinya, merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti.
- 4) Sarana menabung Artinya, selama masa asuransi tidak terjadi klaim, uang yang di asuransikan dikembalikan, yang biasanya untuk jenis asuransi tertentu. Contoh: asuransi jiwa, saat ini kita mengeluarkan uang, sedangkan penggunaannya di kemudian hari.
- 5) Instrument pengalihan dan penyebaran risiko. Artinya, melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarakan kepada pihak penanggung.
- 6) Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung rtinya, tertanggung yang akan berinvestasi padasuatu bidang usaha bila investasi (usaha tertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.
- 7) Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress Artinya, karena merasa bahwa segala risiko dapat

diasuransikan telah ada yang mengcover, akan memberikan ketenangan dalam hidup dan hidup penuh semangat.

- 8) Jaminan kredit Artinya polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (*insurance server as a basis of credit*) biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.
- 9) Sebagai media perencanaan keuangan.

Premi adalah biaya yang dibebankan suatu perusahaan asuransi untuk jumlah uang pertanggungan tertentu. Aktuaris perusahaan asuransi mempertimbangkan banyak faktor ketika melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk menetapkan tarif premi yang memadai dan wajar. Premi merupakan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Dengan demikian premi asuransi akan merupakan imbalan jasa atas jaminan atau perlindungan yang diberikan penanggung kepada tertanggung dan mengembalikan tertanggung kepada posisi seperti sebelum terjadi kerugian. Premi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan sebagai hadiah, sumbangan, atau sesuatu yang dibayar sebagai tambahan (ekstra) perangsang.

Dalam skop asuransi, premi merupakan a). Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin di derita oleh tertanggung; b). Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua maupun risiko kematian (asuransi jiwa). Pengembalian premi dari penanggung kepada tertanggung karena perjanjian gugur sebelum penanggung menanggung bahaya atau telah menanggung sebagian, premi dibayar lebih, tanpa insurable interest, kondisi jaminan dipersempit dan lain-lain.

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar maka klaim yang akan diterima pun juga besar. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan investasi untuk keluarga peserta. Jika premi yang dibayarkan kecil, maka klaim yang akan diterima pun kecil juga, sebaliknya jika premi yang dibayarkan besar maka klaim yang akan diterima pun juga besar.

Polis adalah kontrak penutupan (bukti tertulis) asuransi antara tertanggung dengan penanggung di mana penanggung dengan menerima sejumlah premi mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang timbul atas objek yang dipertanggungkan sesuai yang tercantum dalam polis asuransi. Dalam surat perjanjian (kontrak) disebutkan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang diperjanjikan kedua belah pihak, hak-hak masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian.

Fungsi polis antara lain: a).Perjanjian pertanggungan; b).Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip: i).Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian, ii). Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan; c).Bukti

pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.

Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya. Demikian pula bagi nasabah yang mengharapkan polis asuransi akan menerima manfaat dengan jasa asuransi yang digunakan. Keuntungan dari usaha asuransi untuk masing-masing pihak yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi perusahaan a). Keuntungan dari premi yang diberikan kenasabah; b). Keuntungan dari hasil penyertaan modal dari perusahaan lain; c). Keuntungan dari hasil bunga dari investasi disurat-surat berharga;
- 2) Bagi nasabah: a). Memberikan rasa aman; b). Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik Kembali; c). Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan; d). Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang; e). Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kerugian.

2.3 Peranan Asuransi

Asuransi merupakan suatu perjanjian yang diwakili polis di mana seorang individu atau entitas menerima perlindungan finansial atau penggantian terhadap kerugian dari perusahaan asuransi. Dengan memiliki polis asuransi, nasabah bisa melindungi nilai terhadap risiko kerugian finansial. Kerugian itu bisa besar maupun kecil, bisa dapat disebabkan oleh kerusakan pada tertanggung atau propertinya, atau bisa juga disebabkan oleh pihak ketiga. Hidup nasabah akan lebih tenang bisa memiliki asuransi karena hampir setiap kerugian bisa ditanggung perusahaan asuransi meskipun hanya sebagian saja. Hidup seseorang tidak bisa diprediksi dan juga tidak tahu risiko apa yang akan terjadi di masa mendatang

sehingga peran asuransi menjadi sangat penting. Ternyata peran asuransi tidak hanya penting bagi individu dan masyarakat, melainkan juga untuk perusahaan, lembaga investasi, sampai perekonomian negara.

Manfaat asuransi bagi pihak tertanggung

Asuransi bisa jadi alat untuk mengurangi risiko perekonomian dengan cara menggandeng sejumlah unit kerja/orang/perusahaan dengan potensi risiko yang sama atau hampir sama agar kerugian tersebut bisa ditanggung semua pihak dalam gabungan itu. Koordinasi antar pihak itu amat bermanfaat karena bisa menanggung kerugian secara bersama-sama bila terjadi risiko yang tidak diinginkan. Beberapa andil perusahaan asuransi terhadap pihak tertanggung, antara lain :

a. Sebagai pengalihan Risiko

Asuransi mampu mengalihkan risiko yang diderita nasabah sehingga kemungkinan akibat kerugian dari peristiwa yang tidak terduga bisa dirubah menjadi kepastian (*certainty*) yakni berupa ganti rugi atau santunan klaim dari premi asuransi yang telah dibayarkan. Pengalihan risiko berguna memberikan ketenangan kepada nasabah terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya peristiwa yang merugikan. Mungkin nilai premi yang dibayar nasabah relatif sedikit ketimbang nilai imbalan yang didapat bila terjadi risiko.

b. *Common Pool*

Fungsi ini menjelaskan bahwa perusahaan asuransi akan menerima premi dari sejumlah besar tertanggung dengan kerugian atas risiko yang sama. Penetapan kontribusi (premi) ditetapkan pada saat awal kontrak. Selanjutnya premi dari para tertanggung untuk risiko yang sejenis akan dikumpulkan dalam bentuk *pool* atau dana (*fund*) lalu diambil sebagian untuk membayarkan klaim asuransi yang terjadi.

c. *Reduction of Loss*

Peran perusahaan asuransi kepada nasabah berikutnya yakni membantu perkembangan perekonomian melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu risiko, membatasi kerugian yang terjadi atau menurunkan tingkat kerugian. Perusahaan asuransi melaksanakan survei supaya risiko yang ditanggung makin kecil. Survei itu bisa berupa pemetaan risiko berdasarkan tingkat kerugian yang mungkin timbul, membebankan risiko sendiri kepada tertanggung, memberikan edukasi kepada tertanggung terkait cara-cara pencegahan kerugian dan lain-lain.

2.3.1 Peranan Asuransi Terhadap Perusahaan Asuransi

Jaminan asuransi dibutuhkan oleh masyarakat dan perusahaan asuransi itu sendiri. Perusahaan asuransi membutuhkan jaminan asuransi dari perusahaan asuransi lainnya atau disebut reasuransi. Reasuransi adalah istilah saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Ada berbagai alasan yang membuat perusahaan asuransi melakukan reasuransi. Salah satunya adalah untuk pembagian atau penyebaran terhadap risiko asuransi. Jika nilai asuransi suatu premi lebih besar daripada nilai yang dapat ditanggungnya, perusahaan asuransi bisa membagi risiko yang dihadapinya dengan mengasuransikan kembali sebagian nilai tersebut kepada perusahaan lain (perusahaan reasuransi). Tujuannya untuk melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya karena reasuransi telah melindunginya dari potensi kerugian yang besar.

Alasan lain perusahaan asuransi melakukan reasuransi yakni demi mendapatkan keuntungan sebagai perantara dengan mengasuransikan kembali pada perusahaan reasuransi. Hal ini

mungkin terjadi bila premi dari perusahaan reasuransi ternyata lebih rendah daripada tingkat premi yang dikenakan perusahaan asuransi itu sendiri pada pelanggannya.

Setiap perusahaan asuransi tentunya memastikan premi yang harus dibayar oleh tertanggung sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki. Bila jumlah premi terlalu besar, bisa menyebabkan perusahaan asuransi kehilangan bisnis karena tertanggung memilih perusahaan pesaing. Namun bila jumlah premi terlalu sedikit, bisa menyebabkan perusahaan asuransi tidak mendapatkan dana yang cukup untuk melakukan pembayaran klaim. Fungsi pertimbangan ini disebut *equitable premiums*.

2.3.2 Peran Perusahaan Asuransi Bagi Nasabah

Peran asuransi untuk individu maupun masyarakat tidak beda jauh dengan peran untuk nasabah. Pada akhirnya individu atau masyarakat yang menggunakan jasa asuransi juga bisa disebut nasabah. Peranan asuransi bagi individu atau masyarakat:

- a) Mengalihkan risiko finansial akibat kejadian tertentu sebagai proteksi keluarga maupun diri
- b) Terbiasa untuk mengelola uang karena kamu harus menyisihkan dana tertentu untuk persiapan masa depan

Asuransi pada masyarakat merupakan subsidi silang antara individu dengan individu lain. Sebab uang premi yang telah dibayarkan ke asuransi dapat digunakan untuk perawatan individu lain.

2.3.3 Peran Asuransi Sebagai Dana Investasi

Asuransi dapat berfungsi sebagai penghimpun dana (*insurance investment*) dari nasabah atau pemegang polis. Dana yang terhimpun (dari premi yang dibayarkan) dapat

dikembangkan perusahaan asuransi untuk investasi yang lebih menguntungkan. Investasi merupakan pilihan yang paling logis supaya uang yang terkumpul bisa dikelola dengan produktif. Hasil dari investasi bisa digunakan sebagai strategi dalam menurunkan biaya premi maupun untuk menangani risiko-risiko yang ditanggung para pembayar premi atau nasabah.

Program asuransi merupakan suatu unit link yang memiliki sifat seperti tabungan sehingga nasabah dapat melakukan investasi yang aman dengan tetap mendapatkan kesempatan perlindungan asuransi.. Khusus untuk asuransi jiwa, nilai kembalian dari premi asuransi yang dibayar bisa menjadi tabungan yang cukup menjanjikan.

Berbagai perusahaan asuransi swasta yang menawarkan produk asuransi kesehatan seperti Prudential, Allianz, AXA Mandiri dan Manulife yang pada umumnya telah memiliki produk asuransi unit link. Jenis asuransi kesehatan berbasis unit link bisa membantu para nasabah karena bisa menikmati hasil investasi jangka panjang dan juga perlindungan kesehatan.

2.3.4 Peranan Asuransi Dalam Perusahaan

Peranan perusahaan asuransi dalam bisnis adalah sebagai *assistance to business enterprise*. Berarti asuransi mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha melalui pemberian jaminan atas setiap risiko kerugian yang mungkin akan dialami oleh pemilik modal atau pengelola usaha tersebut. Dengan menggunakan asuransi maka pemilik modal tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan akan kehilangan investasi bila terjadi suatu bencana. Sementara bagi pengusaha, membayar asuransi yang preminya relatif kecil bisa menghindarkan dari risiko kerugian yang lebih besar. Beberapa peran perusahaan asuransi dalam bisnis dapat dilihat sebagai berikut:

a) Perlindungan terhadap risiko.

Asuransi jenis ini bisa melindungi dan mengantisipasi bisnis/usaha dari dampak yang terjadi dari beragam hal yang tak diharapkan. Seperti terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya.

b) Penggantian Kerugian

Setiap usaha tentu memiliki risiko dari yang besar, sedang, sampai kecil. Asuransi bisa menutupi kerugian dalam jumlah yang besar sehingga menghindarkan kamu dari kerugian dalam jumlah yang besar atau kebangkrutan. Meski harus membayar premi secara berkala, asuransi akan sangat membantu dalam menghadapi semua risiko.

c) Memberikan Pondasi yang Kuat. Kamu tidak perlu pusing-pusing memikirkan risiko bisnis yang ditimbulkan dengan asuransi. Pasalnya, bisnis yang memiliki pondasi kokoh membuatnya lebih kuat dengan adanya asuransi yang berperan sebagai perlindungan bisnis dengan upaya pengalihan risiko.

d) Menjadi Pengusaha yang Berani dan Tangguh

Risiko yang terjadi adalah hal yang biasa Ketika menjalankan suatu bisnis. Semakin besar usaha yang dikelola akan semakin besar risiko yang akan dihadapi. Banyak manajer takut mengambil risiko dalam mengembangkan bisnisnya. Sebagai solusi yang tepat dilakukan yaitu dengan menggunakan asuransi sebagai perlindungan dalam pengembangan usaha secara maksimal. Asuransi perlindungan bisnis dapat menyelesaikan semua bentuk risiko yang mungkin terjadi sehingga manajer lebih berani dalam menghadapi risiko dan rintangan.

2.3.5 Peran Asuransi dalam Perekonomian dan Pembangunan Bangsa Indonesia

Usaha asuransi memiliki kedudukan strategis dalam upaya memajukan kesejahteraan umum maupun perekonomian negara karena asuransi dapat menghimpun dana masyarakat. Sehingga usaha asuransi perlu dibina dan diawasi secara berkesinambungan dari stakeholders, pemerintah daerah dan pusat dengan tujuan untuk menjamin keamanan dana masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1992. UU tersebut menjadi landasan perusahaan asuransi dan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. UU tersebut juga mendukung adanya kebebasan masyarakat untuk memilih perusahaan asuransi yang diinginkan. Selain itu UU No. 2 tahun 12 telah menetapkan ketentuan prinsip dan penyelenggaraan usaha asuransi supaya terhindar sejauh mungkin dari praktik usaha yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Alasan yang lain adalah agar jasa asuransi yang ditawarkan bisa diselenggarakan atas dasar pertimbangan obyektif dan tidak merugikan pemakai jasa. Sebagai salah satu lembaga keuangan yang punya peranan penting, usaha perasuransian diharapkan mampu meningkatkan pengedaran dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan.

2.3.6 Peran Lembaga Asuransi

Beberapa peran lembaga asuransi, diantaranya :

- a. Asuransi Mampu Menampung Kerugian Akibat Risiko Pembangunan

Pembangunan memiliki risiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Sehingga dibutuhkan kehadiran asuransi yang tangguh supaya

mampu menampung kerugian yang timbul oleh adanya berbagai risiko.

- b. Asuransi Merupakan Sarana Finansial Rumah Tangga
Kebutuhan jasa usaha asuransi mencakup tatanan ekonomi rumah tangga. Tujuan untuk menghadapi risiko finansial yang paling mendasar yaitu risiko alamiah seperti meninggal dunia, risiko atas harta benda yang dimiliki dan sebagainya.
- c. Asuransi Dapat Menampung Risiko Dunia Usaha
Kebutuhan usaha perasuransian juga dirasakan dunia usaha mengingat di satu pihak terdapat berbagai risiko yang secara sadar dan rasional dirasakan dapat mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Sisi lain dunia usaha sering kali tidak dapat menghindarkan diri dari suatu sistem yang memaksanya untuk menggunakan jasa usaha asuransi.
- d. Asuransi dengan Sektor Lain Memiliki Peranan dalam Pembangunan
Usaha asuransi telah lama hadir di dalam meningkatkan perekonomian Indonesia dan turut hadir dalam perjalanan sejarah bangsa yang berdampingan dengan sektor kegiatan lain.
- e. Menjanjikan Perlindungan dan Menghimpunan Dana Masyarakat.
Kitab UU Hukum Dagang (KUH Dagang) mengatur asuransi sebagai suatu perjanjian dalam usaha perasuransian. Usaha asuransi adalah usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung sekaligus menyangkut dana masyarakat. Kedua peranan tersebut berdampak positif bagi perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat.

2.3.7 Peran Asuransi Ekspor

Asuransi dapat memberikan perlindungan pada eksportir terhadap risiko tidak diterima sebagian atau seluruh pelunasan tagihan ekspor dari importir yang disebabkan resiko politik atau risiko komersial. Sehingga eksportir memiliki perasaan tenang dan rasa aman dalam menghadapi risiko ekspor dan dapat meningkatkan keberanian dalam melakukan perluasan pasar ke negara lain. Asuransi Ekspor berguna untuk memperoleh pembiayaan diskonto wesel ekspor (*post shipment export financing*). Asuransi Ekspor dapat dipergunakan sebagai jaminan tambahan kepada bank.

Demikian halnya peran perusahaan asuransi dalam ekspor berfungsi *invisible export*. Hal tersebut sebagai penjual asuransi keluar negeri maupun sebagai pihak yang mengalihkan atau menempatkan sebagian risiko-risiko dalam negeri khususnya risiko yang kurang menguntungkan keluar negeri dalam bentuk perjanjian (*treaty*) maupun *facultative*. Kegiatan pengalihan risiko keluar negeri itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan export karena menghasilkan devisa bagi negara. Aktivitas ini disebut ekspot yang tidak nyata (*invisible export* sebab komoditas yang diekspor berupa data-data risiko).

2.3.8 Peran Asuransi dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* atau SDGs

Mengutip dari situs Kementerian Keuangan, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) merupakan panduan arah kebijakan pembangunan yang telah diadopsi 193 negara di dunia sejak tahun 2015. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan damai dan sejahtera di masa kini maupun masa mendatang. Gagasan SDGs berdasarkan pada

tujuan kemajuan yang berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial.

Asuransi juga memiliki peranan penting dalam pencapaian target-target SDGs sebab mampu berperan sebagai mitigasi risiko bencana, penyediaan instrumen jaminan atas proyek SDGs, penanggulangan kemiskinan dan khusus asuransi syariah, menyediakan alternatif bagi mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional (inklusi asuransi).

Asuransi mampu berperan dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan alternatif mitigasi atas risiko-risiko besar yang walaupun kemungkinan terjadinya kecil, namun berdampak amat besar. Misalnya asuransi jiwa bagi keluarga yang mana hanya ayah yang bekerja (*single income*). Peran asuransi secara umum lainnya yakni sebagai mitigasi risiko bencana, kesehatan maupun jiwa, baik secara perorangan maupun dalam jumlah besar atau yang biasa disebut dengan *fundamental risk*. Risiko bencana alam bisa berupa gempa bumi, banjir atau gunung meletus yang berdampak pada puluhan hingga ribuan orang secara sekaligus. Dengan adanya asuransi bencana alam, berbagai potensi risiko bisa diminimalisir khususnya bagi orang yang tinggal di daerah yang rawan bencana alam.

Asuransi juga bisa mendukung pencapaian SDGs berupa penyediaan instrumen penjaminan atas proyek-proyek SDGs seperti pembangunan sarana transportasi, sanitasi, listrik dan lain-lain. Bentuk jaminan yaitu ganti rugi kepada investor apabila proyek yang dijanjikan gagal diselesaikan akibat bencana alam. Adanya mekanisme penjaminan mampu mendorong peran investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek SDGs.

2.3.9 Peranan Asuransi Syariah

Asuransi syariah mampu berperan dengan menyasar mereka yang tidak tersentuh dengan asuransi konvensional karena alasan keyakinan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi orang yang tidak mau menerima asuransi konvensional tentunya amat besar. Jadi asuransi syariah bisa berperan penting. Semoga Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan progress paling tinggi dalam hal pencapaian target-target SDGs berkat sumbangsih semua sektor termasuk asuransi. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi Syari'ah dapat dilihat dalam Tabel1, berikut.

Tabel 2.1. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

NO	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihakpenanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru'
	Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum islam

NO	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Liyod Of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung oleh Rasulullah
		Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan lain-lain	Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Alquran, Sunnah atau kebiasaan rasul ijma", fatwa sahabat, qiyas, istihsan, 'urf „tradisi', dan mashalih mursalah.
	Dewan Pengawas	Tidak ada sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan

NO	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		kaidahkaidah syara	operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsipprinsip syariah.
	Jaminan resiko	Transfer Of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung	Sharing Of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awur).
	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita, bunga, biaya-biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru" dan tabungan.
	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', dimana peserta saling menanggung.

2.4 Kerugian Akibat Asuransi

Beberapa persepsi masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan jasa asuransi, antara lain:

1) Proses klaim asuransi sulit dilakukan.

Pembayaran premi perusahaan asuransi selalu mempermudah nasabah, akan tetapi giliran ingin mengajukan klaim dipersulit karena dokumen persyaratan belum lengkap. Demikian halnya nasabah sudah menunggu lama dan klaim belum tentu diterima. Klaim bisa saja ditolak karena beberapa alasan seperti dokumen masih ada yang kurang, tidak valid atau alibi lainnya. Sebetulnya, proses pengajuan klaim asuransi dapat berjalan lancar bila nasabah melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan. Dengan begitu, penggantian biaya pun dapat cair sesuai waktu yang ditentukan.

2) Kedok Penipuan

Jasa asuransi sering terjadi karena adanya oknum atau pelaku kejahatan yang menipu nasabah yang mengiming-imingi premi murah, klaim sangat mudah dan cepat, tetapi ternyata penipuan. Sebelum memilih jasa asuransi terlebih dahulu memastikan keberadaan asuransi tersebut. Jadi di saat mengajukan atau membeli asuransi hendaknya pada perusahaan asuransi terpercaya. Yang telah memiliki izin resmi dari pemerintah dan asuransi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Demikian halnya bila membeli asuransi dari agen hendaknya memilih yang bersertifikat khusus dari asosiasi asuransi. Sebaiknya meminta pada agen untuk menunjukkan sertifikat khusus tersebut sebelum melakukan pembelian supaya terhindar dari kasus penipuan dan tanyakan pula apapun tentang asuransi yang belum dipahami kepada agen. Seperti cara membaca ketentuan polis dan memahaminya.

3) Merasa Belum Membutuhkan Asuransi.

Kurangnya kesadaran terhadap seseorang akan pentingnya perlindungan diri atas risiko menjadi salah satu alasan mengapa asuransi kurang diminati. Bila kalau dipikirkan bahwa hal yang buruk bisa terjadi kapan saja, di mana saja dan menimpa siapapun tanpa pandang bulu. Sebaiknya mengubah mindset tentang asuransi dan lihat manfaat jangka panjang. Asuransi ibarat sediakan payung sebelum turun hujan, jangan setelah terkena risiko baru sadar dan membeli asuransi yang berarti sudah terlambat. Bila mengajukan asuransi ketika sudah sakit pasti pembayaran preminya lebih mahal dan terkadang pengajuan menjadi anggota asuransi akan ditolak. Jenis premi asuransi berbeda-beda, manfaat berbeda dan berbeda pula biaya premi yang harus dibayar. Bila ingin mendapatkan manfaat asuransi secara maksimal dan menyeluruh dengan cakupan lebih luas hendaknya calon nasabah harus berani bayar lebih mahal. Supaya tidak terjadi kesalah pahaman di masa mendatang sebaiknya tanyakan perihal manfaat asuransi kepada agen asuransi yang menawarkan produknya. Bertujuan supaya tidak merasa dirugikan di kemudian hari.

4) Produk asuransi bikin bingung.

Produk dan jenis asuransi yang ditawarkan bermacam-macam. Di antaranya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, hingga asuransi properti. Hal tersebut harus diperhatikan supaya tidak membuat bingung karena manfaat yang didapatkan sudah sesuai dengan jenis produk. Bila mengajukan asuransi kesehatan, sudah pasti manfaatnya menanggung kerugian finansial akibat risiko kesehatan. Sedangkan asuransi jiwa, mengcover atau memberi santunan kepada ahli waris apabila kamu sebagai tulang punggung keluarga meninggal dunia. Jangan mudah percaya dengan stigma negative

karena stigma negatif biasanya berisi dugaan yang belum pasti kebenarannya.

2.5 Kesimpulan dan Saran

Era revolusi industri 4.0 keberadaan jasa asuransi semakin penting dalam kehidupan masyarakat, baik individu maupun perusahaan. Sebab asuransi merupakan sarana finansial di dalam tata kehidupan masyarakat, baik dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki maupun dalam penanganan kesehatan badan. Hal tersebut dikarenakan asuransi merupakan metode yang paling efektif untuk menangani resiko atas harta dan benda yang dimiliki. Manfaat asuransi yang menjanjikan perlindungan pada pihak tertanggung kepada resiko yang akan dihadapi perorangan maupun yang dihadapi perusahaan.

Saran

Sebelum menjadi anggota asuransi perlu mengetahui manfaat dan kerugian asuransi jiwa/kesehatan sebelum menggunakannya. Carilah asuransi yang dibawa naungan OJK sehingga saat mengklaim polis tidak sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatihudin, Didin, Anang Firmansyah. 2019. Pemasaran jasa. Yogyakarta:
- Hafidhudin, Didin, Fathurahman Djamil. 2009. Solusi Berasuransi. Bandung
- Irzal. 2016. Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2015. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2012. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media.
- Novi. 2015. Manajemen Asuransi Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Purnomo, Agus. 2017. "Analisis Pembayaran Premi Dalam Asuransi Syariah". Jurnal of Islamics Economics Vol. 1 No. 1.
- Puspitasari, Novi. 2015. Manajemen Asuransi Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Salamadani. Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sigma. 2011. Jurusan Pintar Asuransi. Yogyakarta: G media.

BAB 3

PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Oleh Sasmita Nabila Syahrir

3.1 Sejarah Munculnya Profesi Akuntan Publik

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan kecil tidak pernah mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaannya. Dimana pemeriksaan terhadap laporan keuangan sangat berguna bagi entitas atau perusahaan, untuk memahami apakah pengelolaan keuangan sudah dikelola secara benar dan apakah dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terjadi karena para pemegang perusahaan tidak meminjam modal dari pihak manapun melainkan hanya modal sendiri, sehingga pemilik perusahaan hanya bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, perusahaan-perusahaan sudah banyak mengalami masalah-masalah dalam menjalankan dan mengelolah keuangan perusahaannya, misalnya pada perusahaan jual beli barang, pemilik perusahaan tidak mengetahui keuntungan perusahaan, tidak mengetahui jumlah persediaan barang yang tersisa, dan modal yang dulunya cukup untuk dibelanjakan menjadi tidak cukup untuk dibelanjakan.

Disinilah pentingnya akuntan publik yang akan menilai laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan, dimana akuntan publik bersifat independen yaitu bersifat jujur, bebas, memiliki pertimbangan secara obyektif, tidak memihak pada siapapun dan menyatakan pendapatnya setelah memeriksa laporan keuangan, apakah opini yang dikeluarkan dari auditor telah wajar ataupun tidak.

Dengan demikian, sangat perlu di adakan penyajian dan penilaian secara obyektif, sehingga lahirlah profesi akuntan publik untuk memberikan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan yang baik bagi perusahaan.

3.2 Definisi Profesi Akuntan Publik

Kata profesi berasal dari bahasa Yunani yaitu *professio* yang artinya janji/ikrar dan pekerjaan. Dalam arti lain profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang di dasari oleh keahlian dengan dasar pendidikan terlebih dahulu. Definisi lain dari profesi akuntan publik adalah seorang akuntan publik telah menjadi anggota IAPI dan dalam melakukan tugasnya dalam memeriksa laporan keuangan telah diakui oleh publik serta mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.

Sebagai akuntan publik ada beberapa tugas yang dilakukan meliputi audit laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, mengaudit pajak, dan sebagainya. Seorang akuntan publik harus terdaftar sebagai anggota IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

3.3 Bidang Jasa Akuntan Publik

3.3.1. Jasa Atestasi

Jasa atestasi adalah jasa penjamin yang dilakukan oleh seorang akuntan pada kantor akuntan publik dengan menerbitkan suatu laporan tertulis suatu perusahaan sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan yang memiliki kemampuan mengenai suatu pernyataan yang telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jasa atestasi dilaksanakan agar memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga tentang kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Maka dari itulah jasa akuntan publik yang paling dibutuhkan adalah jasa atestasi. Berikut contoh jasa atestasi:

1. Audit laporan keuangan
2. Review laporan keuangan
3. Kompilasi
4. Jasa attestasi lain

3.3.2. Jasa Non Atestasi

Jasa non attestasi adalah jasa seorang akuntan pada kantor akuntan publik yang dimana tidak memberikan opini, catatan temuan, keyakinan negatif, ataupun laporan lain dari opini pribadi. Berikut contoh jasa non attestasi :

1. Kompilasi laporan keuangan
2. Penyusunan sistem keuangan
3. Jasa administrasi

3.4 Perizinan Akuntan Publik

Untuk membuka kantor akuntan publik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah persyaratan dalam mendirikan izin akuntan publik :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Telah mengikuti pelatihan profesi akuntan publik yang disertakan dengan sertifikat lulus.
3. Memiliki surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan kantor akuntan publik.
4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
5. Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipidana.
6. Memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit.
7. Memiliki bukti keanggotaan asosiasi profesi akuntan publik yang masih aktif.
8. Pas foto berwarna latar putih dengan ukuran 4x6.
9. Memiliki bukti biaya pembayaran izin akuntan publik sebesar Rp. 1.000.000.

3.5 Jenis-Jenis Jasa Akuntan Publik

Berikut jenis-jenis jasa akuntan publik :

1. Jasa akuntansi, yang berguna untuk menyiapkan laporan keuangan perusahaan.
2. Jasa perpajakan, berguna untuk membuat laporan perpajakan perusahaan yang akan dilaporkan setiap tahunnya.
3. Jasa konsultasi akuntansi dan manajemen, berguna untuk membantu perusahaan dalam memberikan pendapat ataupun solusi mengenai masalah-masalah yang ada pada perusahaan.

3.6 Tugas Akuntan Publik

Kita telah mengetahui definisi dari profesi akuntan publik, tentu saja kita harus mengetahui tugas-tugas dari profesi akuntan publik itu sendiri. Tugas akuntan publik adalah :

1. Memeriksa laporan keuangan perusahaan yang di buat oleh perusahaan klien
2. Memastikan laporan keuangan perusahaan klien sudah mematuhi standar keuangan di Indonesia
3. Menghitung pendapatan dan pajak serta urusan administrasi perpajakan
4. Mengaudit informasi dan menyampaikan informasi laporan keuangan ke stakeholder klien
5. Mengelola akuntansi umum dan arus kas perusahaan klien
6. Memberi saran untuk pengambilan keputusan tentang pengeluaran biaya, pajak, dan keuangan.

3.7 Akuntan Publik Profesional

Untuk mengetahui seperti apa akuntan publik yang profesional, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari profesional. Menurut David H. Maister

(1998:56) mengatakan bahwa orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya.

Memang tak mudah menjadi seorang akuntan yang profesional. Akuntan publik harus menjaga nilai-nilai dan profesionalisme yang menjadi citra terpenting bagi profesi akuntan publik di Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam dunia akuntan publik. Berikut adalah tips menjadi akuntan yang profesional :

Tips menjadi Akuntan Profesional

- Memiliki gelar S1 di akuntansi
- Memiliki banyak jam terbang atau berpengalaman
- Mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat akuntan
- Memiliki banyak rasa ingin tahu
- Disiplin
- Jujur

3.8 Peran Akuntan Publik

Peran akuntan publik adalah memberikan penilaian apakah isi laporan keuangan itu wajar atau tidak dalam bentuk opini atau pendapat yang bebas dari salah saji material sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau dengan kata lain memberikan peningkatan kualitas informasi keuangan bagi pengambil keputusan. Berikut beberapa peran akuntan publik yang perlu kita ketahui :

1. Sebagai sumber informasi keuangan perusahaan
2. Dijadikan sebagai analisa bisnis dan juga perencanaan bisnis
3. Membantu pertimbangan investor pasar modal
4. Membantu sektor perpajakan
5. Menjadikan perekonomian yang sehat
6. Pengambilan keputusan

Jadi peran akuntansi dalam suatu perusahaan sangat membantu dan dibutuhkan bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan karena dapat menjadi pengambilan keputusan yang tepat untuk perusahaan.

3.9 Opini Laporan Keuangan

Menurut (Mulyadi 2013, 19) mengatakan bahwa : “Opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.” Oleh karena itu opini laporan keuangan sangat di butuhkan bagi pemangku kepentingan. Pada laporan keuangan ada beberapa jenis opini yang perlu diketahui :

1. *Unqualified opinion* (Opini wajar tanpa pengecualian)

Jika auditor tidak menemukan suatu kesalahan material pada sebuah laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian bila syarat laporan keuangan dapat mencakup hal berikut :

- Lengkapnya laporan keuangan
- Melengkapi bukti audit yg dibutuhkan oleh auditor
- Laporan keuangan harus sesuai standar umum akuntansi
- Memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di akan datang.

2. *Qualified opinion* (Opini wajar dengan pengecualian)

Opini wajar dengan pengecualian akan diberikan jika laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi tidak memenuhi standar akuntansi pada laporan keuangan. Opini wajar dengan pengecualian diberikan pada saat :

- Auditor telah dapat menyimpulkan adanya sebuah kesalahan penyajian yang di dapatkan dari bukti yang diberikan dari perusahaan.
- Opini audit yang tidak berdasar karena auditor tidak memiliki bukti yang tepat.

3. *Modified unqualified opinion* (Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas)

Pada opini ini auditor memberikan opini dengan dasar kondisi tertentu yang bukan pada material secara langsung tetapi ada posting yang tidak lengkap. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas dapat diberikan pada saat :

- Pendapat yang diberikan auditor di temukan pada pendapat daripada auditor lainnya.
- Tidak ditemukannya aturan yang menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan.
- Auditor tidak dapat memperkirakan ketidakpastian suatu peristiwa.

4. *Adverse Opinion* (Opini tidak wajar)

Pendapat tidak wajar diberikan pada saat auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan dengan bukti yang telah cukup, namun auditor telah dapat menyimpulkan telah terjadi sebuah kesalahan pada laporan keuangan. Kesalahan yang dimaksud seperti salah saji ataupun material.

5. *Disclaimer of opinion* (Opini tidak menyatakan pendapat)

Opini tidak menyatakan pendapat diberikan pada saat auditor tidak memberikan opini pada laporan keuangan yang diperiksanya. Hal seperti ini merupakan hak ataupun pilihan bagi auditor dalam memberikan pendapat. Auditor

memberikan opini seperti ini karena tidak adanya bukti yang cukup dan tepat yang di dapatkan oleh auditor. Auditor juga tidak dapat memberikan kesimpulan ada tidaknya kesalahan penyajian material.

3.10 KAP Big Four

Untuk orang-orang yang bernaung di dunia akuntansi, Big Four adalah hal yang sering di dengar. Empat perusahaan yang mendunia dan terkenal yang sangat disukai dan diminati oleh akuntan muda.

Lalu, apa itu Big Four? KAP Big Four adalah empat kantor akuntan publik yang terdiri dari Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler. KAP Big Four ini biasa disebut sebagai worlwide company karena mempunyai banyak kerjasama di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Awalnya, di tahun 1979, kantor akuntan publik terbesar di dunia terdiri dari 8 KAP. Namun, karena adanya merger dan juga masalah lainnya sehingga berubah menjadi 4 saja yang dikenal dengan Big Four.

DAFTAR PUSTAKA

- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2008. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. IFAK. Jakarta.
- Maister, David H. 1998. *True Profesionalism, Profesionalisme Sejati*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Mulyadi. 2013. *Auditing*. Edisi keenam. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- SPAP PSA 29 Seksi 508. 2011. *Laporan Auditor Atas Laporan Keuangan Auditan*. Ikatan Akuntan Indonesia, (29), 508.6.

BAB 4

LAPORAN AUDIT

Oleh Fitria Ningrum Sayekti

4.1 Pendahuluan

Laporan Keuangan digunakan untuk menyediakan data kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Tujuan audit, menurut prinsip akuntansi yang ditentukan, adalah untuk menilai kewajaran semua aspek material dari situasi keuangan, kinerja operasi, dan kas. Laporan audit independen, yang dihasilkan oleh auditor eksternal atau internal, memberikan penilaian formal atas keandalan dan validitas *financial statement* perusahaan. Antara auditor dan *auditee* dapat saling berkomunikasi melalui laporan keuangan. *Stockholders*, kreditur, pemberi pinjaman lainnya, dan calon investor yang memanfaatkan laporan keuangan dan laporan audit.

Pendapat auditor atas Laporan Keuangan adalah opini yang telah dimodifikasi berdasarkan ketentuan tertentu untuk menghasilkan bukti yang objektif terkait aktivitas dan peristiwa keuangan, seperti yang mengandung kesalahan, dan menjadi bukti untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan. Opini audit tidak menunjukkan apakah laporan keuangan telah dijelaskan secara akurat, melainkan apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Signifikansi informasi-informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan keuangan akan digabungkan untuk menentukan kewajaran laporan keuangan.

4.2 Komponen Laporan Audit

Auditor akan melakukan pemeriksaan atau audit atas *financial statement* yang telah disediakan oleh entitas sebagai *auditee*. Setelah penelaahan selesai, Kantor Akuntan Publik (KAP) akan merilis hasil laporan audit. Laporan ini akan berisi informasi berikut:

1. Lembar opini

Sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaannya, akuntan publik bertanggung jawab untuk menyusun lembar opini yang berisi pernyataan pendapat auditor mengenai keakuratan penyajian atas *financial statement* entitas.

2. *Financial statement* yang akan diaudit

Berbagai komponen yang membentuk laporan keuangan adalah laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Bagian umum (fokus pada profil entitas), kebijakan akuntansi, dan penjelasan terkait neraca dan pos-pos laba rugi semuanya dicantumkan dalam catatan yang telah disediakan di atas. Selain itu, informasi tambahan diberikan dalam bentuk spesifik pada item penting seperti utang, aset tetap, beban umum dan administrasi, dan penjualan juga telah disediakan dalam laporan keuangan.

4.3 Elemen Laporan Audit

Laporan audit harus mengikuti standar/ketentuan yang telah digunakan oleh kantor akuntan publik. Dalam laporan audit, terlepas dari apakah itu laporan auditor, laporan yang tidak masuk akal, atau laporan yang tidak dilaporkan, berikut adalah komponen utama yang harus disertakan:

1. Judul "Laporan Auditor Independen"

2. Alamat "pihak yang diberikan tugas melaksanakan audit"

3. Paragraf pengantar, yang meliputi:

- Pernyataan bahwa pemeriksaan telah selesai

- Periode laporan keuangan yang akan diaudit –
 - Jenis laporan keuangan yang diaudit
 - Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan.
 - Tanggung jawab pihak auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit.
4. Paragraf Ruang Lingkup meliputi: pernyataan auditor, pelaksanaan audit berdasarkan standar audit IAI. Pernyataan auditor menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan perencanaan, pengujian, dan pengumpulan bukti untuk mendukung jumlah dan pernyataan dalam laporan keuangan.
 5. Paragraf opini, auditor menyatakan opininya atas laporan keuangan klien pada nilai material.
 6. Identitas Kantor Akuntan Publik, "NAMA", "DAFTAR NEGARA.", "TANDA TANGAN"
 7. Tanggal Laporan "Tanggal yang tertera adalah tanggal selesainya pemeriksaan".

Laporan audit terus dimodifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan auditee serta perubahan kebijakan pemerintah. Agar laporan auditor valid, nama pihak lawan yang berpartisipasi dalam perikatan audit, misalnya, perlu dicetak dan ditandatangani. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nama auditor tidak tertutup oleh nama perusahaan yang diaudit. Mitra mengambil tanggung jawab lebih pribadi ketika nama mereka ditampilkan secara publik. Bagian baru lainnya yang telah ditambahkan ke laporan ini adalah bagian masalah audit utama. Di masa lalu, umumnya laporan hasil audit lebih bersifat umum dan dapat dimanfaatkan untuk sejumlah bisnis yang beragam. Namun, laporan audit sekarang meminta lebih banyak informasi yang spesifik untuk perusahaan agar dapat mengakomodasi perusahaan secara individu dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa komponen laporan auditor independen tahun 2019 sangat penting untuk mematuhi

pedoman tersebut. Struktur laporan audit contoh disajikan pada Gambar 4.1, yang dapat ditemukan di bawah ini.



**KANTOR
AKUNTAN PUBLIK**

Nama KAP

Alamat KAP

Laporan Auditor Independen ← 1

Nomor : 00002/2.0210/AU.1/04/0473-1/1/III/2022

2 → Kepada yang terhormat,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
Nama
Alamat perusahaan

3 → **Laporan atas Laporan Keuangan**
Kami telah mengaudit laporan keuangan *Nama perusahaan*, terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

4 → Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

5 → **Opini**
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk. tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik

6 → Tanda tangan Partner

7 → Bandung, 31 Maret 2022

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0473

Sumber: Annual Report (www.idx.co.id)

Gambar 4.1: Struktur Laporan Audit

4.4 Jenis Opini Auditor

Menurut SPAP (PSA 29 SA Pasal 508), ada lima (lima) opini yang diberikan akuntan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- A. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
- B. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)
- C. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
- D. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)
- E. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Berikut penjelasan masing-masing pendapat:

A. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian

Beragam jenis laporan auditor yang paling umum disebut laporan auditor yang wajar tanpa pengecualian, dan ini menjamin bahwa informasi yang diaudit telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang signifikan. Akuntan publik akan memberikan opini/pendapat ini setelah auditor melaksanakan pemeriksaan berdasarkan SPAP IAI. Selama pelaksanaan audit, tidak ditemukannya inkonsistensi dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Prinsip Akuntansi oleh *auditee* dalam proses penyusunan laporan keuangan yang didukung dengan bukti yang memadai dan sesuai. Penyimpangan GAAP dan pembatasan ruang lingkup keduanya merupakan kondisi yang sering terjadi. Suatu situasi disebut sebagai "penyimpangan GAAP" ketika laporan keuangan mengandung ketidakakuratan material dalam penyajiannya. Misalnya, manajemen telah menolak untuk memperbaiki kesalahan tertentu dalam *financial statement*, merupakan pelanggaran prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Pada bagian lainnya, konsep pembatasan ruang lingkup menggambarkan

keadaan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk mencapai kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak tepat secara material.

Hal ini menunjukkan bahwa bukti-bukti tidak dapat diperoleh auditor atas suatu transaksi, dan mereka juga tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan. Prosedur audit tertentu digunakan pada laporan auditor untuk menyelidiki *pervasiveness*. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu kondisi pada suatu masalah tersebar luas dan berdampak pada sejumlah akun keuangan yang berbeda. Gambar 4.1 memberikan ilustrasi laporan audit yang memiliki opini WTP.

B. Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan

Selain bentuk standar laporan audit, opini wajar tanpa pengecualian juga harus mencakup beberapa bahasa penjelasan.

Kondisi-kondisi yang menunjukkan opini tersebut:

1. Berdasarkan temuan laporan auditor independen lainnya.
2. Ada kejadian luar biasa
3. Di antara kedua periode akuntansi tersebut, terdapat perubahan yang cukup signifikan/material yang telah diterapkan atau metode penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
4. Keadaan khusus berkaitan dengan laporan komparatif
5. BAPEPAM memerlukan data-data keuangan triwulanan tertentu, tetapi tidak disajikan atau ditelaah.
6. Terdapat perbedaan material antara informasi lain dalam dokumen laporan keuangan yang diaudit jika dibandingkan dengan dengan informasi-informasi yang disajikan pada *financial statement*.

Berikut adalah penyajian pada laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan pada Gambar 4.2:

Laporan Auditor Independen

Laporan No.
00041/2.0636/AU.17/05/0764-3/1/IV/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Indonesia Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Indonesia Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan Atas Suatu Hal

Dana Komitmen Kerja Sama

Sebagaimana tercantum dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, saldo uang muka komitmen pada tanggal tersebut berjumlah sebesar (sebelum amortisasi yang ditangguhkan). Seperti dijelaskan dalam Catatan 31d, uang muka komitmen tersebut merupakan pembayaran PT

entitas sependengail, sehubungan dengan kesepakatan kedua pihak untuk mengembangkan kawasan produktif yang berlokasi di prime area di kawasan

Kesepakatan pertama ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2015, dengan obyek kerjasama berupa lahan seluas 1 ha, dimana kedua pihak akan membangun kompleks perkantoran dan komersial (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Awal"). Atas kesepakatan ini, melakukan pembayaran uang komitmen sebesar Rp60.000.000,000 kepada JH. Selanjutnya, pada tanggal 24 November 2016, menandatangani kesepakatan baru dan menambah dana komitmen sebesar Rp30.000.000,000 (untuk selanjutnya disebut "Kesepakatan Tambahan"). Dengan adanya penambahan ini jumlah dana komitmen kerja sama menjadi sebesar Rp90.000.000.000.

Sampai dengan berakhirnya Amandemen Kedua dari Nota Kesepahaman pada tanggal 20 Desember 2019, tidak merealisasikan pengembangan area residential sebagaimana direncanakan dalam kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani dengan JH. Sehubungan dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin tidak menentu akibat pandemi Covid-19, maka melalui Kesepahaman Tambahan Ketiga yang ditandatangani tanggal 19 Mei 2020 sepakat untuk menghentikan sementara waktu, kerjasama pengembangan lahan di areal Bali, sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan. Selanjutnya, penyetujuan untuk mengembalikan dana komitmen yang telah diterima dari melalui konversi dengan aset dalam bentuk tanah secara bertahap sebagai berikut:

- Tahap I: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.192, luas tanah 4,900m²;
- Tahap II: SHGB No.181, luas 10,60m²,

- Tahap III: SHGB No.325, luas 10,750m², senilai Rp32.139.500.000;
- Tahap IV:Sebagian lahan dari SHGB No.324, luas 3,655m², senilai Rp10.925.450.000.

Pada tanggal 19 Mei 2020 telah melaksanakan konversi Tahap I dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 5 atas sebidang tanah dengan sertifikat SHGB No. 192 dengan luas 4,900m² di depan

notaris berkedudukan di Kabupaten tanggal 19 Mei 2020 dengan dengan nilai sebesar

Saat ini Perusahaan sedang berusaha untuk mencapai titik temu dengan dalam menentukan solusi dari ketidaksepahaman tersebut, sehingga diharapkan pada akhirnya dapat menyelesaikan piutang dan utang dengan tersebut dan transaksi di villa.

Kantor Akuntan Publik/
Registered Public Accountants

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0764/
Public Accountant Registration No. AP.0764
27 April 2022 / April 27, 2022



Sumber: Annual Report (www.idx.co.id)

Gambar 4.2: Opini Audit WTP dengan Paragraf Penjelasan

C. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Opini serupa akan diberikan jika laporan keuangan yang telah diaudit disajikan pada posisi keuangan yang wajar, laporan laba rugi, perubahan ekuitas/modal, dan laporan arus kas dalam semua aspek sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali dampak dari kondisi yang terkait. Laporkan pendapat wajar yang diterima jika ada kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan atau jika auditor belum dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengkonfirmasi aspek-aspek tertentu dari keakuratan laporan. Menurut opini, kelalaian tidak banyak sehingga tidak ada risiko terhadap keakuratan seluruh laporan keuangan. Dalam hal kondisi berikut terpenuhi, auditor akan menyatakan bahwa evaluasi itu adil.

1. Pada saat audit, bukti kompeten tidak dikumpulkan karena keterbatasan ruang menghambat kemampuan auditor untuk melakukan audit komprehensif. Periode akhir audit, auditor akan sampai pada kesimpulan bahwa auditor tidak memungkinkan memberikan opini yang wajar tanpa pengecualian.
2. Selama audit, auditor memperoleh bukti terjadi penyimpangan atas prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan informasi umum juga berdampak signifikan; akibatnya, auditor mengeluarkan pendapat bersama dengan penilaian.
3. Setiap orang yang mendukung alasannya harus dicantumkan dalam paragraf atau paragraf tersendiri jika auditor memberikan pendapat yang wajar dan tidak ada temuan yang tidak diharapkan.

Gambar 4.3 di bawah ini merupakan contoh opini wajar dengan pengecualian:

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01039/2.1051/AU.1/05/0456-1/18X/2019

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut sebagai Grup) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi keterlitan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang adanya laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Public Accountant Registration No. AP. 0456

16 September 2019 September 16, 2019

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 18 dan 43 butir d atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, efektif per 31 Juli 2018, manajemen Perusahaan

memutuskan untuk menghentikan kerjasama operasi dengan (BPLK), Entitas Anak. Atas penghentian tersebut, sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, belum memperoleh perhitungan pembagian penyerahan kerjasama operasi. Oleh karena itu, kami tidak memiliki basis untuk memperoleh keyakinan memadai atas nilai tercatat investasi pada pengendalian bersama entitas yang tercatat sebesar Rp 69,03 miliar pada tanggal 31 Desember 2018.

Opini

Menurut opini kami, kecuali dampak yang kami jelaskan dalam Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Tanpa menyatakan pengecualian lebih lanjut atas pendapat kami, kami membawa perhatian pada Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian, yang mengindikasikan bahwa Grup memperoleh laba tahun berjalan sebesar Rp 2,73 triliun, laba tersebut terutama berasal dari keuntungan penyelesaian obligasi konversi. Lebih lanjut, Grup mengalami arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar Rp 58,07 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan, pada tanggal tersebut, jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Grup sebesar Rp 3,94 triliun dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika Serikat dan Euro Eropa. Dari jumlah keseluruhan liabilitas tersebut, liabilitas jangka pendek tahun 2018 adalah sebesar Rp 2,54 triliun dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1,40 triliun. Lebih lanjut, pada tanggal 31 Desember 2018, beberapa Entitas Anak mengalami akumulasi rugi bersih sebesar Rp 1,17 triliun dan defisiensi modal sebesar Rp 407,56 miliar. Kelangsungan usaha Grup tergantung pada kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dan mencapai operasi yang menguntungkan di masa mendatang. Rencana manajemen untuk mengatasi kondisi tersebut diungkapkan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyelesaian yang mungkin timbul dari hasil ketidakpastian ini.

Hal lain

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan 1 butir c,

Investama) merupakan Entitas Anak yang tidak aktif beroperasi, sedangkan

merupakan entitas masih dalam tahap pengembangan. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa Entitas Anak yang masih dalam tahap pengembangan tersebut akan terus melanjutkan aktivitasnya.

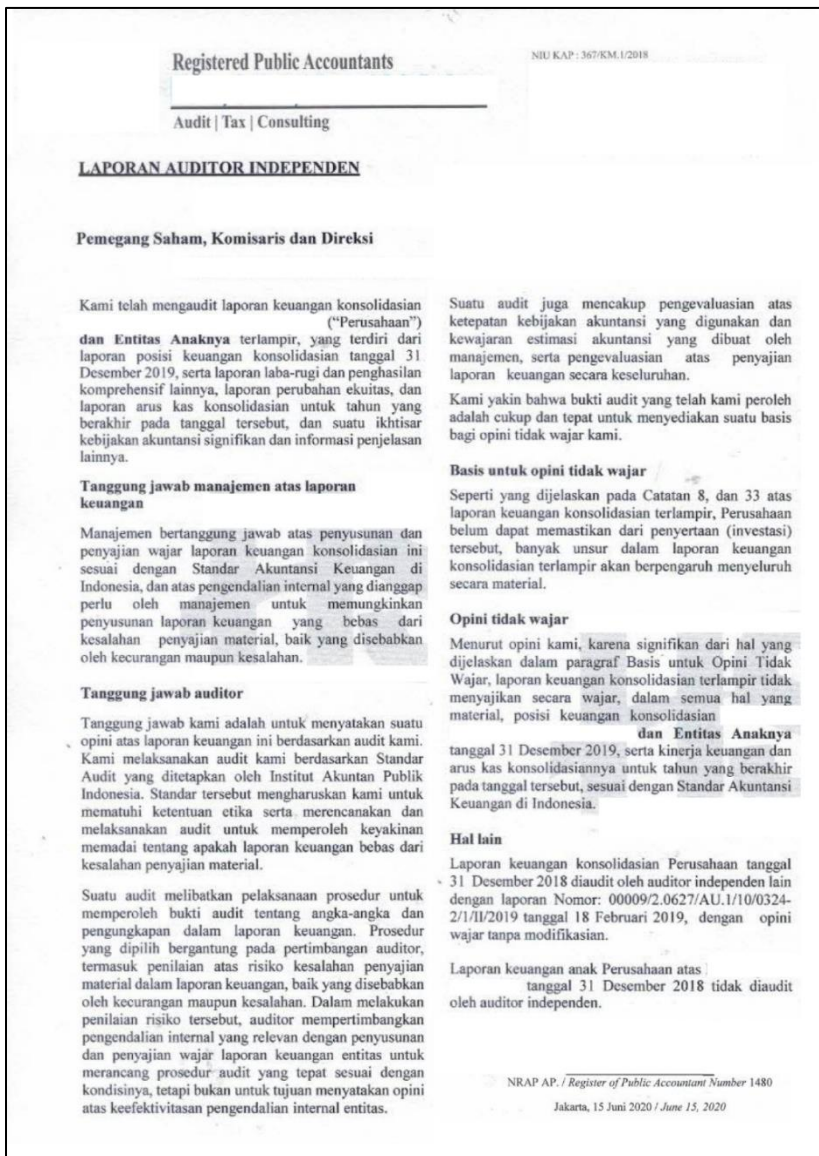
Sumber: Annual Report (www.idx.co.id)
Gambar 4.3: Opini Audit WDP (Wajar dengan Pengecualian)

D. Opini Tidak Wajar

Pendapat ini akan diterbitkan jika auditor berkeyakinan bahwa *financial statement* yang telah disusun disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini tersebut akan dikeluarkan jika auditor berkeyakinan bahwa *financial statement* yang disusun tidak disajikan secara wajar. Auditor diharuskan untuk memberikan penjelasan rinci tentang semua alasan pendapat tidak menguntungkan dalam paragraf terpisah yang muncul sebelum paragraf yang memuat pendapat dalam laporannya. Jika relevan, dampak paling signifikan dari peristiwa yang menimbulkan opini negatif tersebut adalah terhadap hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas, dan posisi keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan, jika terdapat kesalahan material yang berdampak negatif terhadap keakuratan laporan keuangan, maka auditor wajib melaporkan pendapat yang tidak wajar atau tidak wajar. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memperoleh opini dari auditor harus siap menerima notasi khusus dari BEI sebagai kode peringatan untuk segera memperbaiki kinerja laporan keuangan di masa yang akan datang. Notasi ini akan menjadi peringatan bagi perusahaan untuk segera memperbaiki kinerja laporan keuangannya. Karena itu, kepercayaan investor perusahaan hampir pasti akan terganggu, yang akan berdampak negatif pada perusahaan.

Berikut pada Gambar 4.4 ialah contoh pendapat tidak wajar:



Sumber: Annual Report (www.idx.co.id)

Gambar 4.4: Pendapat Tidak Wajar (TW)

E. Pernyataan tidak memberikan pendapat

Opini ini dapat dikeluarkan apabila pemeriksa tidak mampu atau gagal untuk menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pernyataan ini juga dapat dikeluarkan jika klien menyajikan *financial statement* yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam hal auditor tidak melaksanakan audit yang cukup komprehensif untuk memungkinkan pembentukan opini atas laporan keuangan. Ketika auditor keuangan tidak dapat memberikan pendapat atas laporan tersebut, atau ketika auditor menolak untuk melakukannya. Hal tersebut terjadi jika pemeriksa mengetahui kondisi perusahaan untuk melanjutkan operasi atau jika perusahaan membatasi ruang lingkup audit sampai pada titik di mana auditor tidak dapat memberikan pendapat. Kemungkinan lain adalah bahwa perusahaan sendiri membatasi ruang lingkup audit. Auditor tidak memiliki bukti audit yang cukup untuk membentuk opini pada saat ini. Perbedaan antara laporan audit dan laporan standar dapat dikaitkan dengan tiga faktor berikut:

Kondisi 1: Keterbatasan ruang lingkup audit. Tanda bahwa ruang audit terbatas jika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang memadai untuk menentukan apakah *financial statement* yang direviu disajikan berdasarkan GAAP.

Kondisi 2: Penyajian Laporan keuangan tidak sesuai dengan GAAP.

Kondisi 3: Auditor bersikap tidak objektif.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memperoleh opini audit harus siap menerima notasi khusus dengan opini tidak wajar sebagai kode peringatan untuk memperbaiki laporan keuangan pada periode yang akan

datang. Ini akan melemahkan kepercayaan investor, merugikan perusahaan.

Berikut adalah contoh *disclaimer of opinion* pada Gambar 4.5 di bawah ini:

Registered Public Accountants
License No. 1249/KM.1/2017

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00054/2.1171/AU.1/02/0107-2/1/III/2022

Kepada Yth,
Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Namun, karena hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit.

Basis untuk opini tidak menyatakan pendapat

Perusahaan dan entitas anak telah berhenti memasok listrik kepada dikarenakan kontrak kerjasamanya telah berakhir dan secara signifikan mempengaruhi pendapatan Perusahaan dan entitas anak pada periode 2021. Saat ini manajemen Perusahaan dan entitas anak tidak berhasil untuk memperpanjang kembali kontrak tersebut agar Perusahaan dan entitas anak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya dan lebih lanjut telah menjual aset tetap pembangkit listrik dan peralatan pendukung. Dengan demikian, manajemen saat ini tidak mampu untuk memberikan representasi kepada kami atas fakta dan keadaan perihal kelanjutan usaha dalam bisnis normal Perusahaan dan entitas anak. Tidak praktis bagi kami untuk melaksanakan prosedur audit tambahan secara memadai untuk menilai kemampuan Perusahaan dan entitas anak melanjutkan usaha secara bersinambung dan untuk menentukan sejauh mana laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah terdampak oleh kondisi tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan dan entitas anak telah mengalami akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 678.737.249 (dalam Ribuan Rupiah) dan defisiensi ekuitas sebesar Rp 248.744.618 (dalam Ribuan Rupiah) serta kondisi-kondisi lain yang menimbulkan ketidakpastian signifikan atas kelanjutan usaha Perusahaan dan entitas anak. Rencana manajemen sehubungan dengan hal tersebut telah dijelaskan di Catatan 30. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup penyesuaian yang terkait dengan hal tersebut.

Opini tidak menyatakan pendapat

Karena timbulnya keraguan signifikan atas kelangsungan usaha Perusahaan dan entitas anak dan signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 terlampir.

Nomor lain Akuntan Publik No. AP/0107
Licensee of Public Accountant No. AP/0107
Jakarta, 11 Maret 2022 March 11, 2022

Sumber: Annual Report (www.idx.co.id)

Gambar 4.5: Penafian Pendapat

4.5 Materialitas

Jika kesalahan signifikan atau transaksi yang tidak dilaporkan dimasukkan dalam *financial statement*, hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian laporan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Biasanya, auditor membuat penentuan materialitas pertama mereka antara enam dan sembilan bulan sebelum tanggal neraca. Hasil perhitungan dari beberapa tahun sebelumnya atau lebih dari setahun yang lalu, disesuaikan dengan perubahan saat ini seperti tren industri dan kondisi ekonomi secara umum, juga dapat digunakan untuk menentukan materialitas. Pedoman resmi untuk menentukan materialitas baru-baru ini telah dimasukkan ke dalam standar akuntansi dan standar auditing. Faktor kuantitatif dan kualitatif, dengan penekanan pada faktor pertama, diperhitungkan untuk menentukan akar penyebab kesalahan. Klaim palsu yang terlalu kabur untuk diuji secara kuantitatif. Jika pelanggan mulai bertindak secara ilegal, hal ini dapat terjadi. Auditor harus menyadari kesalahan kualitatif, tetapi AU 312.13 mengatakan tidak layak untuk merancang prosedur untuk menemukannya.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan auditor untuk menerapkan materialitas. Sebelum pelaksanaan audit, auditor akan lebih dahulu menentukan informasi apa yang dianggap material. Inkonsistensi dalam volume informasi keuangan dalam laporan keuangan memaksa auditor untuk membuat perkiraan tentang apa yang penting selama audit. Tiga tingkatan yang membentuk tingkat materialitas adalah sebagai berikut:

1. Adalah wajar untuk mengeluarkan opini WTP dan enggan melaporkan jika jumlahnya tidak signifikan, karena tidak akan berdampak material terhadap keputusan pengguna laporan keuangan.

2. Beberapa *financial statement* mungkin material tetapi tidak dilaporkan secara keseluruhan bila salah saji *financial statement* akan berpengaruh pada keputusan pengguna meskipun laporan keuangan disajikan secara wajar.
3. Auditor diharuskan untuk menolak memberikan opini jika imbalan tersebut secara material berlebihan atau memberikan opini wajar dengan pengecualian jika imbalan tersebut untuk semua laporan keuangan. Saat memutuskan apakah itu berbeda dari bagian laporan itu atau tidak. Kategorisasi kas dan piutang yang salah berdampak minimal hanya pada dua akun. Di sisi lain, penjualan, piutang, dan akun terkait lainnya semuanya dapat dipengaruhi oleh kegagalan pencatatan material yang meluas.

4.6 Pernyataan Opini Kelangsungan Hidup

Suatu organisasi dianggap "berkelanjutan" jika laporan keuangannya disusun dengan asumsi bahwa ia akan terus beroperasi tanpa batas. Sebuah perusahaan dianggap "*going concern*" jika manajemennya yakin dapat mempertahankan tingkat operasinya saat ini di masa mendatang tanpa menimbulkan kerugian yang melumpuhkan. Pengajuan kebangkrutan perusahaan merupakan indikator yang jelas bahwa ia mengalami kesulitan keuangan dan mungkin tidak bertahan lebih lama.

Salah satu asumsi akuntansi yang paling dasar adalah bahwa entitas yang direviu dapat tetap beroperasi secara normal. Karena itu, ada sumber daya yang tidak akan habis dalam waktu dekat. Laporan keuangan memberikan data kuantitatif tentang aset, kewajiban, pendapatan, dan laba/rugi perusahaan. Ada lebih banyak konteks yang disediakan oleh laporan auditor untuk angka-angka yang disajikan. Peran

auditor adalah bertindak sebagai penghubung antara penerbit laporan keuangan dan audiens laporan.

Istilah "*going concern*" dapat dipahami dalam dua cara: baik sebagai konsep teoritis atau sebagai pendapat yang diungkapkan oleh auditor. Ungkapan "*going concern*" digunakan untuk menggambarkan bisnis yang diharapkan terus beroperasi di masa mendatang. Jika istilah "*going concern*" dimasukkan dalam opini auditor, berarti kelangsungan perusahaan tersebut dipertanyakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapat auditor untuk memberikan *opini audit going concern*, yaitu:

- Tren negatif yaitu kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, dan rasio keuangan yang buruk.
- Masalah internal, seperti mogok kerja, fasilitas dan produk yang tidak sesuai dengan tren, dan ketergantungan pada keberhasilan proyek.
- Masalah eksternal, seperti peraturan baru yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan, litigasi yang tertunda, dan terjadinya kerugian yang tidak diasuransikan.
- Default, ketidakmampuan untuk membayar dividen, reorganisasi utang, pelanggaran hukum dan peraturan, dan tidak mampu untuk membeli persediaan secara kredit dari vendor adalah masalah tambahan. Daya saing produk klien di pasar dan keadaan pasar

Tentang surat berharga yang diterima entitas dalam menjamin kelangsungan usaha terhadap opini auditor, SPAP - PSA Nomor 30 menjadi pedoman bagi pemeriksa/auditor, khususnya:

- Ketika auditor memiliki keraguan yang wajar tentang kelangsungan hidup unit entitas dalam jangka panjang, ia dapat mengambil tindakan berikut:

- a. Memperoleh informasi-informasi terkait perencanaan manajemen untuk membatasi dampak dari kejadian tersebut.
- b. Menetapkan perencanaan yang dapat dijalankan agar lebih efektif.
- Pemeriksa dapat memutuskan untuk mengeluarkan opini jika dia menentukan bahwa perusahaan tidak memiliki prosedur yang memadai untuk menangani peristiwa tak terduga yang mengancam kelangsungan hidup unit bisnis.
- Jika manajemen memiliki rencana seperti itu, auditor kemudian harus menyimpulkan bahwa:
 - a. Auditor tidak akan mengeluarkan pendapat yang sah jika ia menemukan bahwa rencana tersebut tidak akan berhasil (*disclaimer*).
 - b. Pemeriksa kemudian menerbitkan opini WTP dengan penekanan pada paragraf yang relevan jika klien mengungkapkan efektivitas rencana tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.
 - c. Pemeriksa juga menerbitkan pernyataan negatif jika mereka menentukan bahwa rencana klien kemungkinan akan berhasil tetapi tidak diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

4.7 Tahapan Pengambilan Keputusan oleh Auditor untuk Menerbitkan Laporan Audit

- 1) Memverifikasi bahwa tidak ada kelalaian dalam laporan keuangan untuk meraih opini kewajaran dari Auditor. Setelah menemukan kondisi yang ada, mereka melakukan audit dan mencatat rincian tentang keadaan sebagai bahan audit yang dapat dilaporkan. Jika prasyarat ini tidak berlaku, maka laporan audit yang wajar dari "tidak" akan dihasilkan.

- 2) Mengevaluasi signifikansi setiap ketentuan. Auditor dapat mempengaruhi laporan keuangan meskipun tidak ada standar keberadaan karena kondisi yang mengarah pada penyimpangan dari pendapat yang wajar.
- 3) Tentukan tingkat materialitas untuk kondisi tertentu, lalu pilih jenis laporan audit yang paling sesuai dengan kondisi tersebut. Pertimbangkan jenis bentuk dalam membuat keputusan dan gunakan alat yang sesuai.
- 4) Membuat laporan inspeksi. Beberapa KAP memiliki template pengolah kata yang telah dimuat sebelumnya dengan ungkapan yang sesuai untuk berbagai situasi, dan KAP lainnya memiliki mitra dengan keterampilan yang diperlukan untuk menulis atau meninjau setiap laporan audit yang pernah diterbitkan.

Situasi di bawah ini memerlukan perbaikan pelaporan yang lebih komprehensif:

- Auditor bersikap tidak independen dan tidak menyadari bahwa entitas tidak mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Ruang lingkup audit di ruangan tertentu terbatas.
- Ketidakpastian yang cukup signifikan menghasilkan dampak terbatasnya entitas untuk bertahan hidup, dan penyebab yang dikutip dalam catatan kaki hanya bersifat sebagian.
- Keempat, ketidaksesuaian antara GAAP dengan prinsip akuntansi lainnya yang ada pada tahun sebelumnya.

4.8 Kesimpulan

Seiring dengan perubahan bisnis, demikian juga struktur dan isi laporan audit independen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa baik audit eksternal maupun internal tetap berjalan tanpa hambatan. Auditor akan memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratannya. Pada akhir pemeriksaan, KAP Partner akan menerbitkan laporan audit, yang akan mencakup lembar opini dan laporan keuangan yang telah diaudit. Sejauh laporan audit disiapkan oleh kantor akuntan publik, itu harus mematuhi standar yang sama. Untuk memastikan bahwa setiap opini kantor akuntan publik yang dikeluarkan mengikuti aturan. Terdapat hubungan yang erat antara materialitas dan penentuan opini berdasarkan persyaratan dan bukti audit. Untuk melengkapi pernyataan audit, auditor juga harus mengeluarkan opini atas kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Sukrisno. 2017. Auditing: Petunjuk Praktisi Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik . Buku 1. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat .
- Arens A. Alvin, Randal j. Penatua dan Mark S. Beasley. 2015. Pendekatan Terintegrasi Layanan Audit dan Penjaminan. Volume 1. Edisi Kelimabelas. Erlangga.
- Boynton, WC, RN Jonson, dan W.G Kell. 2005. Audit Modern. Edisi Kedelapan. Volume Satu. Jakarta: Erlangga.
- Obligasi Akuntan Indonesia- Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat .
- Mulyadi, (2010). audit. Jakarta: Salemba Empat .
- Sumber lainnya:
- Accounting.binus.ac.id. (2020, 12 Agustus). "Apakah Going Concern Termasuk Opini". Diakses pada 20 September 2022 di <https://accounting.binus.ac.id/2020/08/19/apakah-going-concern-termasuk-opini-audit/#:~:text=Going%20concern%20dalam%20kelanjutan%20live,dari%20terjadinya%20kebangkrutan%20adalah%20indikasi>.
- Bursa Efek. Diakses pada 20 September 2022 di www.idx.co.id.
- Harmoni.co.id. (2022, 14 Februari). "Mengenali opini audit laporan keuangan dan jenisnya". Diakses pada 20 September 2022 dari <https://www.harmony.co.id/blog/menenali-opini-audit-laporan-keuangan-dan-type-type>
- Hukumline.com., (2020, 13 Desember) . "Laporan Audit Independen". Diakses pada 20 September 2022, dari <https://Hukumline.com/laporan-audit-independen/>

BAB 5

ETIKA PROFESI

Oleh Selvia Eka Aristantia

5.1 Definisi

Masih ingatkah anda tentang kasus Enron yang legendaris ? Skandal besar yang menyebabkan kebangkrutan Enron dan menyeret Arthur Andersen yang saat itu menjadi salah satu dari "*the big five*" yakni lima kantor akuntan publik terbesar (Delloite, Ernst and Young (EY), Price Waterhouse Coopers (PWC), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) dan Arthur Andersen). Arthur Andersen harus dibubarkan karena adanya pelanggaran etika profesi yang harusnya dipegang oleh Akuntan Publik. Kasus Enron adalah cermin betapa pentingnya Etika profesi khususnya oleh auditor untuk diinternalisasi dalam setiap penugasan audit.

Etika diambil dari bahasa Yunani kuno "*ethos*" atau "*ethikos*" yang bermakna kebiasaan, adat istiadat atau akhlak yang baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu yang mempelajari hal yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Etika dalam suatu profesi sangat diperlukan sebagai pedoman atau acuan dalam mengatur perilaku suatu kelompok, tidak terkecuali profesi akuntan yang sangat menjunjung reputasi. Etika profesi akuntan diatur dan terangkum dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang memuat pedoman perilaku akuntan dalam memenuh tanggung jawab profesionalitasnya.

5.2 Prinsip dasar Etika

Prinsip dasar etika merupakan standar perilaku yang menjadi acuan pada profesi akuntan/ auditor. Akuntan/auditor wajib mematuhi prinsip 5 (lima) prinsip dasar etika profesi berikut :

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
4. Kerahasiaan
5. Perilaku profesional

Apabila dalam penugasan auditor dihadapkan dalam situasi dimana mengharuskan auditor memilih mematuhi salah satu prinsip dan bertentangan dengan prinsip lain, maka auditor dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menyelesaikan masalah tersebut atau dapat melakukan diskusi dengan tim audit, manajemen, asosiasi profesi, regulator maupun penasihat hukum. Auditor diharuskan mendokumentasikan setiap rincian masalah, pembahasan serta keputusan yang dibuat serta alasan kenapa keputusan itu dibuat dalam setiap penugasan.

5.2.1 Integritas

Auditor harus mengedepankan kejujuran dan kelugasan dalam setiap penugasan. Dalam penugasan, seringkali auditor dihadapkan dalam tekanan yang mendorong auditor untuk melanggar kode etik profesinya yang bisa berakibat timbulnya konsekuensi berupa kerugian material baik pribadi maupun organisasi. Oleh karena itu, sikap integritas ini penting untuk diinternalisasi demi menjaga akuntan sehingga ia dapat bertindak dengan tepat dan berlaku jujur.

Bertindak dengan tepat disini berarti auditor dapat mempertahankan pendirian ketika dihadapkan dalam situasi yang mendorong auditor untuk bertindak melanggar kode etik. Auditor tidak dapat dikaitkan dengan sengaja dengan laporan, komunikasi atau informasi lain yang mengandung salah saji material, berisi pernyataan yang dibuat secara tidak hati-hati serta bersifat menyesatkan yakni terdapat penghilangan informasi yang tidak diungkapkan, padahal seharusnya diungkapkan.

5.2.2 Objektivitas

Dalam melaksanakan penugasan, auditor harus mengungkapkan kondisi di lapangan sesuai dengan fakta yang diaudit. Akan tetapi, seringkali auditor mendapat tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan mengupayakan apapun demi tercapainya tujuan. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas audit, penting bagi seorang auditor untuk memiliki sikap objektif. Auditor diharuskan bertindak adil, bebas dari bias, benturan kepentingan atau bebas dari pengaruh oleh berbagai pihak. Auditor tidak diperbolehkan menerima penugasan apabila penugasan tersebut terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalitasnya. Untuk menjaga kualitas audit atau objektivitas auditor, biasanya KAP akan melakukan rotasi penugasan atau melakukan supervisi dan reuview atas pekerjaan audit.

5.2.3 Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Auditor diwajibkan mencapai standar keahlian yang disyaratkan. Kompetensi profesional menuntut auditor untuk melakukan pertimbangan yang baik dalam menerapkan setiap pengetahuan dan keahliannya dalam setiap penugasan. Tidak hanya mencapai level kompetensi, auditor juga diwajibkan

mempertahankan kompetensinya. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mempertahankan keahlian profesi dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPL).

Selain kompetensi, auditor juga diharuskan memiliki sikap kehati-hatian yakni bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap penugasan dengan tanggung jawab, kecermatan dan tepat waktu. Hal tersebut diupayakan untuk memastikan klien memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

5.2.4 Kerahasiaan

Auditor diharuskan menjaga kerahasiaan informasi klien dalam setiap penugasan. Tidak diperbolehkan mengungkapkan kerahasiaan tanpa adanya persetujuan dari klien, bahkan hingga hubungan profesional berakhir auditor wajib menjaga kerahasiaan tersebut kecuali ada kasus dimana ketentuan hukum mengharuskan auditor mengungkapkan informasinya. Auditor juga dilarang keras untuk menggunakan informasi rahasia klien untuk kepentingan pribadi ataupun pada pihak ketiga.

5.2.5 Perilaku profesional

Auditor harus bersikap jujur dan adil dalam melakukan penugasan. Auditor dapat dikatakan profesional apabila ia dapat patuh terhadap peraturan perundangan dan standar profesi yang berlaku, bertanggung jawab dan konsisten dalam setiap penugasan serta menghindari perilaku yang mencoreng etika profesi atau perilaku yang dapat merusak reputasi auditor. Akuntan tidak diperbolehkan terlibat apapun yang dapat merusak integritas, objektivitas serta reputasi baik auditor.

Dalam melakukan kegiatan promosi atau pemasaran atas jasa yang diberikan, auditor dilarang membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa yang dapat diberikan pada klien, kualifikasi yang dimiliki oleh auditor ataupun pengalaman dan pencapaian yang telah diperoleh. Auditor juga dilarang melakukan perbandingan atas hasil penugasan audit pihak lain tanpa didukung bukti. Auditor diperbolehkan melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi apabila merasa sangsi terhadap iklan atau pemasaran yang telah dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2021. Kode Etik Akuntan Indonesia.
Standar Akuntansi Keuangan.

BAB 6

KEWAJIBAN HUKUM

Oleh Nurchayati

6.1 Lingkungan Hukum yang Berubah

Profesi akuntan melakukan berbagai upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, jumlah tuntutan dan besar ganti rugi bagi para penuntut tetap tinggi, termasuk tuntutan yang melibatkan pihak ketiga menurut *common law* maupun Undang-undang sekuritas federal. Faktor-faktor penyebab utama adalah

- a. Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik
- b. Kesadaran yang meningkat dipihak *securities & Exchange Comission (SEC)* mengenai tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor
- c. Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis dan kerumitan operasi bisnis serta transaksi keuangan
- d. Kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah
- e. Resisi global dan masa ekonomi yang sulit mengakibatkan kegagalan bisnis, yang memicu *stakeholder* atau pemangku kepentingan menuntut restitusi dari pihak lain termasuk auditor eksternal.
- f. Keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah

mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee kontinjen.

- g. Banyak akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan
- h. Kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing.

6.2 Membedakan antara Kegagalan Bisnis Kegagalan Audit, dan Risiko Audit

Penyebab utama tuntutan hukum kepada akuntan publik adalah kurangnya pemahaman para pemakai laporan keuangan atas konsep:

1. Perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit
2. Perbedaan antara kegagalan audit dan risiko bisnis.

Kegagalan bisnis (*business failure*) terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk atau persaingan yang tidak terduga dalam industri.

Kegagalan audit (*audit failure*) terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit.

Risiko audit (*audit risk*) merupakan kemungkinan bahwa auditor menyimpulkan, setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan kenyataannya mengandung salah saji yang material.

Contoh: Kantor yang menugaskan asisten yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas audit gagal menemukan salah saji material dalam catatan klien yang seharusnya dapat ditemukan oleh auditor yang memenuhi

syarat. Risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor menyimpulkan, setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji material. Risiko audit tidak dapat dihindarkan karena auditor mengumpulkan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang disembunyikan dengan baik sangat sulit dideteksi. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan.

Para profesional akuntansi cenderung setuju bahwa sebagian besar kasus, ketika audit tidak dapat menemukan salah saji yang material dan pendapat audit yang salah sudah diterbitkan, maka layak untuk dipertanyakan apakah auditor menggunakan kemahirannya dalam melaksanakan audit.

Dalam kasus kegagalan audit, UU yang berlaku sering memperbolehkan pihak yang dirugikan menuntut akuntan publik untuk membayar sebagian atau seluruh kerugian yang disebabkan oleh kegagalan audit. Dalam praktiknya, karena kerumitan auditing, sulit ditentukan apakah auditor gagal dalam menggunakan kemahirannya, juga sulit untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh keuntungan dari audit. Meskipun demikian, kegagalan auditor dalam menggunakan kemahirannya seringkali menimbulkan kewajiban hukum, bahkan kerugian yang besar bagi akuntan publik.

Sebagai contoh, ketika perusahaan bangkrut dan tidak dapat membayar utang-utangnya, umumnya para pemakai laporan keuangan akan menyatakan bahwa telah terjadi kegagalan audit, terutama bila laporan auditor terbaru mengindikasikan bahwa laporan keuangan sudah dinyatakan secara wajar. Lebih buruk lagi, jika yang terjadi adalah kegagalan bisnis dan ternyata laporan keuangan tersebut mengandung salah saji, para pemakai laporan keuangan

akan menganggap bahwa auditor ceroboh meskipun audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum. Konflik antara pemakai laporan keuangan dan auditor ini sering muncul karena ada "kesenjangan harapan" di antara keduanya. Kebanyakan auditor yakin bahwa pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar auditing adalah satu-satunya yang dapat diharapkan auditor, akan tetapi banyak pemakai yakin bahwa auditor dapat menjamin keakuratan laporan keuangan, dan beberapa pemakai bahkan yakin bahwa auditor menjamin viabilitas bisnis tersebut. Untungnya bagi profesi ini, pengadilan terus mendukung pandangan auditor.

Kesenjangan harapan seringkali mengakibatkan tuntutan hukum yang tidak terjamin. Di masa depan, mungkin profesi ini akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mendidik para pemakai laporan keuangan tentang peran auditor dan perbedaan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, serta risiko audit. Akan tetapi, untuk saat ini auditor harus menerima bahwa tuntutan atas kegagalan audit sebagian mungkin juga disebabkan oleh harapan mereka yang mengalami kerugian usaha untuk memperoleh ganti rugi dari sumber mana pun, tanpa memperhatikan siapa yang salah.

6.3 Kewajiban Hukum Para Auditor

Seorang akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntansi publiknya, termasuk auditing, perpajakan, jasa bantuan manajemen, dan jasa akuntansi serta pembukuan. Jika seorang akuntan publik gagal menyiapkan dan mengisi SPT pajak klien dengan benar, akuntan publik itu dapat dituntut untuk membayar semua denda dan bunga yang harus dibayar oleh klien ditambah fee penyiapan SPT pajak. Pada beberapa negara bagian, pengadilan juga dapat menetapkan jumlah kerugian yang layak dibebankan.

Sebagian besar tuntutan hukum terhadap Kantor akuntan publik berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah maupun yang belum diaudit. Pembahasan ini, dibatasi terutama pada dua aspek dari akuntansi publik tersebut. Pertama, kita telaah beberapa konsep hukum yang berkenaan dengan tuntutan hukum terhadap akuntan publik. Ada kesepakatan antara profesi akuntan dan pengadilan bahwa auditor bukan penjamin atau penerbit laporan keuangan. Auditor hanya diharapkan untuk melaksanakan audit dengan kemahiran, dan tidak diharapkan untuk benar 100 persen. Standar kemahiran (*due care*) ini sering disebut sebagai konsep orang yang bijak (*prudent person concept*). Hal ini dikemukakan dalam Cooley on Torts sebagai berikut:

Setiap orang yang menawarkan jasa kepada orang lain dan yang dipekerjakan memiliki kewajiban untuk menggunakan keahlian yang dimilikinya dalam melakukan pekerjaan secara hati-hati dan tekun. Dalam semua pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus itu, apabila seseorang menawarkan jasanya, dia sudah memahami bahwa ia mengumumkan kepada publik bahwa ia memiliki keahlian yang umumnya dimiliki orang lain yang menangani pekerjaan tersebut, dan bila ia berpura-pura memiliki keahlian dan orang lain tahu, ia sudah melakukan penipuan terhadap setiap orang yang mempekerjakan ia menyangkut profesi publiknya. Tetapi tidak seorang pun, baik yang terlatih maupun tidak, menjalankan tugas yang diperkirakan dapat berhasil tanpa kesalahan sedikitpun. Ia bekerja dengan keyakinan dan integritas yang baik, tetapi bukannya tanpa kesalahan, dan ia bertanggung jawab kepada pemberi kerja atas kecerobohan, niat buruk, atau ketidakjujuran, tetapi bukan untuk konsekuensi kerugian yang semata-mata akibat kekeliruan penilaian.

Biasanya, para partner, atau para pemegang saham korporasi profesional, memiliki tanggung jawab bersama untuk mengambil tindakan perdata (*civil action*) terhadap setiap pemilik. Akan tetapi, situasinya berbeda jika korporasi tersebut sebagai persekutuan dengan kewajiban terbatas (*limited liability perseroan* dengan kewajiban terbatas (*limited liability company* = LLC), korporasi umum, atau korporasi profesional dengan tanggung jawab terbatas. Menurut struktur perusahaan di atas, kewajiban yang timbul dari tindakan salah satu pemilik tidak mempengaruhi aktiva pribadi pemilik lain, kecuali pemilik lain terlibat langsung dalam tindakan yang dilakukan pemilik yang menyebabkan kewajiban ini mungkin timbul kerugian atas aktiva perusahaan yang menjadi jaminan.

Syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan.

1. Kelalaian biasa, tidak ada perhatian yang layak yang dapat diharapkan dari seseorang dalam suatu situasi.
2. Kelalaian besar, tidak ada perhatian sama sekali, setara dengan perilaku ceroboh, yang dapat diperkirakan dari seseorang.
3. Penipuan konstruktif, adanya kelalaian ekstrem sekalipun tidak ada maksud untuk menipu atau merugikan.
4. Penipuan, terjadi apabila suatu salah saji telah dilakukan dan auditor sama-sama mengetahui adanya kesalahan tersebut dan juga adanya maksud untuk menipu.

Sumber kewajiban hukum auditor:

- a) Kewajiban kepada klien
- b) Kewajiban kepada pihak ketiga menurut *common law*
- c) Kewajiban sipil menurut UU sekuritas federal
- d) Kewajiban kriminal.

a) Tanggung Jawab kepada Klien

Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap akuntan publik adalah dari klien. Kewajiban yang umum akibat

tuntutan hukum klien melibatkan klaim bahwa auditor tidak dapat menemukan pencurian oleh karyawan akibat kelalaian dalam melaksanakan audit. Masalah utama dalam kasus yang melibatkan dugaan kelalaian biasanya adalah tingkat kemahiran yang diperlukan.

Kantor akuntan publik biasanya menggunakan empat kombinasi pembelaan bila ada tuntutan hukum oleh klien yaitu:

1. Tidak ada tugas yang harus dilaksanakan, bahwa kantor akuntan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak yang tersirat atau yang dinyatakan secara jelas.
2. Pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, auditor dapat mengklaim bahwa auditor telah melaksanakan prosedur atau standar auditing dengan benar.
3. Kelalaian kontribusi, auditor mengklaim bahwa klien campur tangan dalam kegiatan pelaksanaan audit yang mengakibatkan kerugian, sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut.
4. Ketiadaan hubungan sebab-akibat, agar klien dapat menuntut akuntan publik, klien harus memiliki dan menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara kelalaian auditor dalam menaati standar auditing dengan kerugian yang diderita klien

b) Kewajiban Terhadap Pihak Ketiga menurut *Common Law*

Pihak ketiga meliputi pemegang saham aktual dan calon pemegang saham, pemasok, bankir, dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan. Kasus audit utama yang mengawali kewajiban terhadap pihak ketiga adalah *Ultramares Corporation vs. Touche* (1931). Kasus ini membentuk suatu doktrin yang dikenal sebagai doktrin *Ultramares*. Pengadilan telah memperluas doktrin *Ultramares* untuk mengizinkan

pemulihan oleh pihak ketiga dalam banyak situasi dengan memperkenalkan konsep *foreseen users*, yang merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan keuangan. Meskipun konsep *foreseen user* dapat langsung diterapkan, pengadilan telah membuat beberapa interpretasi yang berbeda. Tiga pendekatan utama yang diberlakukan sebagai berikut:

1. Credit Alliance
2. Restatement of Torts
3. Foreseeable Users

Pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga tiga dari empat pembelaan yang tersedia bagi auditor dalam menghadapi tuntutan oleh klien juga tersedia untuk tuntutan hukum oleh pihak ketiga, yaitu: tidak ada kewajiban untuk melaksanakan jasa, pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, dan ketiadaan hubungan sebab-akibat. Kelalaian kontribusi biasanya tidak berlaku karena pihak ketiga bukan penyebab terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

c) Kewajiban Sipil menurut Undang-Undang Sekuritas Federal

Securities Act tahun 1933 hanya berkaitan dengan persyaratan pelaporan bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas baru, termasuk informasi dalam laporan registrasi atau pendaftaran dan propektus. Kewajiban auditor menurut *Securities Exchange Act* tahun 1934 sering kali berpusat pada laporan keuangan yang telah diaudit yang diterbitkan kepada publik dalam laporan tahunan, yang diserahkan kepada SEC sebagai bagian dari laporan tahunan Form 10-K.

Peraturan 10b-5 dari *Securities Exchange Act* tahun 1934 sering disebut sebagai ketentuan anti kecurangan dari undang-undang tahun 1934, karena menghalangi setiap aktivitas penipuan yang melibatkan pembelian atau penjualan setiap sekuritas. Berbagai keputusan pengadilan federal menjelaskan

bahwa Peraturan 10b-5 berlaku tidak hanya bagi penjual langsung, tetapi juga akuntan, penjamin emisi, dan pihak lainnya. Pembelaan Auditor Tiga pembelaan serupa yang tersedia bagi auditor dalam kasus tuntutan menurut common law oleh pihak ketiga juga berlaku bagi tuntutan menurut UU tahun 1934: pelaksanaan kerja tanpa kelalaian, tidak ada kewajiban, dan ketiadaan hubungan timbale balik atau sebab-akibat.

Sanksi *SEC Rules of Practise* SEC memungkinkan SEC untuk menolak, baik untuk sementara maupun seterusnya, praktik Kantor akuntan publik dalam kaitannya dengan laporan keuangan perusahaan publik, baik karena kurangnya kualifikasi yang tepat atau terlibat dalam perilaku profesional yang tidak etis atau tidak pantas.

Tindakan penting lain oleh kongres yang mempengaruhi Kantor akuntan publik maupun kliennya adalah disahkannya *Foreign Corrupt Practises Act* tahun 1977. UU ini melarang pemberian uang suap kepada pejabat di luar negeri untuk mendapatkan pengaruh dan memperoleh atau mempertahankan hubungan bisnis.

d) Kewajiban Kriminal

Akuntan publik dapat disalahkan karena tindakan kriminal menurut hukum federal atau hukum di setiap negara bagian masing-masing. *Securities Act* tahun 1933 dan 1934 serta *Federal Mail Fraud Statue* dan *Federal False Statement Statue*, semua peraturan ini menetapkan bahwa menipu orang lain, yaitu dengan sadar terlibat dalam laporan keuangan yang palsu merupakan tindakan kriminal. *Sarbanes-Oxley Act* 2002 juga menetapkan bahwa merupakan kejahatan bila merusak atau membuat dokumen untuk menghambat atau menghalangi penyelidikan federal.

6.4 Respon Profesi terhadap Kewajiban Hukum AICPA

Respons profesi terhadap kewajiban hukum AICPA dan profesi secara keseluruhan dapat melukukan sejumlah hal untuk mengurangi risiko para praktisi terkena tuntutan hukum:

- a. Mencari perlindungan dari proses pengadilan atau litigasi yang tidak terpuji
- b. Meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik
- c. Mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing.

Beberapa aktivitas khusus dalam kewajiban hukum:

- a) Riset dalam auditing
- b) Penetapan standard dan peraturan
- c) Persyaratan untuk melindungi auditor
- d) Menetapkan persyaratan peer review
- e) Melawan tuntutan hukum
- f) Pendidikan bagi pemakai laporan keuangan
- g) Memberi sanksi kepada anggota karena perilaku dan kinerja yang tidak pantas
- h) Melobi perubahan UU.

6.5 Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum

Seorang auditor yang berpraktik juga dapat pula mengambil tindakan tertentu untuk meminimalkan kewajibannya. Beberapa dari yang umum itu adalah sebagai berikut:

- a) Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas
- b) Mempekerjakan personil yang kompeten dan melatih serta mengawasi mereka secara layak

- c) Mengikuti standar profesi, mempertahankan independensi, memahami bisnis klien
- d) Melaksanakan audit yang bermutu, mendokumentasikan pekerjaan yang layak
- e) Mendapatkan surat penugasan dan surat representasi
- f) Mempertahankan hubungan yang bersifat rahasia, mengadakan asuransi yang memadai, mencari bantuan hukum
- g) Memilih bentuk organisasi dengan kewajiban terbatas dan mengungkapkan skeptisme profesional

DAFTAR PUSTAKA

Alvin A. Arens; Randal J. Elder; Mark S. Beasley; Chris E. Hogan.
2010. Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan
terintegrasi jilid 1, penerbit Erlangga, Jakarta.

BAB 7

TANGGUNG JAWAB

Oleh I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi

7.1 Tanggung Jawab Auditor Independen

Auditor mempunyai peran yang sangat strategis, karena pendapat yang dinyatakan oleh auditor akan berguna bagi pihak pengguna laporan keuangan hasil audit untuk membuat keputusan ekonomi. Auditor berfungsi untuk melindungi pihak yang berkepentingan, dengan menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan banyak pihak, seperti investor, kreditor, agen pemerintah, karyawan dan masyarakat umum secara luas. Auditor juga berfungsi untuk mendukung pihak manajemen dalam pertanggung jawaban kepada pemilik dan juga memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakaiannya.

Tanpa adanya jasa dari akuntan publik, manajemen perusahaan tidak dapat meyakinkan pihak luar perusahaan bahwa laporan keuangan yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya, karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen perusahaan mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lain. Laporan keuangan hendaknya jangan disisipi dengan keinginan manajemen tertentu, seperti adanya tindakan rekayasa atau manipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan. Alasan ini yang menyebabkan perlunya pemeriksaan auditor sebagai akuntan publik atas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu auditor harus mematuhi prinsip akuntansi diterima umum, standar auditing dan kode etik (SPAP, 2001:44). Peran dan tanggung jawab

auditor saat ini dirasakan semakin meluas, sesuai dengan perkembangan kemajuan dan didukung juga oleh perhatian pemerintah.

Dengan besarnya tanggung jawab auditor yang harus diembannya, maka auditor haruslah memiliki kesiapan profesi mutlak yang diperlukan, baik karakter seorang auditor, pengetahuan maupun keahlian dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya kepada masyarakat para pengguna jasa auditor. Sehingga apabila tanggung jawab auditor terlaksanakan dan harapan dari masyarakat sebagai pengguna laporan terpenuhi, besar kemungkinan kehadiran auditor semakin diterima, dan akan semakin baik kedudukannya di tengah masyarakat. Profesi akuntan publik melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan IAI. IAI sendiri telah mengeluarkan prinsip-prinsip dasar etika Akuntan Profesional, Salah satu prinsip dasar etika Akuntan Profesional adalah Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku oleh akuntan adalah suatu kewajiban yang menjadi dasar tanggung jawab auditor profesional dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu perusahaan.

Tanggung jawab auditor sebagai akuntan publik adalah melakukan pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan (Jusup, 2010). Secara umum, auditor bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses audit terhadap laporan keuangan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh manajemen bebas dari salah saji material dengan mengacu pada bukti-bukti yang benar-benar memadai. Auditor juga memiliki tanggung jawab untuk mendeteksi berbagai jenis salah saji material, termasuk kesalahan-kesalahan,

penyimpangan dan juga tindakan dilakukan yang melawan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Lebih rinci mengenai peran dan tanggung jawab auditor dapat ditemukan pada makalah ketua umum IAI, Soedarjono, (EZH, 1999)

1. Tanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Tanggung jawab ini hanya sebatas opini yang diberikan, sedangkan laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini disebabkan karena terbatasnya informasi yang diterima dari pihak manajemen melalui proses audit.
2. Tanggung jawab terhadap profesi. Yakni dengan mematuhi seluruh standar dan juga ketentuan yang telah dikeluarkan oleh IAI, termasuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku, standar auditing dan kode etik akuntan Indonesia.
3. Tanggung jawab terhadap klien. Auditor akan dianggap lalai apabila tidak melaksanakan kewajiban pekerjaan dengan seksama dan tidak menggunakan kemahiran profesionalnya dalam menjalankan kewajibannya.
4. Tanggung jawab untuk mengungkapkan kecurangan. Umumnya suatu kecurangan yang besar wajib hendaknya diketahui oleh akuntan publik dan akuntan publik hendaknya harus bertanggung jawab mengungkapkan kecurangan yang terjadi tersebut.
5. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Auditor bertanggung jawab terhadap investor maupun kepada kreditor, sebagai pihak ketiga perusahaan. Auditor bertanggung jawab terhadap kelalaian dalam auditnya, jika hasil auditnya digunakan oleh pihak ketiga untuk mengambil keputusan bisnis yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi mereka.
6. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kecurangan yang tidak ditemukan. Di sini auditor juga bertanggung jawab atas kecurangan yang mungkin tidak terdeteksi melalui prosedur auditnya. Oleh karena itu auditor harus menyusun prosedur audit yang tepat, agar semua kemungkinan kecurangan material yang terjadi dapat terdeteksi.

(Sarwako, 1996) juga menggambarkan peran dan tanggung jawab yang dipikul oleh auditor, yaitu:

1. Mengemban kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab moral individu dan mematuhi standar profesi, menghindari konflik kepentingan dan mempertahankan sikap independensi serta senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
2. Menjembatani kepentingan pihak investor dan kreditor dengan pihak manajemen. Auditor sebagai akuntan publik disini harus jujur, bijaksana, dan profesional, agar informasi yang diterima oleh pihak pengguna bermanfaat bagi mereka.
3. Mempunyai tanggung jawab moral untuk memberi informasi secara lengkap dan jujur kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi tersebut. Seorang auditor harus menjaga kerahasiaan suatu informasi dan memberikan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang atas informasi tersebut.
4. Mematuhi semua hukum yang berlaku. Disamping mematuhi aturan profesinya standar auditing dan etika profesi, auditor juga harus mematuhi semua hukum yang berlaku, baik yang mempengaruhi jalannya perusahaan maupun yang mengatur profesi sendiri.
5. Mengungkapkan fakta secara menyeluruh yang ditemukan dari tingkah laku manajemen. Auditor harus akuntabel dalam pekerjaannya, sehingga fakta yang ditemukan selama proses auditnya, termasuk perilaku manajemen selama proses pengumpulan bukti audit, dapat menjadi acuan untuk menyimpulkan hasil audit.
6. Harus mempunyai kecanggihan profesi dibidang non auditing, seperti konsultan bisnis dan pajak. Dengan perkembangan kemajuan perusahaan, tuntutan atas profesi akuntan publik makin luas, sehingga Kantor Akuntan Publik harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan tersebut, agar Kantor Akuntan tetap dapat survive.

Akuntan publik (Auditor Independen) merupakan profesi yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan profesi auditor diatur melalui peraturan / ketentuan dari regulator (pemerintah) serta standar dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang. Profesi auditor lahir dan besar berasal dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen. Komunikasi ini menghubungkan antara entitas ekonomi dengan para *stakeholder* terutama berk(Jusup, 2010)aitan dengan akuntabilitas entitas yang bersangkutan.

Diskusi mengenai pentingnya keberadaan auditor terhadap penilaian kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan ditegaskan dalam penelitian (Chou, J., Zaiats, N., dan Zhang, 2014). Penelitian tersebut menjelaskan adanya krisis ekonomi global tahun 2008 telah memberikan implikasi terhadap pengambilan keputusan oleh investor asing. Keberadaan auditor khususnya *bigfour* yang jasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar menjadi pertimbangan investor untuk investasi dalam perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Intinya auditor *bigfour* menjadi magnet untuk menarik investor asing. Keberadaan auditor juga menjadi penting berkaitan dengan justifikasi tata kelola perusahaan (*goodcorporategovernance*). Di China auditor berkualitas tinggi menjadi harapan bagi perusahaan perusahaan yang menginginkan sinyal monitoring audit yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik (Lin, Z. J., & Liu, 2019). Latar belakang penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas telah menegaskan adanya kebutuhan pihak yang independen untuk memberikan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan sebagai informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.

Produk yang dihasilkan oleh auditor adalah opini atau pendapat terhadap suatu laporan keuangan atau informasi keuangan. Opini yang dikeluarkan auditor merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (*reasonable assurance*) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut (mutlak) atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Auditor bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan, tanggung jawab dalam mempertahankan sikap independensi, tanggung jawab dalam mengkomunikasikan hasil audit, tanggungjawab mengevaluasi kelangsungan usaha klien, dan tanggung jawab terhadap pendeteksian dan pelaporan tindakan melawan hukum oleh klien. Tanggung jawab auditor salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh tingkat keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan itu telah terbebas dari kesalahan penyajian yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun oleh kecurangan (Arrens, A. A and Loebbecke, 2003).

Pernyataan Standar Audit nomor 02 (SA no.2) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada pihak pemakai merupakan tanggung jawab penuh pihak manajemen. Tanggung jawab auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen hanya terbatas pada memberikan pernyataan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi auditing memandang auditor tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi atau menemukan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh pihak manajemen berdasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Peran dan tanggungjawab auditor saat ini dirasakan semakin luas, sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi. Pengguna hasil pekerjaan akuntan publik tidak hanya klien yang memberikan penugasan tetapi juga publik

(investor, pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat dan lain-lain). Publik sebagai pengguna laporan keuangan berharap auditor harus menerima tanggung jawab utama untuk laporan keuangan, auditor mengesahkan laporan keuangan, menjamin akurasi laporan keuangan, auditor melakukan semua tugasnya dengan sempurna dan auditor harus memberikan peringatan dini tentang kemungkinan kegagalan bisnis dan auditor seharusnya mendeteksi penipuan.

Kondisi ini dapat dikatakan bertentangan dengan peran auditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa profesi akuntan publik memiliki peran yang penting untuk membantu investor dan para *stakeholder* untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Potensi pertanggungjawaban auditor yang memiliki berbagai dimensi selayaknya secara pribadi menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dipahami oleh setiap Akuntan Publik. Pemahaman diri auditor tersebut dapat kiranya menghindarkan setiap sikap-sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan pengaturan kode etik profesi Akuntan Publik yang berlaku.

Tanggungjawab Auditor dan Etika Profesional Menurut SA Seksi 110, bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggungjawab tersebut tentunya dalam rangka untuk menilai kewajaran laporan keuangan dari salah saji secara material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, standar auditing dan kode etik akuntan. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap etika profesi seperti yang diisyaratkan dalam standar auditing dan kode etik akuntan berarti auditor kurang menunjukkan atau tidak memiliki idealisme yaitu sebagai sikap yang dependen

dan tidak menghindarkan terjadi berbagai kepentingan.. Kualitas audit yang dimaksud merupakan sesuatu yang mengharuskan atau kewajiban yang mendorong auditor mempunyai perilaku yang sesuai dengan etika profesional (kode etik). Adapun kode etik merupakan norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan ukuran tingkah laku. Perilaku profesional auditor seperti yang telah ditetapkan oleh AICPA, meliputi : (a) Prinsip-prinsip yang meliputi tanggungjawab, bertindak untuk kepentingan masyarakat, bertindak jujur, integritas, objektivitas, dan independensi, bekerja cermat, serta mengevaluasi kelayakan lingkup dan sifat jasa, (b) Perturan perilaku yang harus ditaati oleh profesi akuntan publik, (c) Interpretasi, (d) Kelengkapan etika. Sedangkan menurut SPAP (2001) AE 100, meliputi independensi, integritas dan objektivitas. Perilaku profesional yang diisyaratkan dalam SPAP tersebut menuntut auditor harus mempunyai sikap yang independen dalam melaksanakan setiap pekerjaannya disamping mempunyai integritas yang merupakan kualitas yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memberikan tatanan nilai bagi jasa auditor, dan serta objektivitas yang merupakan suatu keyakinan atas kualitas dalam memberikan nilai bagi jasa auditor.

Tanggung Jawab Auditor Menurut SA 240 , menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan melaporkan tentang laporan keuangan, dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh standar auditing, sesuai dengan temuan auditor (SPAP). Bila auditor juga melaporkan tentang

keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan (Arrens, A. A and Loebbecke, 2003). Menurut (Mulyadi, 2002) ada beberapa tanggung jawab auditor, yaitu : 1. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan, meliputi mendeteksi dan melaporkan adanya suatu tindak kesalahan dan kecurangan. 2. Tanggung jawab untuk menemukan pelanggaran hukum oleh klien, meliputi mendeteksi adanya tindakan kekeliruan dan kecurangan. 3. Tanggung jawab mempertahankan sikap independen, meliputi mempertahankan sikap mental independen. 4. Tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, meliputi mengevaluasi tentang kesangsian dalam kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

7.2 Tanggung Jawab Auditor Internal

Pengendalian internal yang sering juga disebut sebagai pengendalian manajemen dalam pengertian yang paling luas mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian internal berfungsi sebagai lini depan untuk menjaga aktiva dan mendeteksi terjadinya kesalahan, kecurangan, penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan (BPK RI, 2007). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal sangat

penting dalam menjaga asset perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan yang disengaja oleh pihak tertentu.

Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu: (1) reliabilitas pelaporan keuangan, (2) efisiensi dan efektivitas operasi, (3) ketaatan pada hukum dan peraturan.

Manajemen merancang sistem pengendalian internal untuk mencapai ketiga tujuan ini. Fokus auditor, baik dalam audit atas laporan keuangan maupun audit atas pengendalian internal, tertuju pada pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan ditambah pengendalian atas operasi dan ketaatan pada hukum serta peraturan yang dapat secara material mempengaruhi pelaporan keuangan. Fungsi dari auditor internal adalah memeriksa secara langsung pengendalian-pengendalian internal (*internal controls*) yang dijalankan oleh perusahaan dan memberikan rekomendasi serta perbaikan-perbaikan atas pengendalian internal ke arah yang lebih baik, dengan harapan tercapainya tujuan-tujuan dari pengendalian internal tersebut (Marisa, 2007).

(Rustendi, 2017) mengungkapkan, Secara umum, pengendalian diartikan sebagai upaya untuk mengarahkan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian sebagai salah satu unsur dari fungsi manajemen, memiliki dua aspek penting yaitu pengawasan dan tindak lanjut. Kedua aspek tersebut perlu diintegrasikan dengan pengendalian internal yang memungkinkan manajemen dapat menjalankan fungsi pengendaliannya secara efektif dan efisien, dan dapat mengatasi *span of control* yang cenderung semakin luas sejalan dengan semakin besarnya skala perusahaan. Oleh karena itu, dalam perspektif manajemen, pengendalian internal meliputi semua kebijakan, prosedur, dan tindakan, yang didukung oleh semua unsur organisasi untuk mengarahkan aktivitas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan dinamika organisasi dengan ekspektasi yang tinggi pada terciptanya *good governance*, pemanfaatan teknologi yang diimbangi dengan kompetensi sumber daya manusia, dan efektivitas manajemen risiko, telah mendorong manajemen untuk merancang model pengendalian internal yang tepat dan adaptif guna memenuhi harapan pemangku kepentingan pada kondisi perubahan lingkungan yang relatif cepat, bisnis yang semakin kompleks, isu etika, serta perubahan ketentuan hukum dan regulasi. COSO menawarkan kerangka kerja pengendalian internal yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai kepada manajemen dan dapat diterapkan baik pada lingkup organisasi atau pun unit/fungsi tertentu dalam organisasi. COSO (2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.”

Tujuan yang berkaitan dengan operasi meliputi pencapaian efektivitas dan efisiensi operasi, dan pengamanan aset. Pengendalian internal diharapkan mampu mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, mencegah timbulnya kerugian karena pemborosan, limbah, dan penyalahgunaan aset.

Disamping itu, tujuan yang berkenaan dengan operasi juga meliputi pencegahan risiko yang muncul karena keputusan bisnis yang buruk, misalnya menjual produk dengan harga yang terlalu rendah/tinggi, memberikan kredit yang berisiko macet, munculnya kewajiban tidak terduga, dan kegagalan dalam mempertahankan pegawai kunci.

Tujuan pelaporan memiliki fokus pada reliabilitas pelaporan keuangan dan non keuangan. Laporan kepada pihak eksternal organisasi dilakukan sebagai kepatuhan dan regulasi

dan atau perikatan, sehingga bentuk terhadap ketentuan hukum penyusunan dan penyajian laporannya harus sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, misalnya laporan keuangan (*financial statements*), pelaporan berkelanjutan (*sustainability reporting*), laporan tahunan (*annual report*). Sedangkan laporan kepada pihak internal organisasi dilakukan untuk kepentingan manajemen sehingga sifatnya lebih fleksibel sesuai kebutuhan untuk pengelolaan operasi/bisnis dan pengambilan keputusan, misalnya laporan keuangan divisi/unit bisnis, laporan keuangan per kegiatan/proyek, laporan penggunaan aset, laporan pemberdayaan sumber daya manusia, laporan hasil *self assesment* pengendalian internal, laporan hasil *self-assesment* terhadap *good corporate governance*, dan laporan hasil audit internal. Tujuan kepatuhan fokus kepada upaya mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi.

Interaksi antara organisasi dengan para pemangku kepentingan semakin kompleks dengan risiko yang semakin tinggi dalam hal terjadinya konflik kepentingan, pelanggaran yang tidak wajar/adil, fraud, persaingan bisnis yang tidak sehat, dan kerusakan lingkungan. Aspek utama yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi, antara lain : ketentuan dan perizinan usaha, perpajakan, pengelolaan sumber daya manusia termasuk pemberian kompensasi, pengelolaan dan pengendalian lingkungan, praktek operasi (transportasi, perbankan/ pembiayaan, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan lain-lain). (Rustendi, 2017).

(Rustendi, 2017) mengungkapkan, "Pengendalian sebagai suatu 'proses' memiliki makna bahwa pengendalian berkenaan dengan kebijakan, prosedur, sistem, struktur, dan personel (pegawai dan manajemen) yang menyangkut persepsi, sikap dan tindakannya, yang diterapkan pada tingkat organisasi, divisi sampai unit/bagian dan fungsi dalam organisasi.

Disamping itu, perancangan dan implementasi pengendalian internal perlu mempertimbangkan kepentingan manajemen risiko, dan *governance*. Oleh karena itu, dalam perancangan pengendalian internal perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang merupakan bagian dari komponen pengendalian internal. COSO (2013) mengemukakan komponen pengendalian internal sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*control activity*)
4. Informasi & Komunikasi (*information & Communication*)
5. Aktivitas Pemantauan (*monitoring activity*)."

Auditor internal berkepentingan untuk melakukan review dan evaluasi pengendalian internal dengan tujuan untuk menentukan kecukupan perancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, serta menyediakan informasi berkenaan dengan kelemahan atau kekurangan pengendalian sebagai bahan tindak lanjut perbaikan oleh manajemen. Secara teknis, evaluasi terhadap pengendalian internal bermanfaat untuk:

1. Menentukan fokus audit pada area atau fungsi yang penting dan memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil identifikasi kelemahan atau kekurangan pengendalian internal.
2. Mengurangi prosedur audit pada *fieldwork* yang tidak perlu agar aktivitas audit internal berjalan efektif dan efisien,
3. Menjadikan aktivitas audit jelas dan terukur sesuai dengan kompleksitas organisasi yang diauditnya.

7.2.1 Teknik Review Terhadap Pengendalian Internal

Review dan evaluasi umumnya dapat dilakukan dengan cara :

1. Pengisian kuesioner, dimana auditor menyusun pertanyaan pengendalian internal berikut keterkaitannya dalam format kuesioner tertutup.
2. Pembuatan *flowchart*, dimana auditor dapat menandai titik-titik kekuatan dan kelemahan pengendalian internal secara visual sebagai dasar untuk melakukan pengujian lebih lanjut.
3. Pengujian terbatas atas sistem (*walk through*), dimana auditor melakukan observasi yang dilengkapi dengan atau fungsi yang *Interview* guna menguji area kelemahan mengindikasikan pengendalian, atau ketidaksesuaian implementasi pengendalian dengan perancangannya.

Dalam menentukan tingkat efektivitas pengendalian internal, auditor perlu mempertimbangkan apakah semua komponen dan prinsip pengendalian internal ada dalam perancangan dan berfungsi dalam pelaksanaannya, serta apakah integrasi diantara komponen tersebut mampu merespon risiko secara simultan. Dokumentasi audit menggunakan kertas kerja audit berupa Matriks Pengendalian Internal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menulis laporan hasil *review* pengendalian internal, atau sebagai bahan untuk menentukan fokus audit lebih lanjut.

7.2.2 Survei Pendahuluan

Pengertian Survei Pendahuluan (Hanif, 2020) menyatakan bahwa, Survei pendahuluan dalam audit internal adalah suatu cara yang digunakan untuk dapat mengetahui kerumitan operasi yang diaudit pada saat audit mulai dilakukan, sebagaimana yang kemudian mereka ketahui pada saat audit telah selesai. Secara sederhana survei pendahuluan

dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai objek tertentu tanpa melakukan verifikasi secara rinci.

Sedangkan menurut Oki Sadma, 2015 menyatakan bahwa pengertian survei adalah sbb :

1. Lebih memahami aktifitas audit
2. Mengidentifikasi area atau bidang yang memerlukan penekanan khusus dalam audit
3. Memperoleh informasi awal sebagai bahan untuk melaksanakan pekerjaan lapangan
4. Menentukan apakah perlu melakukan audit lebih lanjut

Langkah Dasar Survei Pendahuluan

(Hanif, 2020) menyatakan bahwa, Survei pendahuluan dapat menjadi sarana yang baik untuk menganalisis karyawan dan *system*, namun bisa juga menjadi sebuah pencarian yang tidak beraturan. Auditor Internal harus memastikan bahwa waktu dan upaya yang dihabiskan untuk survei pendahuluan bisa produktif. Keberhasilan atau kegagalan audit bisa jadi sangat tergantung pada survei. Auditor sebaiknya melakukan survei dengan delapan langkah dasar.

1. Melakukan Studi Awal

Studi awal yang dilakukan auditor mencakup penelaahan atas kertas kerja tahun sebelumnya, temuan audit, bagan organisasi dan dokumen lain yang akan membantu untuk lebih memahami subjek audit. Studi awal dilakukan di kantor pusat, meskipun banyak auditor internal saat ini dapat mengakses informasi secara elektronik dari lokasi yang jauh. Kertas kerja penugasan sebelumnya dapat menunjukkan pendekatan yang dilakukan auditor lain atas penugasan tersebut, meskipun pendekatan ini mungkin tidak lagi layak atau tidak diinginkan untuk di audit tahun ini.

2. Pendokumentasian

Pendokumentasian mencakup beberapa langkah yang akan mengarah pada per temuan awal antara auditor dengan manajer klien. Pembuatan daftar pengingat dan daftar isi awal untuk kertas kerja merupakan beberapa hal yang dilakukan saat pen dokumentasian. Auditor juga membuat kuesioner yang akan digunakan dalam waw ancara dan diskusi dengan manajer klien dan lainnya.

3. Bertemu Klien

Pertemuan auditor dengan manajer klien member peluang bagi auditor untuk menjelaskan tujuan dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Dalam beberapa sit uasi, auditor justru ingin membahas keseluruhan peran audit internal dan organisasi. Dalam pembahasan dengan manajer dan supervisor, auditor menjelaskan tujuan, s asaran dan standar operasi serta resiko bawaannya. Auditor juga ingin mengenali gaya manajemen yang diterapkan.

4. Mendapatkan Informasi melalui :Wawancara

Wawancara yang sukses didasarkan pada penerapan saksama enam langkah penting; persiapan, penjadwalan, pembukaan, pelaksanaan, penutupan dan pencatatan. Mengumpulkan bahan bukti : Survei pendahuluan akan berlangsung lancar dan sistematis jika auditor internal memiliki pandangan yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai. Dalam kebanyakan audit informasi penting dapat diklasif ikasikan kedalam empat fungsi dasar manajemen; Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kontrol.

5. Pengamatan

Pengamatan dalam arti umum terus dilakukan selama survei pendahuluan. Melalui pengamatan yang gigih dan Tanya jawab yang cerdas, auditor internal mampu untuk; Menemukan tujuan, sasaran dan standar, menilai kontrol untuk mencapai tujuan ini, mengevaluasi risiko,

menentukan kontrol untuk meminimalkan risiko, membuat penentuan risiko secara sistematis, menilai gaya manajemen.

6. Pembuatan Bagan Alir

Bagan Alir memotret suatu proses. Meskipun pembuatan bagan alir mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan seni, namun umumnya lebih bersifat seni. Pembuatan bagan alir yang formal seharusnya distandardisasi dalam departemen audit. Semua auditor harus menggunakan bentuk yang sama dan mengikuti instruksi dasar yang sama. Tidak semua bagan alir terperinci, formal atau ekstensif.

7. Pelaporan

Selama penelaahan hasil-hasil survei dengan manajemen, pelaporan temuan positif dan negatif bisa jadi kondusif bagi hubungan auditor-klien. Estimasi awal untuk waktu dan kebutuhan sumber daya harus dilakukan, bersama dengan target tanggal pekerjaan lapangan dan fase pelaporan audit.

7.2.3 Penilaian Akhir Terhadap Risiko Pengendalian

(Rustendi, 2017) menyatakan bahwa, Penilaian akhir atas risiko pengendalian didasarkan pada evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal pada tingkat entitas, hasil pengujian pengendalian pada kegiatan atau siklus transaksi, dan bukti audit lainnya. Evaluasi terhadap bukti yang ada melibatkan pertimbangan secara kuantitatif, atau secara kualitatif.

Penilaian akhir risiko pengendalian kuantitatif secara menggunakan Matriks Pengendalian Internal seperti yang telah dibahas pada bab ke-4. Perbedaannya terletak pada isi kuesioner, dimana pada Matriks Pengendalian Internal untuk

penilaian akhir risiko pengendalian diterapkan pada siklus kegiatan atau siklus transaksi yang diaudit sedangkan pada penilaian awal risiko pengendalian diterapkan pada lingkup entitas. Sementara itu, penilaian akhir risiko pengendalian secara kualitatif dilakukan berdasarkan kuesioner pengendalian untuk setiap kegiatan atau siklus transaksi, bukti yang diperoleh dari hasil pengujian lainnya seperti uji kepatuhan, dan hasil audit sebelumnya yang relevan. Penarikan kesimpulan berkenaan dengan penilaian akhir risiko pengendalian menggunakan prosedur yang sama seperti yang telah dibahas pada bab keempat.

Tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan menentukan jenis pengujian substantif yang akan dilakukan, yaitu :

1. Bila risiko pengendaliannya dinilai tinggi, maka pengujian Substantif dilakukan secara mendalam.
2. Bila risiko pengendalian dinilai rendah, maka pengujian substantif dilakukan secara terbatas.

Hasil penilaian akhir terhadap risiko pengendalian harus didokumentasikan dalam kertas kerja audit yang meliputi kesimpulan dan dasar penilaiannya termasuk matriks pengendalian internal, atau kuesioner yang telah dijawab, *flowchart*, dan komentar atau catatan naratif hasil pengujian.

Dalam membuat penilaian risiko pengendalian untuk suatu asersi adalah penting bagi auditor untuk :

1. Mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai apakah pengendalian yang berhubungan dengan asersi telah dirancang dan diterapkan dalam operasi oleh manajemen entitas
2. Mengidentifikasi salah satu potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas

3. Mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji
4. Melaksanakan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas rancangan dan pengoperasian dari pengendalian tersebut
5. Mengevaluasi bukti dan membuat penilaian.

7.2.4 Bukti Audit

Manfaat identifikasi bukti audit

1. Bukti akan digunakan untuk mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi audit
2. Bukti-bukti audit mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan audit. (Alifia, 2015)

Jenis-jenis Bukti Audit

1. Bukti Fisik

Pengertian dari bukti fisik ini sendiri adalah salah satu bukti yang nantinya akan didapatkan oleh auditor secara langsung dan sudah melalaui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Contohnya saja seperti pemeriksaan fisik atas persediaan secara langsung dari pihak auditor eksternal atau internal.

2. Bukti Matematis

Seorang auditor akan mendapatkan bukti matematis melalaui perhitungan yang dilaku kan secara langsung, misalnya saja *foting* untuk penjumlahan vertikal dan *cross footing* bisa untuk perjumlahan bisa itu secara horizontal maupun vertikal.

3. Bukti Rasio

Bukti rasio atau yang biasa disebut sebagai bukti perbandingan, dipakai oleh para auditor untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, *qucik ratio* dan masih ada banyak lagi. Dan bukti rasio ini masuk kedalam jenis bukti audit yang sangat umum digunakan.

4. Bukti Dokumenter

Bukti dokumenter ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti bukti yang dibuat oleh pihak luar lalu dikirimkan kepada tim auditor secara langsung. Selanjutnya ada juga bukti yang buat untuk disimpan secara pribadi oleh klien. Pada bukti yang pertama mempunyai keandalan yang tinggi sekali bila dibandingkan dengan dokumen-dokumen selain itu.

5. Bukti Pengendalian Internal

Bukti ini termasuk bukti yang tekuat pada saat proses pelaksanaan audit. Masalahnya tidak lain adalah karena seorang auditor dapat memperoleh banyak bukti yang dapat dikumpulkan oleh pengendalian internal.

6. Bukti Catatan

Para akuntan selalu menyediakan catatan mengenai perusahaanya, sehingga bukti catatan ini menjadi sebuah sumber yang bisa dipakai oleh seorang auditor untuk dijadikan bukti audit.

7. Bukti Surat

Umunya bukti surat ini lebih dikenal dengan sebutan surat pernyataan tertulis yakni sebuah surat tertulis yang sebelumnya sudah ditandatangani individu yang dapat bertanggungjawab dan juga mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai kondisi tertentu, misalnya bukti tersebut diperoleh dari manajemen termasuk juga dari spesialis jurnal akuntan.

8. Bukti Lisan atau Wawancara

Bukti ini termasuk dalam jenis bukti audit. Ketika seorang auditor sedang melakukan pekerjaannya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan manusia, dengan begitu ia mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan serta melakukan wawancara personal.

9. Bukti Analitik

Bisa dikatakan kalau bukti analitik ini hampir sama dengan bukti rasio (perbandingan) sebab bukti analitik ini masih satu bahasan dengan pos tertentu antara laporan keuangan tahun berjalan dan tahun yang sudah terlewat. Dan tahun sebelumnya masih menjadi acuan utama untuk dijadikan perbandingan. Diawal kegiatan audit bukti ini akan dikumpulkan terlebih dahulu sehingga terlihat objek pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu.

10. Bukti Konfirmasi

Dalam proses *auditing* agar bisa mendapatkan serta menilai sebuah komunikasi yang langsung dari pihak ketiga mengenai jawaban permintaan informasi atas unsur tertentu maka dibutuhkan bukti konfirmasi ini.

11. Bukti Penelusuran

Kenapa perlu dilakukan sebuah penelusuran? Alasannya ialah terkadang pengumpulan bukti yang dilakukan oleh auditor bisa itu memakai dokumen ataupun catatan akuntansi bisa juga sebaliknya. Para auditor sangat terbantu sekali dengan adanya bukti penelusuran ini ketika akan menemukan jenis bukti audit lain.

12. Bukti Keterangan

Hal yang sangat wajar sekali apabila dalam prosedur audit pihak auditor selaku objek yang sudah dianggap mempunyai informasi meminta keterangan dari pihak terkait. Dan bukan semata-mata bukti keterangan ini dibuat begitu saja karena memang bukti keterangan ini

didasari pada dasarnya auditor yang memastikan buktinya kepada klienya.

13. Bukti Observasi

Bukti Observasi adalah sebuah pengamatan dan termasuk jenis bukti audit. Dalam hal ini seorang auditor mempunyai kesempatan untuk melihat serta menyaksikan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan bukti.

14. Bukti Inspeksi

Pengertian inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan sangat detail sekali, mengenai suatu dokumen dan kondisi fisik yang mempunyai kaitan untuk kedepanya mampu menghasilkan bukti guna mendukung laporan keuangan perusahaan. Bukti Inspeksi ini wajib tercantum dalam bukti dan prosedur audit.

15. Bukti Perhitungan

Didalam proses auditing bukti perhitungan dan prosedur termasuk kedalam bukti fisik yang tidak menyatu namun terpisah. Sudah jelas kalau seorang auditor akan memperoleh bukti sesudah merekan melakukan *couting*, sering juga mereka sampai menjalankanya secara mandiri demi memastikan apakah hasil pekerjaan sudah real atau masih terdapat manipulasi yang terencana sebelumnya seperti itu. (Ramadhan, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia (2015) 'Bukti Audit'.
- Arrens, A. A and Loebbecke, J. . (2003) *Auditing: An Integrated Approach*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Chou, J., Zaiats, N., dan Zhang, B. (2014) 'Does auditor choice matter to foreign investors? Evidence from mutual funds worlwide', *Journal of Banking and Finance*, p. 46.
- EZH (1999) *Tanggung Jawab Auditor*. Media Akuntansi, (no. 35 tahun VI).
- Hanif, A. (2020) 'Survei Pendahuluan (Internal Audit'.
- Jusup, A. H. (2010) *Auditing (Pengauiditan)*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Lin, Z. J., & Liu, M. (2019) 'The impact of corporate governance on auditor choice: Evidence from China', *Journal of Intrnational Accounting, Auditing and Taxation*, p. 18.
- Marisa, R. D. (2007) 'Pengaruh Peran Auditor Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Enterprise Risk Management Sebagai Variable Moderating'.
- Mulyadi (2002) *Auditing*. Edisi Keen. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramadhan, F. (2020) 'Jenis Bukti Audit dengan Contoh dan Penjelasannya'.
- Rustendi, T. (2017) *Audit Internal: Prinsip dan Teknik Audit Berbasis Risiko*. Bandung: Mujahid Press.
- Sarwako, I. (1996) 'Perubahan Peran dan Tanggung Jawab Profesi Akuntansi dalam Era Globalisasi', *Konveski Nasional Akuntansi (ke-3: 1996:Semarang)*, pp. 143–145.

BAB 8

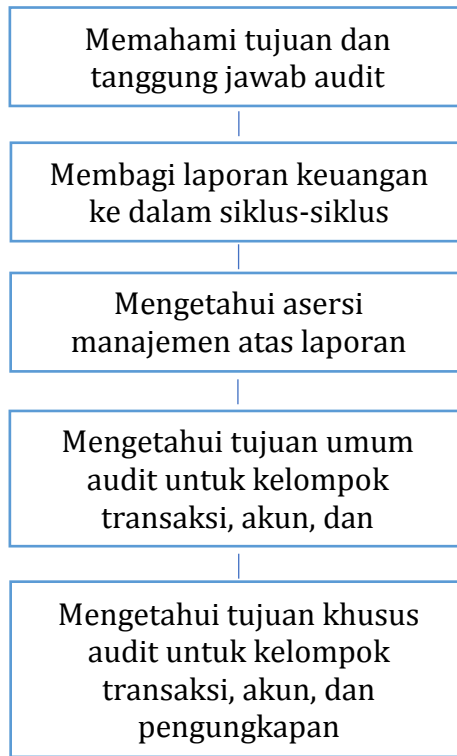
TUJUAN AUDIT

Oleh Nita Andriyani Budiman

8.1 Tujuan Pengauditan Laporan Keuangan

PSA 02 (SA 110) menyatakan tujuan pengauditan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemberian opini atas laporan keuangan adalah fokus utama dalam PSA 02. Auditor mengakumulasi bukti-bukti audit dalam rangka mencapai kesimpulan tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan untuk menentukan efektivitas pengendalian internal ketika auditor menerbitkan laporan audit yang tepat.

Apabila auditor berkeyakinan bahwa laporan audit tidak disajikan secara wajar atau auditor tidak mampu menarik kesimpulan karena bukti audit yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan audit. Setelah pemberian opini dan fakta yang ada mengindikasikan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, maka auditor berkemungkinan harus menunjukkan pada pengadilan atau pihak yang berwenang bahwa auditor telah menjalankan proses audit dengan cara yang tepat dan menghasilkan kesimpulan yang beralasan.



Gambar 8.1 Langkah-langkah Tujuan Audit
(Sumber : Elder *et al.*, 2013)

8.2 Tanggung Jawab Manajemen

Manajemen lebih paham tentang kegiatan operasional perusahaan daripada auditor, sehingga manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menjaga kecukupan pengendalian internal, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Tanggung jawab manajemen dan hubungan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi (asersi) pada laporan keuangan memberikan

kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan yang dianggap penting. Apabila manajemen mengungkapkan laporan keuangan yang bagi auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar (*adverse*) atau opini wajar dengan pengecualian (*qualified*).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/Pojk.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan, manajemen dalam hal ini diwakili oleh direksi perusahaan membuat surat pernyataan tentang tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum/standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar, laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material, serta direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena:

- a. Apabila tidak diaudit terdapat kemungkinan bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut
- b. Apabila laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari KAP berarti pengguna laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

- c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang didukung oleh laporan keuangan yang sudah diaudit lebih dipercaya oleh otoritas pajak.

8.3 Tanggung Jawab Auditor

PSA 01 (SA 110) menyatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi. Auditor juga membuat laporan efektivitas pengendalian internal perusahaan, sehingga auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kelemahan signifikan dalam pengendalian internal terhadap laporan keuangan.

8.3.1 Salah Saji Material

Salah saji dianggap material jika terdapat kesalahan-kesalahan yang belum dikoreksi dan kecurangan dalam laporan keuangan yang berdampak akan mengubah atau mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi.

8.3.2 Keyakinan Memadai

Tingkat keyakinan auditor didapatkan saat audit telah diselesaikan. Auditor tidak menjamin kebenaran atas laporan keuangan. Namun, auditor berkeyakinan bahwa audit yang dijalankan telah sesuai dengan standar audit, sehingga kecil kemungkinannya untuk tidak mampu mendeteksi kesalahan saji yang material. Apabila auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan kepastian bahwa asersi dalam laporan keuangan adalah benar, maka bukti audit dan biaya audit akan meningkat secara signifikan, sehingga mengakibatkan audit tidak lagi ekonomis untuk dilakukan.

8.3.3 Kesalahan dan Kecurangan

Kesalahan (*errors*) dan kecurangan (*fraud*) merupakan salah saji yang dapat bersifat material atau tidak material. Kesalahan adalah salah saji yang tidak disengaja atau karena keteledoran, sebaliknya kecurangan adalah salah saji yang disengaja untuk menguntungkan individu atau kelompok tertentu dan merugikan pihak lain. Contoh dari kesalahan, yaitu kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan akuntansi atau kesalahan sistem. Penggelapan dana, penyalahgunaan aset, atau faktur palsu merupakan contoh dari kecurangan.

8.3.4 Skeptisme Profesional

Auditor harus merencanakan dan melakukan proses audit dengan sikap mental skeptisme profesional dalam segala hal yang terkait dengan perusahaan yang diaudit. Skeptisme profesional adalah suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bukti audit. Auditor tidak harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku tidak jujur, namun kemungkinan bahwa adanya ketidakjujuran harus

dipertimbangkan. Pada saat yang sama, auditor juga harus menganggap bahwa manajemen telah berlaku jujur.

8.4 Siklus Laporan Keuangan

Audit dilakukan dengan membagi laporan keuangan ke dalam kelompok atau komponen yang lebih kecil agar proses audit lebih mudah dan membantu dalam menetapkan tugas dalam tim audit. Pendekatan siklus adalah salah satu cara yang dilakukan auditor dengan tetap menjaga jenis atau kelompok transaksi dan saldo akun yang terkait erat ke dalam satu kelompok yang sama. Pendekatan ini menghubungkan bagaimana setiap transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar dan disajikan dalam laporan keuangan.

Pendekatan siklus sering dibedakan menjadi lima siklus, yaitu: 1) siklus penjualan dan penagihan, 2) siklus pembelian dan pembayaran, 3) siklus penggajian dan kepegawaian, 4) siklus persediaan dan pergudangan, dan 5) siklus akuisisi modal dan pelunasan. Auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan siklus dalam melakukan pengujian audit atas transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo akhir suatu akun serta melakukan pengujian audit atas saldo akun dan pengungkapan terkait.

8.5 Asersi Manajemen (*Management Assertion*)

Asersi manajemen adalah pernyataan yang tersirat atau tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan dengan standar akuntansi dan merupakan bagian dari kriteria bahwa manajemen telah mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Asersi wajib ada dalam laporan keuangan, karena dari asersi dapat ditemukan indikasi

kesalahan disengaja maupun tidak disengaja pada laporan yang dibuat oleh manajemen. Sementara, fungsi asersi pada audit adalah untuk membantu menciptakan perencanaan audit serta membentuk tujuan umum audit.

Tabel 8.1 Asersi Manajemen untuk Setiap Kategori Asersi

Asersi Mengenai Kelompok Transaksi dan Kejadian	Asersi Mengenai Saldo Akun	Asersi Mengenai Penyajian dan Pengungkapan
Keterjadian (occurrence) – transaksi dan kejadian yang telah dicatat benar-benar terjadi dan terkait dengan entitas tersebut	Keberadaan (existence) – aset, liabilitas, dan ekuitas benar-benar ada	Keterjadian serta Hak dan Kewajiban (occurrence rights and obligations) – mengungkapkan kejadian dan transaksi yang telah terjadi dan terkait dengan entitas tersebut
Kelengkapan (completeness) – semua transaksi dan kejadian yang seharusnya telah dicatat telah dicatat	Kelengkapan (completeness) – aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya telah dicatat telah dicatat	Kelengkapan (completeness) – seluruh pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan
Akurasi (accuracy) – jumlah dan data lain terkait	Penilaian dan Alokasi (valuation and allocation) – aset,	Akurasi dan Penilaian (accuracy and valuation) –

Asersi Mengenai Kelompok Transaksi dan Kejadian	Asersi Mengenai Saldo Akun	Asersi Mengenai Penyajian dan Pengungkapan
dengan transaksi dan kejadian telah dicatat dengan tepat	liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat serta setiap hasil penilaian penyesuaian telah dicatat dengan tepat	informasi keuangan dan informasi lainnya telah diungkapkan dengan tepat pada jumlah yang tepat
Klasifikasi (classification) – transaksi dan kejadian telah dicatat di akun yang tepat	Hak dan Kewajiban (rights and obligations) – aset yang dimiliki atau berada dibawah kendali entitas merupakan hak dari entitas tersebut, serta liabilitas merupakan kewajiban dari entitas tersebut	Klasifikasi dan Pemahaman (classification and understandability) – informasi keuangan dan informasi lainnya telah disajikan dengan tepat dan telah dijelaskan dan diungkapkan secara tepat dan jelas
Pisah batas (cut off) – transaksi dan kejadian telah		

Asersi Mengenai Kelompok Transaksi dan Kejadian	Asersi Mengenai Saldo Akun	Asersi Mengenai Penyajian dan Pengungkapan
dicatat di periode pembukuan yang benar		

Sumber: Elder *et al.* (2013)

8.6 Tujuan Audit Terkait Transaksi

Tujuan audit terkait transaksi bertujuan untuk memberikan kerangka untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang memadai dalam standar pekerjaan lapangan serta untuk memutuskan bukti yang tepat bagi setiap kelompok transaksi. Tujuan audit tersebut tetap sama dari setiap audit ke audit yang lain, namun bukti auditnya dapat berbeda karena tergantung dari kondisi lapangan.

8.6.1 Tujuan Umum Audit Terkait Transaksi

- Keterjadian: transaksi yang dicatat benar-benar terjadi
- Kelengkapan: transaksi yang terjadi telah dicatat dalam jurnal
- Akurasi: transaksi yang dicatat telah disajikan dalam jumlah yang benar
- Pemindahbukuan dan pengikhtisaran: transaksi yang dicatat telah dimasukkan dalam arsip utama dengan tepat dan telah diikhtisarkan dengan benar
- Klasifikasi: transaksi yang dimasukkan dalam jurnal klien telah diklasifikasikan dengan tepat
- Penetapan waktu: transaksi dicatat pada tanggal yang benar

8.6.2 Tujuan Khusus Audit Terkait Transaksi

Minimal ada satu tujuan audit khusus terkait transaksi yang harus dimasukkan dalam setiap tujuan umum audit terkait transaksi, kecuali auditor berkeyakinan bahwa tujuan umum audit terkait transaksi tidak relevan atau tidak penting dalam suatu situasi dan kondisi tertentu.

8.7 Tujuan Audit Terkait Saldo

Tujuan audit terkait saldo diterapkan untuk saldo akun, bukan pada transaksi. Tujuan audit terkait saldo diterapkan pada saldo akhir pada semua akun dalam laporan posisi keuangan dan beberapa akun dalam laporan laba rugi. Pada akun laporan laba rugi biasanya melibatkan transaksi-transaksi yang tidak rutin dan biaya-biaya yang tidak terduga. Auditor mengumpulkan bukti audit untuk menguji rincian yang mendukung saldo akun daripada menguji saldo akun itu sendiri.

8.7.1 Tujuan Umum Audit Terkait Saldo

- a. Keberadaan: jumlah yang dimasukkan dalam laporan keuangan benar-benar telah dimasukkan dalam laporan keuangan
- b. Kelengkapan: jumlah yang telah dicatat dalam laporan keuangan sudah semuanya dimasukkan
- c. Akurasi: jumlah yang telah disajikan dalam jumlah yang benar
- d. Klasifikasi: jumlah yang dimasukkan pada data klien telah diklasifikasikan dengan tepat
- e. Pisah batas: transaksi mendekati tanggal laporan posisi keuangan dicatat pada periode yang benar
- f. Keterikatan perincian saldo akun sesuai dengan jumlah di arsip utama yang terkait, sesuai dengan jumlah total saldo akun dan jumlah total di buku besar

- g. Nilai terealisasi: aset dicatat pada estimasi jumlah yang dapat terealisasi
- h. Hak dan kewajiban: aset merupakan hak perusahaan, sebaliknya liabilitas merupakan kewajiban perusahaan.

8.7.2 Tujuan Khusus Audit Terkait Saldo

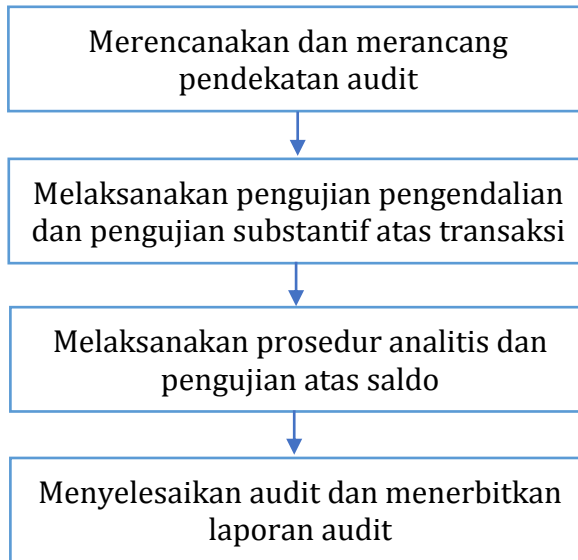
Minimal ada satu tujuan audit khusus terkait saldo yang harus dimasukkan dalam setiap tujuan umum audit terkait saldo, kecuali auditor berkeyakinan bahwa tujuan umum audit terkait saldo tidak relevan atau tidak penting untuk saldo akun yang sedang dinilai.

8.8 Tujuan Audit Terkait Penyajian dan Pengungkapan

Terdapat empat tujuan audit yang harus dipenuhi auditor sebelum menyimpulkan bahwa penyajian dan pengungkapan telah disajikan secara wajar. Keempat tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan adalah keterjadian dan hak dan kewajiban, kelengkapan, akurasi dan penilaian, serta klasifikasi dan pemahaman.

8.9 Tahapan dalam Audit Laporan Keuangan

Auditor harus mendapatkan bukti audit yang memadai untuk mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Terdapat dua pertimbangan penting seorang auditor dalam mengumpulkan bukti audit, yaitu: bukti memadai dalam jumlah yang cukup harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab profesional dari auditor dan biaya pengumpulan bukti audit yang dapat diminimalisasi.



Gambar 8.2 Empat Tahap Audit Laporan Keuangan
(Sumber : Elder *et al.*, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

- Elder, R.J. *et al.* (2013) *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu Adaptasi Indonesia*, Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 75/Pojk.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

BAB 9

BUKTI AUDIT

Oleh Rabiyatul Jasiyah

9.1 Pendahuluan

Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan proses audit adalah proses pengumpulan bukti sehingga auditor dapat memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan yang telah diaudit sebagai dasar untuk merumuskan suatu opini. Tujuan pengumpulan bukti audit adalah untuk memperoleh bukti audit yang mampu mendukung temuan audit. Kesimpulan audit dan rekomendasi audit sangat bergantung pada bukti audit yang diperoleh. Bukti audit terdiri dari:

1. Informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi seperti catatan transaksi, jurnal, buku besar dan sebagainya.
2. Informasi lain seperti notulen rapat. Bukti tersebut harus memenuhi sifat, kualitas, dan kuantitas yang cukup sehingga kesimpulan yang dibuat berdasarkan bukti tersebut sah.

Menurut Elder et al. (2010) bukti adalah seluruh informasi tertulis maupun lisan yang digunakan oleh auditor untuk menentukan kesesuaian informasi dalam laporan keuangan dengan standar dan kriteria. Urutan bukti audit adalah setiap informasi yang diberikan kepada auditor untuk memperkuat atau melemahkan keyakinannya. Urutan bukti berupa informasi positif/baik (+) juga buruk/negatif (-), buruk-

buruk/negatif-positif (-+) juga cenderung cocok dengan baik-baik (++) dan buruk-buruk (—). Sampel bukti audit yang positif (baik) dapat meningkatkan keyakinan yang memadai dari auditor. Sedangkan bukti negatif/buruk adalah informasi yang dapat merusak kredibilitas pemeriksa. Auditor mendasarkan keputusan mereka pada keyakinan atas objek audit dalam membuat, kemudian menyesuaikan (anchor) bukti yang diperoleh. Ada keraguan bahwa urutan bukti mempengaruhi kesimpulan Auditor, karena Ketika menerima seperangkat bukti dalam bentuk yang berbeda berdasarkan urutan pertemuan daripada isi informasi yang diterima.

Bukti audit sangat mudah mempengaruhi sifat pekerjaan audit yang tercantum pada standar ketiga pekerjaan lapangan dalam standar auditing yang berlaku umum, yang menyatakan bahwa bahan bukti kompaten yang mencukupi dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Mulyadi (2014), menyatakan bahwa bukti audit adalah informasi yang mendukung proses audit dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan auditor sebagai dasar karena mengungkapkan pendapatnya.

Bukti audit adalah dasar untuk lembaga audit negara dan auditor untuk menulis audit laporan, mendukung opini audit, dan membuat audit keputusan. Bukti audit juga dapat merujuk pada bukti diperoleh oleh lembaga audit dan auditor untuk menggambarkan kebenaran item audit dan menjadi dasar kesimpulan audit. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai dasar untuk membentuk opini audit.

Dengan perkembangan internet dan jejaring sosial, teknologi informasi modern dapat menghasilkan informasi data dalam jumlah besar kapan saja dan dimana saja. Dampak big data terhadap bukti audit lebih rumit daripada informasi

keuangan perusahaan, karena isu big data secara bertahap menjadi sumber penting bukti audit, yang sangat memperkaya bukti audit (Yin, 2019). Membandingkan karakteristik bukti audit kertas tradisional dan bukti audit elektronik, kita dapat memahami dampak signifikan data besar terhadap bukti audit. (Appelbaum et al., 2017)

9.2 Bukti Audit

Secara umum, ada tiga jenis bukti, yaitu bukti alami (*nature evidence*), bukti yang dibuat (*created evidence*), dan bukti Argumentasi rasional (*rational argumentation*). Bukti alamiah ada di sekitar kita, dan digunakan sebagai dasar pembuktian dalam semua aktivitas mental (melalui indera, berpikir, menalar, dan lain-lain. Ketika auditor mengamati persediaan barang digudang, ia menganggap bahwa ada persediaan. Bukti alamiah adalah bukti yang sangat meyakinkan.

Bukti yang diciptakan tidak secara alamiah ada disekitar kita. Ketika seorang ilmuwan melakukan eksperimen di laboratoriumnya, ia menciptakan bukti. Sebagai contoh, Air adalah bukti ilmiah, dan kita dapat mempelajari sifat air dengan cermat dan cerdas melalui pengamatan sifat fisik air. Banyak yang dapat dipelajari di laboratorium tentang air, seperti tekanan, aliran, dan pampatan, yang mengungkapkan sifat hidroliknya. Para ilmuwan mengubah bukti alami air menjadi air dengan karakteristik hidraulisnya. Contoh, air menunjukkan bahwa mengamati bukti adalah seni tersendiri. Seorang pengamat yang berpengalaman dan terampil seperti auditor ingin melihat lebih banyak agar mereka dapat memanfaatkan pengetahuannya secara maksimal.

Argumentasi Rasional. Ide atau gagasan sering mengikuti secara logis dari fakta yang diamati dan tampak benar dalam pikiran kita. Perlu mental yang kuat untuk mengamati bukti sederhana dan menarik kesimpulan yang lebih meyakinkan.

Dalam pemikiran rasional istilah “masuk akal” sering digunakan.

Tiga kelompok bukti tidak memiliki kekuatan yang sama dalam pikiran manusia. Sangat sulit untuk menyangkal keberadaan suatu objek didepan kita, kecuali jika penglihatan kita terganggu atau terhalang. Selama bukti yang diciptakan seragam dan sederhana, pikiran manusia dengan mudah mempercayai keberadaan benda tersebut. Karena apa yang tidak kita pahami, pikiran kita biasanya menolaknya. Hal yang sama berlaku untuk pemikiran rasional, ketika pemikiran rasional terdiri dari satu atau dua langkah sederhana yang masuk akal, pikiran kita menerimanya sebagai bukti. Pembuktian yang lama dan rasionalisasi matematis akan sulit bagi kebanyakan dari kita dan faktor penentunya bukan lagi kekuatan dari bukti tersebut, melainkan kompetensi orang yang menyajikan argumen.

Auditor juga mengumpulkan bahan bukti untuk pengambilan keputusan. Bahan bukti yang dipakai oleh auditor berbeda dari yang digunakan oleh akademisi dan kasus pengadilan formal, dan digunakan dengan cara yang berbeda. Auditor membuat empat pilihan utama berdasarkan bukti audit, yaitu:

1. Bukti apa yang dapat diperoleh (sifat)
2. Kapan bukti dapat memperoleh (saat).
3. Berapa banyak bukti yang dapat dikumpulkan (luas).
4. Siapa yang bertanggung jawabn untuk mengumpulkan bukti (penetapan staf).

(Arens et al, 2008) menyebutkan bahwa keputusan penting yang dihadapi auditor terkait bukti audit yaitu menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat, yang diperlukan untuk memenuhi keyakinan bahwa komponen laporan keuangan klien dan keseluruhan laporan telah

disajikan secara wajar, dan bahwa klien menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan.

9.3 Tingkat Keyakinan Bukti Audit

Sesuai dengan standar audit, auditor harus memperoleh cukup bukti yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit. Ada dua penentu tingkat keyakinan audit, yaitu ketepatan bukti dan kecukupan bukti.

1. Ketepatan Bukti

Bukti dikatakan tepat apabila memenuhi karakteristik relevansi dan reliabilitas. Bukti yang dianggap sangat tepat akan sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Keakuratan bukti terkait dengan prosedur audit yang dipilih dan ketepatan waktu, dan tidak dapat dibenahi dengan mengubah metode pemilihan sampel dan menambah ukuran sampel. Ketepatan hanya dapat diciptakan melalui pemilihan prosedur audit yang lebih relevan dan dapat diandalkan.

Bukti audit harus relevan dengan tujuan audit yang dapat dicapai oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Misalnya, auditor prihatin bahwa klien belum menagih pelanggan atas barang yang dikirim. Jika auditor memilih sampel dari Salinan faktur penjualan dan menelusuri setiap Salinan faktur penjualan tersebut ke dokumen pengiriman terkait, bukti tersebut tidak relevan dengan tujuan kelengkapan dan dengan demikian, bukan merupakan bukti yang tepat untuk tujuan tersebut.

Prosedur yang relevan adalah menelusuri sampel dokumen pengiriman ke Salinan faktur penjualan terkait untuk menentukan apakah setiap pengiriman barang telah ditagihkan. Dengan menelusuri dokumen pengiriman ke

salinan faktur penjualan, auditor dapat menentukan apakah pengiriman barang kepada pelanggan telah ditagih atau belum. sebaliknya, jika auditor menelusuri dari salinan faktur penjualan ke dokumen pengiriman, auditor tidak dapat menemukan apakah pengiriman barang telah ditagihkan atau belum. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dalam tujuan khusus, karena bukti audit mungkin relevan untuk satu tujuan audit, tetapi tidak relevan untuk tujuan audit lainnya. (Arens et.al., 2008)

Reliabilitas bukti mengacu pada tingkat dalam hal bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Jika bukti dapat dianggap diandalkan, bukti tersebut sangat membantu dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Menurut Arens et al (2008), reliabilitas tergantung pada enam karakteristik bukti yang dapat diandalkan, yaitu:

- a. Independensi penyedia bukti. Bukti yang berasal dari sumber diluar organisasi lebih dapat diandalkan daripada bukti audit yang berasal dari sumber didalam organisasi. Bukti yang diperoleh dari sumber dluar perusahaan seperti rekonsiliasi bank, pernyataan pengacara, atau dari pelanggan, sedangkan bukti atau dokumen yang berasal dari dalam perusahaan seperti wawancara dengan karyawan dan permintaan pembelian.
- b. Pengendalian internal klien yang efektivitas. Ketika klien memiliki pengendalian internal, bukti audit yang diperoleh lebih andal daripada Ketika kontrol internal klien lemah. Contoh, ketika pengendalian internal atas penjualan dan penagihan efektif, auditor dapat memperoleh bukti yang lebih andal dari faktur penjualan dan dokumen penjualan daripada Ketika pengendalian internal lemah.

- c. Pengetahuan langsung auditor. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan ulang, dan pengujian lebih andal daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Misalnya, jika auditor melakukan pemeriksaan fisik atas asset tetap dan membandingkannya dengan keadaan periode sebelumnya, bukti tersebut mungkin lebih andal daripada bukti yang diperoleh dari auditor perusahaan.
- d. Kualifikasi orang yang memberikan informasi. Bahkan ketika sumber informasi independent, bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memiliki kualifikasi yang tepat. Komunikasi dengan pengacara dan bank biasanya lebih dapat diandalkan daripada konfirmasi dengan orang-orang yang kurang akrab dengan dunia bisnis. Selain itu, bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor juga tidak dapat diandalkan jika auditor tidak kompeten untuk menentukan kebenaran bukti.
- e. Tingkat Objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat diandalkan daripada bukti yang membutuhkan penilaian tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut benar. Bukti yang bersifat objektif seperti memeriksa piutang usaha dan saldo bank, perhitungan fisik kas dan menjumlahkan saldo utang usaha untuk menentukan apakah informasi tersebut cocok dengan saldo pada buku besar. bukti yang bersifat subjektif seperti surat dari kuasa hukum klien tentang kemungkinan hasil dari proses hukum yang sedang dihadapi klien, dengan inventaris lama yang diamati selama pemeriksaan fisik. Ketika mengevaluasi keandalan bukti subjektif, penting bagi pemeriksa untuk menilai kualifikasi orang yang memberikan bukti.

- f. Akurasi. Ketepatan waktu bukti audit dapat dikaitkan dengan waktu pengumpulan atau periode audit. Bukti audit umumnya lebih andal untuk akun neraca jika diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Untuk akun laba rugi, bukti yang diperoleh akan lebih andal jika sampel tersedia untuk seluruh periode audit.
2. Kecukupan bukti.

Jumlah bukti yang dikumpulkan menentukan kecukupannya. Kecukupan bukti diukur dengan menggunakan ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel sebanyak 100 pada umumnya lebih mencukupi dibandingkan dengan sampel sebanyak 30. Selain ukuran sampel, metode pemilihan sampel juga akan menentukan kecukupan bukti audit. Sampel yang terdiri dari item-item populasi dengan nilai moneter yang besar pada umumnya dianggap sudah mencukupi terutama apabila item-item tersebut merupakan bagian terbesar dari jumlah total populasi.

9.4 Tipe Bukti Audit

Menurut (Konrath, 2002) ada enam tipe bukti audit yaitu:

1. Bukti fisik.

Bukti fisik terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau inspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya, bukti fisik yang diperoleh dari kas opname, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga dan inventarisasi asset tetap.
2. Bukti konfirmasi.

Bukti konfirmasi adalah bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan atau penilaian, langsung dari pihak ketiga diluar klien. Contohnya jawaban konfirmasi piutang,

utang, barang konsinyasi, surat berharga yang disimpan biro administrasi efek dan konfirmasi dari penasehat hukum klien.

3. Bukti Dokumentasi.

Bukti dokumentasi terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya, faktur pembelian, copy faktur penjualan, jurnal voucher, buku besar dan buku pembantu. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai kelengkapan dan keberadaan serta berkaitan dengan audit trail yang memungkinkan auditor untuk mentrasir dan melakukan vouching atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Bukti dokumentasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bukti dokumentasi yang dibuat pihak luar yang bebas yang dikirim langsung kepada auditor.
- b. Bukti dokumentasi yang dibuat pihak luar yang disimpan dan diarsipkan klien.
- c. Bukti dokumentasi yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.

Untuk bukti audit yang dibuat oleh pihak luar yang bebas diperoleh melalui konfirmasi. Meskipun konfirmasi bukan merupakan keharusan, namun perolehan bukti audit melalui konfirmasi bermanfaat berbagai informasi yang lain. Untuk menjelaskan informasi yang sering dikonfirmasi akan ditampilkan Tabel 9.1.

Tabel 9.1 Informasi yang Sering Dikonfirmasi

Informasi	sumber
Aktiva	
Bank	Bank
Piutang Usaha	Pelanggan
Wesel tagih	Pembuat
Persediaan konsinyasi	Consigne
Persediaan di gudang	Gudang
Nilai penyerahan kas ke asuransi jiwa	Perusahaan asuransi
Kewajiban	
Utang usaha	Kreditur
Wesel bayar	Peminjam
Uang muka pelanggan	Pelanggan
Utang hipotik	Penerbit hipotek
Utang obligasi	Pemegang obligasi
Modal saham	Pencatat register dan agen
Saham yang beredar	Penjual

Sumber: (Arens dan Loebbecke, 2003)

4. **Bukti Matematis.**

Bukti matematis merupakan perhitungan, perhitungan Kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Misalnya footing untuk meneliti penjumlahan vertikal, cross footing untuk meneliti penjumlahan horizontal dan extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba/rugi penarikan asset tetap, PPh dan accruals. Untuk rekonsiliasi misalnya pemeriksaan rekonsiliasi bank, rekonsiliasi saldo piutang usaha dan utang menurut buku besar dan sub buku besa, rekonsiliasi inter company accounts dan lain-lain.

5. **Bukti Analitis.**

Bukti analitis merupakan bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analitis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan substantive test dan pada akhir pekerjaan lapangan. Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk:

- a. Trend analitis yaitu membandingkan angka-angka laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan menyelidiki kenaikan/penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase.

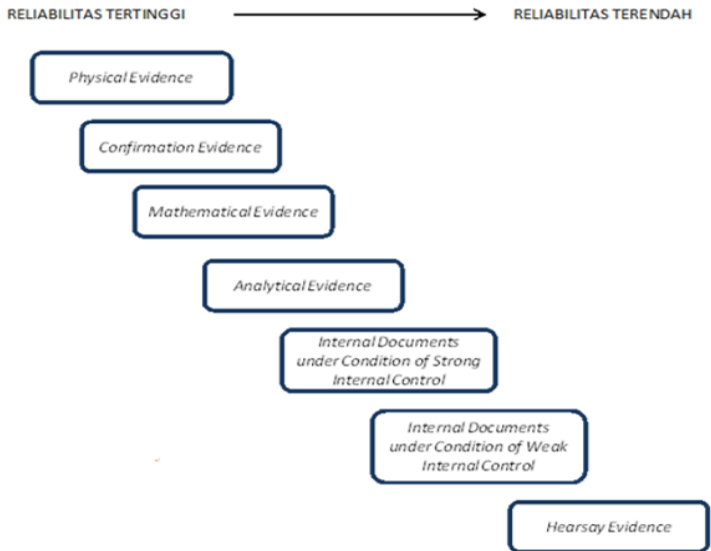
- b. Common size analisis.
- c. Analisis rasio, misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage dan rasio manajemen asset.

Bukti analitis berkaitan serta dengan asersi keberadaan, kelengkapan, dan penilaian. Perbandingan ini dilakukan untuk meneliti adanya perubahan yang terjadi dan untuk menilai penyebabnya.

6. Bukti Lisan.

Bukti lisan merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Misalnya pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian internal, ada tidaknya contingent liabilities, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting setelah tanggal neraca dan lain-lain. Bukti ini dapat menghasilkan bukti yang berkaitan dengan semua asersi.

Hubungan antara reliabilitas dan bukti audit dapat dilihat pada gambar 9.1 berikut:



Gambar 9.1 Hubungan antara reliabilitas dan bukti audit
Sumber: (Konrath, 2002)

Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independent di luar perusahaan dianggap lebih kuat, dalam arti dapat diandalkannya keabsahannya daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri.

9.5 Pertimbangan Auditor

Terdapat beberapa pertimbangan auditor yang perlu diperhatikan dalam menentukan kompetensi bukti audit berkaitan dengan kualitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor, diantaranya adalah:

1. Materialitas dan Resiko. Secara umum, untuk akun yang jumlahnya besar dalam laporan keuangan diperlukan jumlah bukti audit yang lebih banyak dibandingkan dengan akun yang bersaldo tidak material. Untuk akun yang memiliki kemungkinan tinggi untuk disajikan salah dalam laporan keuangan, jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor umumnya lebih banyak bila dibandingkan dengan akun yang memiliki kemungkinan kecil untuk disajikan salah dalam laporan keuangan (Mulyadi, 2014)
2. Personality Type. Dalam pengambilan keputusan, seorang auditor memerlukan pertimbangan yang baik agar dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. Suatu pertimbangan dapat didasarkan pada tipe personality masing-masing individu. Menurut teori *Myers-Briggs*, tipe personality auditor dalam pengambilan keputusan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
 - a. *Thinking*, yaitu auditor yang mengambil keputusan berdasarkan atas analisis pemahaman sebab akibat dari data dan fakta yang dimiliki.
 - b. *Sensing*, yaitu auditor mengambil keputusan dari fakta-fakta yang dimiliki dan bukan berdasarkan dari opini orang lain.
 - c. *Introverted*, yaitu auditor yang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dari dalam atau independen.
 - d. *Extroverted*, yaitu auditor yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan untuk mendapatkan klien dan mampu bergaul dengan masyarakat.
 - e. *Judgement*, yaitu auditor yang mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada di kertas kerja kemudian dengan ilmu yang dimiliki dianalisis. Pertimbangan-pertimbangan diperlukan untuk mengambil keputusan karena adanya ketidakpastian.

3. Faktor yang dapat memberikan kesimpulan dalam bahan bukti. Terdapat empat faktor yang menentukan apakah suatu bahan bukti audit dapat memberikan kesimpulan:
 - a. Relevansi. Bukti audit harus selaras atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dapat dipercaya. Relevansi hanya dapat dipertimbangkan dengan tujuan audit spesifik. Bukti audit barangkali relevan dengan satu tujuan audit tetapi tidak relevan dengan tujuan audit lainnya. (Arens dan Loebbecke, 2003)
 - b. Kompetensi. Kompetensi bukti merujuk pada tingkat dimana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau diyakini kebenarannya. Jika bukti audit dianggap memiliki kompetensi yang tinggi, maka bantuan bukti tersebut untuk meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sangat besar. Menurut (Arens dkk Diterjemahkan oleh tim Dejacarta, 2003) mayoritas auditor mempergunakan istilah keterpercayaan bukti sebagai sinonim dari kompetensi.
 - c. Kecukupan. Kuantitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Pada umumnya, kecukupan bukti diukur dengan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Beberapa factor yang mempengaruhi kecukupan ukuran sampel audit adalah ekspektasi auditor atas kemungkinan salah saji dan efektivitas dari pengendalian intern klien.
 - d. Ketepatan waktu. Ketepatan waktu dari bahan bukti mengacu pada kapan bahan bukti audit untuk mendukung akun-akun neraca akan lebih tepat untuk dikumpulkan pada masa-masa yang dekat dengan tanggal neraca.
4. Faktor ekonomi. Pengumpulan bahan bukti yang dilakukan oleh auditor dibatasi oleh dua faktor yaitu waktu dan biaya.

Auditor harus mempertimbangkan ekonomi dalam menentukan jumlah kompetensi bahan bukti audit yang dikumpulkan. Dua jenis bahan bukti yang memerlukan biaya tinggi adalah pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Dokumentasi dan prosedur analitis biayanya dalam tingkatan menengah. Tiga jenis bahan bukti yang tidak memerlukan biaya tinggi adalah pengamatan. Pengajuan pertanyaan, dan pelaksanaan ulang. Auditor harus bekerja dalam batas-batas ekonomi agar secara ekonomis dapat bermanfaat dengan biaya yang masuk akal sehingga pendapat dapat dirumuskan dengan tepat dan dengan jangka waktu yang tepat pula.

Bennett et al. (2015) menyatakan bahwa bukti audit harus mendapat perhatian auditor dari tahap perencanaan audit hingga akhir proses audit. Mempertimbangkan bahwa pendapat yang dikeluarkan oleh auditor harus dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi, bukti audit memiliki implikasi untuk kualitas audit. Selain itu Pintasari (2016), juga menyatakan bahwa bukti audit dapat membantu auditor untuk dapat menghasilkan hasil audit yang bebas dari penyimpangan dan memenuhi standar auditing yang ditetapkan. Semakin andal bukti yang dikumpulkan oleh auditor, semakin berkualitas hasil audit akan meningkat.

Semua audit teknik dan prosedur diturunkan dari konsep bukti. Ini membantu auditor dalam memahami jenis bukti yang tersedia dalam situasi audit, mengumpulkannya melalui berbagai teknik audit dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaiannya untuk mendukung data akuntansi. Dengan demikian, bukti audit akan memiliki dampak yang pasti pada pikiran auditor untuk sampai pada penilaian profesionalnya (Bukti Audit: Arti, Definisi, dan Kepentingannya). "Bukti audit mengacu pada informasi atau data yang digunakan oleh auditor sebagai bagian dari pekerjaan audit mereka untuk

menyimpulkan pendapat mereka apakah laporan keuangan disiapkan atau tidak dalam semua material menghormati dan oleh kerangka keuangan yang berlaku. Jumlah dan jenis bukti audit yang dipertimbangkan sangat bervariasi berdasarkan pada jenis perusahaan yang diaudit serta yang diperlukan ruang lingkup audit (Kenton, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Appelbaum, D., Kogan, A., & Vasarhelyi, M. A. (2017). Big data and analytics in the modern audit engagement: Research needs. In *Auditing* (Vol. 36, Issue 4, pp. 1–27). American Accounting Association. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51684>
- Arens dan Loebbecke. (2003). *Auditing Pendekatan Terpadu* (Indonesia). Salemba Empat.
- Arens dkk Diterjemahkan oleh tim Dejacarta. (2003). *Auditing dan Pelayanan Verifikasi*. (Diterjemahkan oleh tim Dejacarta, Ed.; 9th ed.). PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Arens et al. (2008). *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach* (12th ed.). Pearson Education International, Inc.
- Bennett, G. B., Hatfield, R. C., & Stefaniak, C. (2015). The Effect of Deadline Pressure on Pre-Negotiation Positions: A Comparison of Auditors and Client Management. *Contemporary Accounting Research*, 32(4), 1507–1528. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12121>
- Elder, R. W., Lawrence, B., Ferguson, A., Naimi, T. S., Brewer, R. D., Chattopadhyay, S. K., Toomey, T. L., & Fielding, J. E. (2010). The Effectiveness of Tax Policy Interventions for Reducing Excessive Alcohol Consumption and Related Harms. In *American Journal of Preventive Medicine* (Vol. 38, Issue 2, pp. 217–229). <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2009.11.005>
- Kenton, W. (2019). Corporate Finance & Accounting. In *Investopedia*. <https://www.investopedia.com/terms/a/auditing-evidence.asp>
- Konrath, L. F. (2002). *Auditing: A Risk Analysis Approach* (5th ed.). South-Western Pub, Cincinnati, Ohio, U.S.A.
- Mulyadi. (2014). *Auditing* (6th ed., Vol. 1). Salemba Empat.

- Pintasari, D. (2015). Pengaruh Kompetensi Auditor, Akuntabilitas dan Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Yogyakarta. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–155.
- Yin, X. (2019). Audit Evidence Concept, Classification and Collection Techniques in China and the US. In *Global Journal of Management and Business Research: D Accounting and Auditing* (Vol. 19).

BAB 10

PERENCANAAN AUDIT

Oleh Rida Ristiyana

10.1 Pendahuluan

Auditing merupakan bagian penting dari proses manajemen di suatu perusahaan. Dalam menjalankan proses audit dibutuhkan perencanaan audit (*audit plan*) yang *didesain* sebagus mungkin supaya tujuan dari pelaksanaan audit itu sendiri tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Perencanaan audit adalah langkah awal yang dilalui seorang auditor sebelum melakukan aktivitas audit. Audit dianggap sebagai proses pemeriksaan sistematis atas penyajian laporan keuangan perusahaan yang dilakukan guna mendeteksi adanya kecurangan/kesalahan serta untuk menjamin apakah laporan yang disajikan sudah wajar.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan dari pentingnya fungsi audit, perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperiksanya laporan keuangan oleh auditor independen menjadi suatu keharusan, guna memastikan apakah laporan yang disajikan sudah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Yang Berterima Umum (PABU) di Indonesia. Perencanaan audit ini sebagai pedoman dalam melaksanakan audit, diharapkan sistem pengendalian manajemen dapat mudah dikelola dan dimonitoring secara baik.

10.2 Definisi Perencanaan Audit

Perencanaan audit adalah bagaimana menentukan strategi audit secara menyeluruh dan menyusun rencana audit. Jika rencana berjalan dengan lancar akan mampu memberikan manfaat bagi auditor dalam menyelesaikan permasalahan secara tepat waktu (Agoes, 2018). Pengertian perencanaan audit secara umum adalah prosedur yang dijalankan setelah proposal *diapprove* atau perikatan audit sudah ditandatangani. Perencanaan audit merupakan jembatan dalam melakukan pengujian, didalamnya berupa pengembangan strategi menyeluruh dan lingkup audit yang sudah ditentukan. Pada perencanaan ini yang menyusun adalah auditor bermula dari awal perikatan hingga memperoleh hasil audit.

10.3 Fungsi dan Tujuan Perencanaan Audit

Sebelum melakukan pekerjaan audit, tim audit internal harus terlebih dahulu merancang rencana audit secara sistematis. Fungsi dari perencanaan audit adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan audit
- b. Bagian dari pokok anggaran
- c. Sebagai saran dalam mendapatkan partisipasi pihak manajemen
- d. Alat dalam menentukan standar
- e. Sebagai alat pengendalain
- f. Sebagai pertimbangan bahan kompensasi bagi editor yang dipekerjakan oleh perusahaan

Menurut *International Standards on Auditing* (ISA) 300-tujuan merencanakan audit laporan keuangan dalam Hayes (Agoes, 2018) adalah agar program audit terlaksana secara efektif dan auditor perlu menetapkan strategi auditnya secara menyeluruh yang mengatur cakupan, waktu dan arah dari

audit, hingga menuntun pada pengembangan perencanaan audit. Tujuan dari perencanaan audit adalah untuk meyakinkan tipe dan jumlah bukti audit serta penyelidikan yang dibutuhkan untuk memberi auditor kepercayaan bahwa tidak ada salah saji secara material pada laporan keuangan yang telah disajikan.

10.4 Metode Pemilihan *Auditee*

Perencanaan audit biasanya disiapkan setelah auditornya ditunjuk., sedangkan perusahaan yang diaudit adalah unit suatu organisasi atau instansi lain/bagian atau operasi/program yang didalamnya terdapat proses, kegiatan hingga kondisi tertentu yang akan diaudit. Proses pemilihan auditee dibedakan menjadi :

1. Seleksi Sistematis

Audit Internal menyiapkan rencana audit tahunan untuk audit yang kemungkinan akan dilakukan. Jadwal biasanya dibuat dengan mempertimbangkan risiko, auditor potensial berisiko tinggi diprioritaskan dalam proses seleksi.

2. *Ad Hoc Audit*

Cara ini dengan mengumpamakan bisnis terkadang tidak sesuai dengan rencana yang dijalankan, sehingga dewan/manajemen perlu melibatkan auditor internal guna meninjau kegiatan fungsional tertentu yang sekiranya dianggap masalah. Dengan cara ini juga dewan pengawas selektif dalam memilih badan yang diaudit.

3. Permintaan dari Entitas yang diaudit

Terkadang auditor eksternal membutuhkan data dan informasi dari auditor internal guna menilai kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang nantinya berujung ke dampaknya pada operasi yang diawasi. Hal ini yang membuat adanya peninjauan, namun auditor internal perlu melihat aspek risiko dan prioritas.

10.5 Hal-Hal Yang Perlu di Pertimbangkan Dalam Merencanakan Audit

Dalam merencanakan kegiatan audit, para auditor perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu (Agoes, 2018):

- a. Permasalahan yang berhubungan dengan satuan unit usahanya atau perusahaan yang beroperasi didalamnya.
- b. Tata cara dan program akuntansi pada satuan usaha tercatat.
- c. Teknik yang ditentukan pada satuan usaha guna mengelola informasi akuntansi yang substansial, mengeloal informasi mengenai akuntansi pokok perusahaan yang termasuk kedalam penggunaan organisasi jasa.
- d. Menentukantingkat risiko penanganan yang telah direncanakan.
- e. Tingkat materialitas harus dipertimbangkan untuk tujuan audit.
- f. Diperlukannya pos penyesuaian laporan keuangan.
- g. Diperlukannya penggantian pengujian audit dan perluasan terhadap risiko kesalahan atau ketidaksesuaian materialitas atau transaksi antara pihak yang memiliki hubungan *special*.
- h. Laporan audit diharapkan di tunjukan kepada pemberi tugas (seperti laporan khusus yang mendeskripsikan kepatuhan klien terhadap perjanjian atau kontrak).

10.6 Tata Cara Perencanaan, Pengawasan dan Penyusunan Laporan Rencana Audit

Auditor dapat meninjau tata cara dalam merencanakan dan mengawasi termasuk pada catatan auditot yang berkorelasi dengan satuan unit usaha hingga dialog dengan staf pada kantor akuntan dan pegawai usaha. Tata cara tersebut yaitu :

- a. Memeriksa arsip korespondensi, laporan keuangan, arsip permanen, laporan audit tahun lalu hingga kertas kerja.
- b. Membahas permasalahan yang berdampak pada audit atas jasa non audit untuk satuan unit usaha hingga staf kantor akuntan
- c. Mengutarakan pertanyaan mengenai perkembangan usaha saat ini yang akan berimbas pada satuan usaha.
- d. Memeriksa laporan keuangan pada tahun berjalan
- e. Melakukan pembicaraan dengan manajemen atau dewan komisaris mengenai tipe audit dan waktu audit.
- f. Memonitoring pengaruh diimplementasikannya standar auditing dan pernyataan standar auditing yang ditentukan oleh IAI.
- g. Memimpin bantuan dari pegawai menyiapkan data pada satuan unit usaha.
- h. Menetapkan luasnya keikutsertaan jika terdapat auditor intern, konsultan atau spesialis.
- i. Dibuatnya *schedule* pekerjaan/aktivitas audit.
- j. Menetapkan dan memimpin kepentingan bagi staf audit.
- k. Melakukan diskusi yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap perlu dengan pihak pemberi tugas dalam menentukan tujuan perusahaan dan memperoleh informasi tambahan.

Adapun tata cara dalam menyusun laporan rencana audit yaitu :

1. Pemahaman yang didapat mengenai entitas lingkungannya, termasuk internal kontrolnya.
2. Menetapkan risiko salah saji metrial laporan keuangan.
3. Menentukan materialitas.
4. Buat rencana memorandum dan audit program yang berisi jawaban terhadap risiko yang sedang dihadapi.

Auditor harus membuat rencana audit segera setelah kontrak audit disetujui oleh klien. Isi rencana audit meliputi (Setiadi, 2019): (1). Masalah klien; (2). Hal yang mempengaruhi klien; (3). Perencana kerja auditor.

10.7 Tahap Awal Perencanaan Audit

Adapun tahap awal pada perencanaan audit dapat dilakukan dengan :

Kontak klien dan penerimaan melakukan tinjauan memperoleh klien

Kontak awal ketika prospek meminta tinjauan dan setelah permintaan telah diajukan auditor harus mengevaluasi apakah permintaan diterima. Hal yang harus dipertimbangkan yaitu (Arens *et al.*, 2015) :

- a. Kontak pertama dengan klien
Entitas sering kali memeriksa reputasi kantor akuntan dan biaya serta manfaat dari layanan yang mereka berikan. Reputasi dibangun melalui kualitas pekerjaan dan pengakuan dari klien, bankir, kreditur, pengacara dan organisasi bisnis berpengaruh lainnya. Biasanya, prospek meminta surat rekomendasi dari auditor. Proposal biasanya mencakup berbagai jenis informasi tentang kantor akuntan, proposal audit dan biaya jasa audit.
- b. Menerima klien
Kebanyakan auditor ingin memperoleh klien baru dan mempertahankan klien yang sudah ada, tetapi auditor harus berhati-hati sebelum menerima dan melanjutkan hubungan dengan klien. Kantor akuntan tidak diharuskan menerima semua klien potensial. Auditor perlu menilai apakah menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien meningkatkan risiko bisnis

auditor atau bahkan merusak citra dan reputasi kantor akuntan.

c. Pertimbangan Pengendalian Mutu

Kantor akuntan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menyelidiki klien potensial sebelum menerima audit dan untuk mengevaluasi secara berkala kelangsungan audit klien. Kebijakan dan prosedur penerimaan dan retensi klien penting karena kantor akuntan harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari bergaul dengan klien yang *management*-nya tidak memiliki kelengkapan.

d. Integritas dari Direksi

Tanggung jawab utama auditor merupakan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atas laporan keuangan selaras dengan PABU. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang membutuhkan pikiran yang mempertanyakan serta mengevaluasi secara kritis dari bukti audit. Hal ini bukan berarti manajemen dianggap tidak berintegritas.

e. Berkomunikasi dengan auditor pendahulu

Auditor pengganti bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi dengan auditor pendahulu tentang hal-hal yang akan membantu auditor pengganti memutuskan apakah akan menerima kontrak atau tidak. Karena auditor secara etis dilarang mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan klien, auditor pengganti harus meminta izin kepada manajemen calon klien, auditor pendahulu sepenuhnya menanggapi permintaan auditor pengganti. Jika calon klien enggan untuk mengotorisasi komunikasi dengan auditor pendahulu, auditor pengganti harus secara serius mempertimbangkan implikasi dari keputusan mereka untuk menerima atau menolak perikatan. dan seterusnya.

f. **Ketentuan Biaya**

Kantor akuntan sering dikonsultasikan tentang perkiraan biaya . audit. Perkiraan biaya jasa audit adalah penerapan biaya harian atau per jam kantor akuntan untuk waktu audit yang dijadwalkan. Karena jam kerja yang tepat tidak dapat ditentukan sebelumnya, auditor independen sering memberikan perkiraan kasar jumlah biaya layanan yang mereka tetapkan.

g. **Kemampuan Audit**

Kemampuan untuk diaudit. Meskipun pedoman otoritatif tentang penilaian kemampuan untuk diaudit terbatas, akuntabilitas dan kompetensi profesional mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan integritas manajemen (penting bagi kesiapan auditor untuk melakukan audit apa pun) dan sistem akuntansi yang sesuai.

h. **Surat komitmen**

Setelah memutuskan untuk menerima klien, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengirimkan surat komitmen kepada klien untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian yang akan dilakukan dan untuk menentukan kesepakatan antara pendengar dan klien. Perikatan audit harus mencapai tujuan berikut:

- a. Catat kewajiban kontraktual yang disepakati oleh auditor dan klien.
- b. Menjelaskan tanggung jawab auditor dan klien.
- c. Melindungi auditor dari kewajiban hukum.
- d. Memberikan pemahaman kepada auditor tentang sifat audit.

Rencana Umum

Setelah menerima kontrak audit, auditor mulai merencanakan keseluruhan rencana audit. Langkah ini harus diambil di awal tahap audit sehingga audit dapat menilai risiko dan merencanakan audit. Pada tahap perencanaan keseluruhan,

auditor mempertimbangkan kemungkinan salah saji material, melakukan penilaian materialitas awal dan melakukan prosedur analitis. Adapun rencana umum yang dilakukan sebagai berikut :

1) Pengetahuan tentang bisnis klien

Pengetahuan tentang bisnis klien yang perlu diperoleh auditor diantaranya struktur organisasi dan aktivitas dan struktur hukum termasuk, pengetahuan tentang operasi, tinjauan hasil penilaian sebelumnya, tinjauan terhadap catatan penduduk tetap, kunjungan perusahaan ke pangkalan dan pekerjaan kantor. Sebab auditor perlu memahami bisnis klien, karena (Agoes, 2018):

- a) Bidang yang sekiranya butuh perhatian khusus dibutuhkan identifikasi
- b) Dapat mengukur keadaan dengan berbasis data akuntansi yang diperoleh, diolah hingga diperiksa dan dikumpulkan
- c) Menilai kewajaran estimasi, contoh: monitoring terhadap *inventory*, penyusutan, piutang ragu-ragu dll
- d) Menilai kewajaran dari representasi manajemen
- e) Meninjau standar akuntansi apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan hingga pada kecukupan dan pengungkapannya.

2) Pengetahuan industri klien

3) Identifikasi pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan, yaitu :

- a. Pemilik utama, manajer, dan anggota keluarga manajemen klien.
- b. Perusahaan afiliasi klien.
- c. Perwakilan lembaga yang didirikan atas nama karyawan, seperti: keluarga dekat klien, manajemen, pemilik utama, perusahaan afiliasi klien, badan yang dibentuk untuk perwakilan karyawan, entitas

dengan kepentingan ekuitas yang dicatat oleh klien dengan metode ekuitas.

d. Auditor Internal Auditor internal dapat mempengaruhi audit dalam dua cara. (1). Auditor internal dapat memperkuat pengendalian internal; (2). membantu auditor independen dalam melakukan prosedur audit tertentu.

e. Prosedur analitis

Tanpa pengetahuan tersebut, auditor tidak dapat mengembangkan prosedur analitis yang tepat atau mengevaluasinya dengan tepat. Tujuan prosedur analitis meliputi: alat auditor untuk perencanaan sifat dan luas prosedur pemeriksaan lain, merupakan pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti atas dasar konfirmasi tertentu mengenai saldo akun atau jenis transaksi, tinjauan mendalam atas informasi keuangan dalam tinjauan audit akhir.

Tahapan prosedur analitis, meliputi :

1. Menentukan perhitungan atau membandingkan dengan apa yang akan dilakukan.
2. Ekspektasi dikembangkan.
3. Melakukan perhitungan atau perbandingan.
4. Analisis dan mencatat perbedaan yang signifikan.
5. Menganalisis perubahan yang signifikan dan tidak terduga dan perbedaan tersebut harus di evaluasi.
6. Memastikan akibat dari prosedur analitis terhadap perencanaan audit.

10.8 Unsur-Unsur Rencana Audit

Ruang lingkup rencana audit ini akan beragam berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitas masalah auditee dan pengetahuan tentang sifat bisnis auditee. Unsur-unsur rencana audit adalah (Agoes, 2018):

Rencana Awal

Ini termasuk menentukan alasan untuk mengaudit klien, apakah akan menerima atau menolak klien baru dan yang sudah ada, menentukan alasan untuk mengaudit klien, dan mengidentifikasi personel yang terlibat Berkaitan dengan informasi tentang apa untuk menentukan penugasan, dan memperoleh surat penugasan, Perencanaan awal meliputi:

a) **Penyaringan klien baru**

Penyaringan klien baru sebelum menerima atau menolak klien . hal ini di lakukan dengan menilai prospek klien pada stabilitas keuangan, hubungan klinen dengan kantor akuntan sebelumnya dan prospekk klien di lingkungan bisnis.

b) **Melanjutkan klien lama**

Jika ingin meneruskan perlu dievaluasi untuk menentukan apakah dilanjutkan/tidak. Alasan untuk tidak melanjutkan audit terletak pada perselisihan dan litigasi sebelumnya oleh perusahaan audit

c) **Mengidentifikasi alasan audit klien, tujuan penggunaan.**
Auditor dapat mencari bukti audit tambahan jika laporan telah didistribusikan secara luas.

d) **Staf tugas mengidentifikasi staf tugas yang tepat sangat penting guna melengkapi kriteria audit yang sudah ditentukan dan efisiensi audit menjadi meningkat.** Saat melamar suatu posisi, ketahuilah bahwa orang yang ditugaskan pada posisi tersebut harus terbiasa dengan industri klien.

- e) Memperoleh kontrak harus dibuat secara tertulis, karena tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman. Kontrak adalah kesepakatan antara KAP dan klien, dan isi kontrak mencakup daftar batasan kontrak, tenggat waktu, bantuan/ detail rincian yang sudah ditentukan oleh tim audit.

Mendapat informasi latar belakang tentang klien Audit

Memperoleh informasi tentang karakteristik lingkungan dari kegiatan yang diaudit perusahaan klien untuk membantu dalam menentukan kontrak atau apakah prosedur verifikasi khusus diperlukan. Memperoleh informasi untuk memahami konteks pelanggan dapat mencakup tinjauan lokasi untuk pabrik dan kantor, tinjauan kebijakan pokok perusahaan, identifikasi pihak yang memiliki hubungan terkait, dan keperluan akan tenaga ahli dari luar.

Melakukan Langkah Analisis Awal

Melakukan langkah analisis awal sangat penting untuk melakukan pemeriksaan. Karena dapat menjelaskan keseluruhan kegiatan penelitian. Teknik analitis ini termasuk memahami lini bisnis klien, menentukan kemampuan lini untuk tetap menguntungkan, mengidentifikasi potensi kesalahan pada laporan keuangan serta meminimalisir pengujian mendalam.

Mengidentifikasi Materialitas dan Menentukan Risiko Audit yang dapat diterima

Tingkat salah penyajian informasi akuntansi akan mempengaruhi dalam *decision making*. Tanggung jawab auditor adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Jika auditor yakin bahwa salah saji material telah dibuat, auditor harus memberi tahu klien dan mengoreksinya. Seandainya klien ternyata menolak untuk

mengubah laporan keuangan tahunan, auditor dapat, dengan pengecualian mengeluarkan opini audit.

Terdapat lima tahap dalam menentukan luas pengujian, dan diperlukan untuk menilai hasil dan pelaksanaan pengujian audit. Langkah yang di perlukan diantaranya:

- a. memastikan pertimbangan awal materialitas.
- b. Penetapan peringkat kepentingan awal untuk segmen.
- c. Perkiraan kesalahan total untuk segmen .
- d. Estimasi salah saji gabungan.
- e. Membandingkan antara perkiraan gabungan dengan peringkat kepentingan awal.

Mengembangkan Rencana dan Program Audit yang Menyeluruh

Demi memperoleh pendapat yang pas, auditor harus mewawancarai, melakukan investigasi, dan memverifikasi kebenaran bukti. Untuk memfasilitasi implementasi, auditor harus menyiapkan program prosedur audit yang sudah di *plan* dengan logis untuk setiap audit.

10.9 Prosedur Perencanaan Audit

Menurut (Arens *et al.*, 2015) ada 8 prosedur yang dilakukan dalam perencanaan audit, yaitu :

1. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit

Terdapat 4 hal yang harus dikerjakan oleh auditor saat merencanakan audit awal, yaitu :

- a) Mengambil keputusan dengan menerima klien baru atau lanjut dengan yang sudah lama (perikatan baru/lama)
- b) Identifikasi klien mengapa meminta kita untuk dilakukan audit karena ini berdampak pada proses mendatang

- c) Melengkapi syarat penugasa yang telah ditentukan oleh klien
 - d) Mengembangkan cara/strategi audit menyeluruh dengan membuat tim yang ahli dibidangnya.
2. Memahami bisnis dan industri klien
Terdapat aspek pendekatan guna memahami bisnis serta industri klien, yaitu : industri serta lingkungan eksternal, operasi serta proses bisnis, manajemen serta tata kelola, strategi serta tujuan klien, yang terakhir adalah ukuran serta kinerja.
 3. Menilai risiko bisnis klien
Sebagai auditor perlu mengetahui strategi bisnis klien dan memeriksanya guna menilai risiko yang nantinya akan terjadi.
 4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan
Tujuan dari prosedur analitis pendahuluan dibedakan menjadi: prosesur analitis awal, prosedur analitis substantif dan prosedur analitis akhir.
 5. Menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang diterima serta risiko inheren
Pada Langkah ini dibedakan menjadi 2 yaitu : menetapkan tingkat materialitas awal dan melihat risiko audit yang sekiranya akan terjadi dan risiko bawaan.
 6. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
Demi mencegah adanya tindakan salah saji secara material pada laporan keuangan perlu diterapkan sistem pengendalian internal. Scope pengendalian adalah komponen dari pengendalian internal yang didalamnya meliputi: penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi serta komunikasi hingga pemantauan.

7. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan

Auditor harus mengumpulkan banyak informasi guna mendeteksi tingkat kecurangan saat rencana audit sedang berlangsung dan mengupdate penilaian tersebut selama proses audit. Informasi saat menilai risiko bisa ditemukan saat berkunjung ke klien dan dari mengidentifikasi pihak yang saling terkait.

8. Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan

Dalam proses perencanaan audit bagi asersi individual atau golongan transaksi, seorang auditor boleh memilih strategi audit awal yaitu : *primarily substantive approach* dan *lower assessed level of control risk approach*.

10.10 Isi Perencanaan Audit

Adapun isi dari perencanaan audit meliputi :

- 1) Masalah klien Identifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus.
 - a) Mengevaluasi kondisi di mana data akuntansi dihasilkan, diproses, ditinjau, dan dikumpulkan dalam suatu organisasi.
 - b) Mengevaluasi validitas perkiraan yang di kumpulkan dalam organisasi.
 - c) Penilaian persediaan, penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, tingkat penyelesaian kontrak jangka panjang.
 - d) Mengevaluasi ketidakberpihakan perwakilan perusahaan, mempertimbangkan ketepatan prinsip akuntansi yang digunakan dan ketepatan pengungkapan.
- 2) Faktor yang berdampak pada klien dapat berupa berita bisnis, majalah ekonomi, surat kabar, ekonomi dan

keuangan Indonesia. Misalnya: adanya peraturan baru yang dapat mempengaruhi pelanggan.

- 3) *Work plan* auditor, hal-hal penting meliputi:
 - a. Daya guna yang maksimal bagi organisasi.
 - b. Waktu pemeriksaan yang terdiri dari kapan mulainya waktu pemeriksaan, kapan tenggat waktu pemeriksaan, dan budget biaya pemeriksaan dan jumlah jam kerja pemeriksaan serta butuh waktu lama tidak untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. Jenis jasa yang di berikan, seperti audit umum, audit khusus, bantuan administrasi, menyusun laporan laba rugi, neraca, dan perpajakan.

10.11 Penilaian Resiko Perencanaan Audit

Rencana audit perlu dikembangkan lebih lanjut dengan melihat risiko yang sudah dilalui oleh organisasi yang sudah diaudit. Dengan demikian, auditor internal harus mampu menilai risiko ketika merancang program audit dan asesor perlu memahami proses dan alat yang nantinya digunakan pada penilaian risiko. Yang dimaksud penilaian risiko adalah mengidentifikasi serta menganalisa apa saja risiko yang akan terjadi guna sebagai dasar mengelola risiko tersebut demi tercapainya tujuan. Penilaian risiko ini menjadi penting karena aspek ekonomi, industri dan peraturan hingga kebutuhan operasional organisasi yang terus berubah. Perubahan tersebut diantaranya :

- a. Munculnya peraturan baru bidang pajak, tenaga kerja serta ekspor dan impor
- b. Datangnya pesaing baru saat perusahaan sedang beroperasi
- c. Hadirnya produk baru yang dikenalkan oleh pesaing yang merupakan bagian dari pengendalian internal.

- Akibatnya manajemen perlu menilai risiko dan meimplementasikan proses formal/kontrol yang ketat
- d. Penggunaan teknologi yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. 2018. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. 5 Hal.204-. Edited by E. S. Suharsi. Jakarta: Salemba Empat. Available at:
<https://onesearch.id/Record/IOS5164.slims-10721>.
- Arens, A. *et al.* 2015. *Auditing and Assurance Services, Pendekatan Terintegrasi*. 15th edn. Jakarta: Erlangga. Available at:
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=985799>.
- Setiadi. 2019. *Pemeriksaan Akuntansi (Teori dan Praktek)*. 1 Hal.67. Yogyakarta: Bening Pustaka.

BAB 11

PROSEDUR ANALITIS

Oleh Arnadi Chairunnas

11.1 Pendahuluan

Sebagai pendahuluan dalam bab 11, seorang auditor perlu melaksanakan prosedur analitis awal sebagai bagian dari prosedur untuk penilaian risiko. Prosedur ini juga bertujuan untuk lebih memahami kondisi bisnis maupun industri pada klien, dan untuk menilai risiko bisnis yang dihadapi klien. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan yaitu membandingkan rasio yang dimiliki klien dengan tolok ukur industri atau pesaing yang sifatnya homogen ataupun heterogen. Hal ini dilakukan untuk memberikan indikasi maupun gambaran mengenai kinerja perusahaan. Tes pendahuluan semacam itu dapat mengungkapkan perubahan rasio yang tidak biasanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, atau rata-rata industri, sehingga membantu auditor dalam melakukan identifikasi area dengan peningkatan risiko salah saji yang memerlukan perhatian lebih lanjut selama kegiatan audit berlangsung.

11.2 Defenisi Prosedur Analitis

Analytical Procedures is one such procedure compares client ratios to industry or competitor benchmarks to provide an indication of the company's performance(Arens, 2016). Melalui defenisi diatas, dapat dipahami bahwa prosedur analitis merupakan sebuah prosedur yang membandingkan rasio yang dimiliki klien dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Prosedur analitis ini tentunya akan sangat berguna bagi auditor dalam hal pelaksanaan audit secara keseluruhan. Prosedur analitis digunakan dalam hal identifikasi terhadap jenis transaksi tertentu, dan dapat juga dijadikan dasar untuk menentukan perhatian khusus auditor dalam mendeteksi kemungkinan salah saji material. Seorang auditor ketika akan mendesain serta melaksanakan prosedur analitis substantif, perlu diperhatikan mengenai:

- a. Seorang auditor memerlukan logika berpikir untuk mencocokkan prosedur analitis pada asersi manajemen yang ada. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya risiko salah saji material yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Auditor perlu melakukan evaluasi terhadap validitas data yang diberikan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan pengujian rasio terhadap asersi.
- c. Pengembangan pada poin b, selanjutnya akan dievaluasi kembali terkait tingkat akurasi dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji yang material.
- d. Melihat perbedaan antara pencatatan yang dilakukan dengan materialitas kewajaran saldo.

11.3 Jenis Prosedur Analitis

Prosedur analitis merupakan tahapan pemeriksaan setelah mempelajari operasional bisnis dari klien. Prosedur analitis yang digunakan auditor, melalui perbandingan antara data yang dimiliki klien, dengan data berikut:

1. Data industri sejenis
2. Data yang sama pada periode yang lampau
3. Hasil dari perkiraan yang ditentukan klien
4. Hasil dari perkiraan yang ditentukan oleh auditor
5. Hasil dari perkiraan yang menggunakan data non keuangan.

Prosedur pengujian substantif yang dilaksanakan pada tingkatan asersi manajemen, umumnya berupa pengujian detail saldo dan prosedur analitis substantif, atau bisa juga berupa gabungan keduanya. Pemilihan prosedur yang dilaksanakan akan sangat tergantung dari penilaian risiko audit pada tingkat asersi manajemen yang biasanya dapat kita lihat pada efektifitas maupun efisiensi dari prosedur yang diterapkan. Prosedur analitis berupa pengujian detail saldo tidak akan dibahas lebih lanjut. Pengujian detail saldo terkait cara memastikan saldo akhir masing-masing akun valid dan reliabel, sehingga dapat terbebas dari salah saji yang sifatnya material.

Prosedur berikutnya adalah mengenai prosedur substantif analitis. Prosedur substantif analitis yang umumnya digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. *Short-Term Debt-Paying Ability*
- b. *Liquidity Activity Ratios*
- c. *Ability to Meet Long-Term Obligations*
- d. *Profitability Ratios*

11.3.1 Short-Term Debt-Paying Ability

Pengujian substantif analitis yang pertama yaitu menggunakan *short-term-debt-paying ability* atau lebih dikenal dengan istilah rasio likuiditas. Menurut (Hidayat, 2018) rasio likuiditas merupakan jenis rasio untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek sebelum waktu jatuh temponya. Adapun turunan dari rasio likuiditas yang umumnya digunakan sebagai berikut:

1. Current Ratio

Current Ratio atau lebih dikenal dengan istilah rasio lancar merupakan jenis rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menutupi kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Secara sederhana, rasio ini akan memberikan gambaran kepada pihak berkepentingan terkait kondisi

perusahaan dalam perspektif aset dan kewajiban lancarnya. Formula yang digunakan dalam melakukan perhitungan ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \text{Aset lancar} / \text{Kewajiban}$$

2. *Quick Ratio*

Quick Ratio yang bisa disebut dengan rasio cepat. Rasio ini dipandang lebih mampu dijadikan sebagai tolok ukur untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Mekanisme perhitungan rasio ini memasukkan persediaan dalam formulasinya. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung rasio cepat (*quick ratio*):

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Aset lancar} - \text{Persediaan}) /$$

3. *Cash Ratio*

Cash Ratio juga dikenal dengan nama lain rasio kas. Rasio kas juga melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Perbedaannya terletak pada fokus perbandingan yang digunakan, yaitu untuk rasio ini menggunakan kas atau setara kas yang dibandingkan dengan kewajiban lancarnya. Rasio kas dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{Cash Ratio} = (\text{Kas} + \text{Setara Kas}) / \text{Kewajiban}$$

11.3.2 *Liquidity Activity Ratio*

Pengujian substantif yang selanjutnya bisa dilakukan dengan menggunakan *liquidity activity ratio*. Rasio ini

merupakan gambaran dari kemampuan perusahaan dalam pemanfaatan kekayaannya untuk menghasilkan keuntungan/laba. Ada beberapa rasio aktivitas yang umum digunakan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Perputaran Total Aset

Rasio perputaran total aset merupakan salah satu jenis dari lingkup rasio aktivitas. Kegunaan dari rasio ini adalah melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui total aset/kekayaan yang dimilikinya. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Perputaran Total Aset} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio Perputaran Aset Tetap

Rasio perputaran aset tetap adalah jenis rasio yang diperlukan untuk menggambarkan kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh pendapatan menggunakan aset tetapnya. Formulasi yang digunakan dalam perhitungan adalah:

$$\text{Perputaran Aset Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rerata Aset Tetap}}$$

c. Rasio Perputaran Modal Kerja

Rasio perputaran modal kerja adalah pengukuran yang dilakukan dengan berfokus pada perbandingan penjualan dengan modal kerja yang dibutuhkan. Rumus untuk menghitung perputaran modal kerja adalah :

$$\text{Perputaran Modal Kerja} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Rerata Modal Kerja}}$$

d. Rasio Perputaran Persediaan

Rasio selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Kegunaan dari perhitungan rasio ini untuk melihat waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam satu siklus penghabisan persediaan. Formulasi yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \text{HPP Produk} / \text{Rerata}$$

e. Rasio Perputaran Piutang

Rasio berikutnya yaitu rasio perputaran piutang perusahaan. Piutang merupakan salah satu aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga harus dibarengi dengan pengendalian yang memadai. Rasio perputaran piutang dapat dilihat dengan membandingkan antara pendapatan yang dihasilkan dengan rata-rata piutang yang diberikan. Berikut adalah rumus yang biasa digunakan untuk menghitung rasio perputaran piutang:

$$\text{Perputaran Piutang} = \text{Pendapatan} / \text{Rerata Piutang}$$

f. Rasio Perputaran Utang

Rasio terakhir yang akan dibahas yaitu rasio perputaran utang. Perhitungan yang digunakan dalam rasio ini yaitu membandingkan antara pembelian dengan rata-rata utang yang dimiliki perusahaan. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Perputaran Utang} = \text{Pembelian} / \text{Rerata Utang}$$

11.3.3 *Ability to Meet Long-Term Obligations*

Ability to meet long-term obligations lebih dikenal dengan rasio solvabilitas. Rasio ini terkait kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemampuan ini diukur dengan jaminan aset yang dimiliki oleh perusahaan akan dibandingkan dengan total hutangnya. Beberapa jenis rasio solvabilitas yang lazim digunakan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Hutang terhadap Ekuitas

Rasio yang pertama dibahas adalah perbandingan antara total hutang dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Perbandingan yang ideal antara hutang dan ekuitas untuk memperoleh aset, dapat ditemukan melalui perhitungan rasio ini. Berikut ini merupakan rumus menghitungnya:

$$\text{Rasio Hutang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

b. Rasio Hutang terhadap Aset

Rasio hutang terhadap aset dapat digunakan untuk melihat proporsi hutang yang digunakan untuk membeli atau memperoleh aset perusahaan. Rasio ini juga akan memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang baru, karena berhubungan dengan aset yang biasanya akan dijadikan agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak perbankan. Berikut adalah rumus perhitungannya:

$$\text{Rasio Hutang terhadap Aset} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c. Rasio beban bunga hutang

Rasio terakhir yang umumnya digunakan adalah perbandingan antara laba/profit perusahaan dalam satu periode dengan beban bunga dari hutang yang dimiliki. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio beban bunga hutang} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Beban bunga}} \times 100\%$$

11.4 Manfaat Prosedur Analitis

Prosedur analitis sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Prosedur analitis yang ditempuh dalam proses pemeriksaan berguna menjadi bukti audit awal yang akan digunakan untuk mempertimbangkan luas uji pemeriksaan audit. Pemilihan prosedur analitis yang tepat, akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan yang dilakukan. Prosedur analitis pada umumnya memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memahami bisnis dan industri milik klien
2. Melakukan identifikasi potensi salah saji dalam laporan keuangan klien
3. Mengurangi luas pengujian terperinci saldo
4. Melakukan penilaian atas masalah-masalah yang terjadi dalam industri klien
5. Menilai peluang keberlanjutan usaha atau operasional bisnis klien.
6. Mengurangi biaya dalam hal pemeriksaan audit, karena memiliki efektivitas yang baik dalam menilai potensi salah saji klien.

Soal untuk Diskusi

1. Prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor menjadi begitu penting untuk dilakukan, karena dapat digunakan untuk mempelajari informasi-informasi yang terkandung di dalam Laporan Keuangan milik klien.

Diminta: Setujukah anda dengan pernyataan diatas? Ungkapkan alasan anda!

2. Seorang auditor ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dagang yang telah menggunakan sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Auditor ini menggunakan prosedur analitis untuk menguji data keuangan kliennya. Setelah melakukan prosedur analitis, ditemukan hal berikut:

- a. Tingkat perputaran piutang klien mengalami penurunan (jumlah hari untuk penagihan meningkat) jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.
- b. Tingkat perputaran persediaan barang milik klien mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Diminta:

- a. Jika anda sebagai auditor yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan itu, hal apa saja yang akan anda sampaikan terkait hasil prosedur analitis yang dilakukan?
- b. Apa ada pengaruh dalam proses pemeriksaan selanjutnya? Jelaskan jawaban anda!

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A. 2016. *Auditing and Assurance Services*. New York: Pearson.
- Hidayat, W. W. 2018. *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

BAB 12

AUDITING KECURANGAN DAMPAK TEHNOLOGI INFORMASI TERHADAP PROSES AUDIT

Oleh Parju

12.1 Pengertian Audit Kecurangan

Kecurangan meliputi segala macam cara yang digunakan oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Tidak ada aturan yang baku dan tetap yang bisa dikeluarkan sebagai proposisi umum dalam mendefinisikan kecurangan, termasuk kejutan, tipu muslihat ataupun cara-cara yang licik dan tidak wajar yang digunakan untuk melakukan penipuan. Batasan satu-satunya dalam mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia.

G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendefinisikan kecurangan “Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver (1993,hal 3)” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan, (2) Penyembunyian dan (3) konversi. Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian

pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut misalnya dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif

Audit kecurangan merupakan upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua ketrampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator

Untuk keberhasilan peran auditor dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan, sebaiknya internal auditor perlu memahami kecurangan dan jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. G.Jack Bologna, Robert J.Lindquist dan Joseph T.Wells mendefinisikan kecurangan “ Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver (1993,hal 3)” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/the act., (2) Penyembunyian/theconcealment dan (3) konversi/the conversion Misalnya pencurian atas harta persediaan adalah tindakan, kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut misalnya dengan membuat bukti transaksi pengeluaran fiktif. Selanjutnya setelah perbuatan pencurian dan penyembunyian dilakukan, pelaku akan melakukan konversi dengan cara memakai sendiri atau menjual persediaan tersebut.

Kecurangan dapat dikelompokkan dalam dua tipe yaitu, eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar pada suatu perusahaan, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan pada perusahaan; wajib pajak pada pemerintah. Kecurangan

internal adalah tindakan ilegal dari karyawan, manajer dan eksekutif pada perusahaan tempat ia bekerja.

Pencegahan Kecurangan merupakan peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan berupaya menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Pencegahan terjadinya suatu perbuatan curang lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila :

- a. Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan.
- d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- e. Pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan , biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.
- f. Industri dimana perusahaan menjadi bagiannya, memiliki sejarah atau tradisi kecurangan

12.2 Jenis-Jenis Kecurangan

Suatu asosiasi di USA, *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE2000), mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan,

mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Kecurangan Laporan Keuangan, Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.
- b. Penyalahgunaan aset, Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'Kecurangan Kas' dan 'Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya', serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang.
- c. Korupsi, korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian illegal, dan pemerasan.

Menurut Alvin Arens, Randal J Elder dan Mark S Beasley (2014), sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks atas audit laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori utama yaitu pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.

1. Pelaporan Keuangan yang curang

Pelaporan keuangan yang curang adalah salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Sebagai contoh WorldCom Diberitakan telah mengkapitalisasi miliaran dolar sebagai asset tetap, yang seharusnya dibebankan. Pengabaian jumlah kurang lazim dilakukan, tetapi perusahaan dapat

saja melebihi sajikan laba dengan mengabaikan utang usaha dan kewajiban lainnya.

2. Penyalahgunaan Aset

Penyalahgunaan Aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semua jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi pencurian aset perusahaan seringkali mengawatirkan manajemen, tanpa memperhatikan materiitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring berjalannya waktu.

12.3 Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan istilah digunakan untuk menjelaskan teknologi yang membantu kita dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau memberikan informasi. Sistem informasi mengumpulkan dan menyimpan data, mengubah data menjadi informasi yang berguna, dan memberikan informasi kepada pengambil keputusan internal dan eksternal. Untuk informasi berguna, itu harus relevan, dapat diandalkan, lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan merupakan elemen penting yang menunjang efektifitas dan efisiensi proses bisnis perusahaan. Teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan sehingga tercapainya tujuan bisnis perusahaan. Pemanfaatan teknologi informasi harus diiringi dengan pengelolaan yang tepat sehingga dapat meminimalisasi risiko-risiko yang mungkin timbul di dalam proses bisnis.

Penggunaan Teknologi Informasi dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan

mengganti pengendalian yang biasanya dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia. Disaat yang sama, Teknologi Informasi dapat menimbulkan risiko-risiko baru, yang dapat diatasi klien dengan menggunakan pengendalian khusus terhadap sistem Teknologi Informasi.

Tidak ada perbedaan konsep audit untuk sistem Teknologi Informasi yang kompleks maupun sistem pencatatan manual, yang berbeda adalah metode-metode spesifik yang cocok dengan situasi sistem informasi akuntansi yang ada.

12.4 Peranan Teknologi Informasi dalam Pengendalian Internal

Kebanyakan entitas, baik perusahaan besar maupun keluarga berukuran kecil, mengandalkan Teknologi Informasi untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis. Akibat kemajuan Teknologi Informasi, perusahaan yang kecilpun menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk menjalankan fungsi akuntansinya. Fungsi Akuntansi yang menggunakan jaringan Teknologi Informasi yang rumit, internet, dan fungsi Teknologi Informasi terpusat sekarang sudah secara umum dilakukan dimana pun.

Teknologi Informasi diandalkan untuk mencatat dan memproses transaksi bisnis. Akibat kemajuan Teknologi Informasi yang luar biasa, perusahaan yang relatif kecilpun bahkan menggunakan komputer pribadi dengan perangkat lunak akuntansi komersial untuk menjalankan fungsi akuntansinya. Fungsi Akuntansi yang menggunakan jaringan Teknologi Informasi yang rumit, internet, dan fungsi Teknologi Informasi terpusat sekarang sudah merupakan hal yang umum dilakukan.

Perubahan dalam pengendalian internal yang disebabkan oleh integrasi Teknologi Informasi ke dalam sistem akuntansi adalah :

1. *Menyediakan informasi dengan kualitas yang lebih tinggi.* Aktivitas-aktivitas Teknologi Informasi yang kompleks diatur secara efektif karena kompleksitasnya mengharuskan adanya pengaturan, prosedur dan dokumentasi yang efektif
2. *Pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual.* Keunggulan penggunaan Teknologi Informasi adalah kemampuannya untuk menangani transaksi bisnis yang kompleks dalam jumlah yang besar dengan efisien. Karena komputer memproses informasi secara konsisten, sistem Teknologi Informasi dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang dilakukan secara manual dengan pengendalian-pengendalian terprogram yang menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol setiap transaksi yang diproses.

12.5 Dampak teknologi Informasi dalam Proses Audit

Para auditor harus memahami sistem komputer karena sistem ini memiliki dampak yang besar terhadap cara-cara yang dipergunakan organisasi dalam bisnisnya. Sistem yang dikomputerisasi bukanlah semata-mata alat yang baru dipergunakan untuk memproses pekerjaan administrasi. Seringkali, sistem pengendalian internal harus disusun kembali karena karakteristik suatu sistem komputer. Hal ini telah menimbulkan adanya serangkaian kesenjangan pengendalian yang mengakibatkan terbukanya risiko-risiko baru untuk organisasi-organisasi yang menggunakan komputer.

Pengendalian komputer dapat menggantikan pengendalian manual. Memiliki keunggulan dapat mampu menangani transaksi bisnis yang kompleks dengan jumlah besar dengan efisien. Komputer memproses informasi secara

konsisten serta dapat mengurangi salah saji dengan mengganti prosedur yang dilakukannya secara manual dengan pengendalian yang terprogram dengan menerapkan fungsi saling mengawasi dan mengontrol setiap transaksi yang diproses.

Para auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal, mereka harus memiliki pengetahuan mengenai pengendalian umum dan aplikasi, apakah klien menggunakan aplikasi Teknologi Informasi yang sederhana atau yang kompleks. Pengetahuan akan pengendalian umum meningkatkan kemampuan auditor untuk mengukur dan mengandalkan pengendalian aplikasi yang efektif untuk mengurangi risiko pengendalian untuk tujuan audit yang terkait. Bagi auditor perusahaan publik yang harus menerbitkan opini atas pengendalian intrenal terhadap laporan keuangan, pengetahuan terhadap umum maupun pengendalian aplikasi merupakan hal yang penting.

1. Dampak Pengendalian Umum Terhadap pengendalian

Auditor harus mengevaluasi efektivitas pengendalian umum sebelum mengevaluasi pengendalian aplikasi. Pengendalian umum memiliki dampak yang luas terhadap efektivitas pengendalian aplikasi, sehingga auditor harus mengevaluasi pengendalian tersebut terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah pengendalian aplikasinya efektif.

2. Dampak Pengendalian Umum terhadap Aplikasi Sistem Secara keseluruhan.

Pengendalian umum yang tidak efektif menghasilkan potensi salah saji material pada seluruh aplikasi sistem, tanpa melihat kualitas dari setiap pengendalian aplikasi. Sebagai contoh, Jika tugas-tugas Teknologi Informasi dipisahkan dengan tidak memadai, misalnya operator komputer yang juga bekerja sebagai pemrogram dan memiliki akses terhadap program-

program dan arsip-arsip komputer, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya program perangkat lunak atau perubahan arsip data yang tidak diotorisasi dapat menunjukkan adanya transaksi-transaksi fiktif atau data yang tidak sah penghapusan dalam akun-akun seperti penjualan, pembelian dan gaji yang tidak sah. Demikian pula, jika auditor memperhatikan bahwa arsip data tidak di jaga dengan memadai, auditor dapat menyimpulkan terdapat resiko kehilangan data yang signifikan untuk setiap kelompok transaksi yang mengandalkan data tersebut untuk melakukan pengendalian aplikasi.

Di sisi lain, jika pengendalian umum efektif, auditor dapat menempatkan keandalan yang lebih besar pada pengendalian aplikasi. Auditor kemudian dapat menguji pengendalian aplikasi untuk efektivitas operasi dan mengendalikan hasilnya untuk mengurangi pengujian substansif.

3. Dampak Pengendalian Umum Terhadap perubahan Perangkat lunak

Perubahan klien terhadap aplikasi perangkat untuk, memengaruhi kepercayaan auditor terhadap pengendalian otomatis. Ketika klien mengubah perangkat lunaknya, auditor harus mengevaluasi apakah pengujian tambahan diperlukan. Jika pengendalian umum efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak dilakukan.

4. Dampak dari Pengendalian Teknologi Informasi Terhadap risiko Pengendalian dan Pengujian substansif.

Menghubungkan Pengendalian Teknologi Informasi dengan Tujuan Audit Terkait transaksi Biasanya auditor tidak menghubungkan pengendalian dan kekurangan-

kekurangan dalam pengendalian umum kepada tujuan audit terkait transaksi spesifik. Karena pengendalian umum memengaruhi tujuan audit dalam beberapa siklus, jika pengendalian umum tidak efektif, kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk mengurangi resiko pengendalian dalam semua siklus akan menurun. Sebaliknya, jika pengendalian umum efektif, akan meningkatkan kemampuan auditor untuk mengandalkan pengendalian aplikasi untuk semua siklus.

5. Dampak pengendalian Teknologi Informasi Terhadap Pengujian substansif

Setelah mengidentifikasi pengendalian aplikasi spesifik yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor dapat mengurangi pengujian substansif. Sifat sistematis dari pengendalian aplikasi otomatis memungkinkan bagi auditor untuk mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut baik dalam audit atas laporan keuangan.

6. Pengauditan Dalam Lingkungan Teknologi Informasi yang Lebih Kompleks

Ketika organisasi memperluas penggunaan teknologi informasinya, pengendalian internal sering kali dimasukkan kedalam aplikasi-aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Dokumen-dokumen sumber tradisional seperti faktur, permintaan pengendalian, catatan penagihan, dan catatan-catatan akuntansi seperti jurnal penjualan daftar persediaan dan catatan pembantu piutang dagang hanya tersedia secara elektronik, auditor harus mengubah pendekatan audit mereka. Pendekatan ini disebut dengan Pengauditan melalui komputer. Pendekatan pengujian melalui computer, bisa menggunakan ketiga pendekatan berikut.

1) Pendekatan Pengujian data

Dalam pendekatan pengujian data, auditor memproses oengujian data mereka sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian otomatis sudah memproses dan yang di uji dengan tepat. Ketika menggunakan pendekatan pengujian data, auditor memilik tiga pertimbangan berikut :

- a. *Pengujian data harus memasukkan semua kondisi yang ingn di uji oleh auditor.* auditor harus merancang data yang di uji untu menguji semuan pengendalian kuncdi berbasis komputer dan memasukkan data yang relistis yang kemungkinan manjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi yang sah dan tidak sah.
- b. *Program aplikasi yang diuji oleh data uji auditor harus sama dengan data yang digunakan oleh klien di sepanjang tahun.*salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan menjalangkan pengujian data secara mendadak,dalam memungkan dalam waktu acak disepanjang tahun.Meskipun melakukan hal tersebut memakan biaya yang cukup mahal dan menghasilkan cukup banyak waktu. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan mengandalkan pengendalian umum klien dalam fungsi kepastakaan dan pengembangan sistem untuk meyakinkan bahwa program yang di uji adalah program yang digunakan oleh klien dalam pemrosesan transaksi sehari-hari.
- c. *Data yang diuji harus dihapuskan dari catatan klien.* Jika auditor memproses data yang diuji ketika klien memproses trabsaksinya sendiri, auditor harus menghapus data yang diuji dalam arsip utama klien setelah pengujian selesai dilakukan auditor dapat melakukan hal itu dengan

mengembangkan dan memproses data yang memiliki dampak yang berkebalikan dengan data yang uji.

Karena kompleksitas diberbagai program aplikasi klien, auditor yang menggunakan pendekatan pengujian data sering kali mendapatkan bantuan dari ahli audit komputer. Banyak KAP besar yang memiliki staf khusus yang membantu dalam menguji pengendalian aplikasi klien.

2) Simulasi paralel

Auditor sering kali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melakukan operasi yang sama dengan yang digunakan oleh perangkat lunak milik klien, dengan menggunakan arsip data yang sama. Tujuan adalah untuk menentukan efektivitas pengendalian otomatis dan untuk mendapatkan bukti mengenai saldo akun secara elektronik.

Perangkat lunak umum diberikan tiga keuntungan, yaitu (1) relatif mudah untuk melatih para staf audit untuk menggunakannya, bahkan meski mereka sebelumnya hanya mendapatkan sedikit pelatihan audit terkait Teknologi Informasi, (2) perangkat lunak tersebut dapat diterapkan pada beragam klien dengan sedikit penyusunan, dan (3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian audit cepat dan lebih terperinci di bandingkan dengan menggunakan prosedur manual tradisional. Dua tujuan yang akan dibahas secara terperinci antara lain sebagai berikut :

- a. *Perangkat lunak audit umum digunakan untuk menguji pengendalian otomatis.* Seorang auditor

mendapatkan salinan arsip utama batas kredit pelanggan dan arsip pemesanan pelanggan milik klien, kemudian menginstruksikan komputer auditor untuk mendaftarkan transaksi-transaksi yang melebihi batas kredit pelanggan yang diotorisasi. Auditor kemudian membandingkan output audit dengan daftar pesanan pelanggan milik klien yang ditolak karena melebihi batas kredit diotorisasi.

- b. *Perangkat lunak audit umum digunakan untuk memverifikasi saldo-saldo akun klien.* Seorang auditor dapat menggunakan perangkat untuk menjumlahkan arsip utama piutang pelanggan klien untuk menentukan apakah jumlah totalnya sama saldo dibuku besar.

3) Pendekatan Modul Audit Melekat

Ketika menggunakan pendekatan modul audit melekat auditor memasukkan sebuah modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi khusus. Sebagai contoh, auditor mungkin menginginkan untuk menggunakan modul melekat untuk mengidentifikasi semua pembelian yang melebihi Rp.25.0000.000 ditindak lanjuti dengan pengujian yang lebih terperinci untuk tujuan audit kejadian dan akurasi terkait transaksi.

Pendekatan modul audit melekat memungkinkan auditor untuk dapat terus menerus mengaudit transaksi-transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang yang di proses oleh klien dibandingkan dengan data yang di uji dan pendekatan simulasi paralel, yang hanya bisa dilakukan dengan pengujian berselang.

Meskipun para auditor dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa pendekatan pengujian biasanya mereka menggunakan cara-cara berikut.

- a. Menguji data untuk mengujian pengendalian dan pengujian substansif transaksi.
- b. Simulasi, paralel untuk pengujian substansif, seperti perhitungan ulang jumlah transaksi dan penjumlahan kebawah catatan tambahan di arsip utama piutang dagang.
- c. Melekatkan modul audit untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang tidak biasa untuk pengujian substansif.

7. Berkurangnya Jejak Audit

Salah satu mungkin tidak dapat dideteksi dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi karena hilangnya jejak audit yang nyata. Dan juga berkurangnya keterlibatan manusia. Selain itu, komputer menggantikan beberapa jenis otorisasi tradisional dalam banyak sistem teknologi informasi.

- a. *Kejelasan jejak audit.* Karena banyak informasi yang dimasukkan secara langsung ke dalam komputer, penggunaan teknologi informasi sering kali mengurangi atau bahkan menghilangkan dokumen-dokumen sumber dan catatan-catatan yang memungkinkan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi tersebut. Dokumen dan catatan akuntansi dinamakan jejak audit.
- b. *Berkurangnya keterlibatan manusia.* Dalam banyak sistem teknologi informasi, para pegawai yang menangani pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya. Sehingga mereka kurang mampu untuk mengidentifikasi salah satu dalam pemrosesan. Bahkan jika mereka dapat melihat hasil

akhirnya sekali pun, sering kali sulit untuk mengambil adanya salah saji karena hasilnya sering kali sudah diikhtisarkan dengan sangat ringkas.

- c. *Kurangnya Otorisasi Tradisional.* Sistem teknologi informasi yang maju seringkali dapat mengerjakan beberapa jenis transaksi secara otomatis seperti menghitung bunga untuk rekening tabungan dan pemesanan persediaan ketika tingkat pemesanan kembali yang telah ditetapkan telah tercapai. Sehingga, otorisasi yang tepat bergantung pada perangkat lunak dan arsip utama yang akurat yang digunakan untuk membuat keputusan otorisasi tersebut.

12.6 Masalah dalam Lingkungan Teknologi Informasi dalam Proses Audit

Sejauh ini, kita membahas pengaruh Teknologi Informasi terhadap proses audit untuk organisasi-organisasi yang memusatkan fungsi Teknologi Informasi nya. Meskipun semua organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik tanpa melihat struktur fungsi Teknologi Informasi mereka, namun beberapa masalah pengendalian umum dapat berbeda tergantung pada lingkungan Teknologi Informasi nya. Berikut, kita akan mempelajari masalah-masalah Teknologi Informasi bagi klien yang menggunakan jaringan, sistem manajemen basis data, sistem e-commerce, dan subkontrak pusat pelayanan komputer.

1. Masalah-Masalah Dalam Lingkungan Jaringan

Meningkatnya penggunaan jaringan menghubungkan peralatan seperti komputer mikro, komputer mini, mainframe, workstation, server dan mesin cetak telah mengubah TI untuk banyak aktivitas usaha. *local area network* (LAN) menghubungkan peralatan-peralatan dalam satu atau beberapa gedung yang lokasinya berdekatan dan

hanya di gunakan dalam sebuah perusahaan. LAN sering kali di unakan untuk mentransfer data dan program dari suatu komputer atau *workstation* dengan menggunakan sistem jaringan yang memungkinkan semua alat-alat beroperasi bersama. *Wide Area Network* (WAN) menghubungkan peralatan-peralatan dalam wilayah geografis yang lebih luas, termasuk operasi global.

Dalam jaringan, aplikasi perangkat lunak dan arsip data yang di gunakan untuk memproses transaksi di masukkan ke dalam beberapa komputer yang terhubung satu sama lainnya.akses terhadap aplikasi dari komputer mikro atau workstation diatur oleh perangkat lunak serve yang terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan, sementara perusahaan yang lebih besar dapat memiliki ratusan serve dalam lusinan lokasi jaringan yang terhubung satu sama lain.

Sebagian besar pengendalian umum yang di bahas pada bab ini diterapkan pada jaringan klien yang luas, karena dukungan Teknologi Informasi dan ketrlibatan pengguna tersentralisasi. Untuk perusahaan-perusahaan lainnya, jaringan menggambarkan masalah-masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam merencanakan audit. Sebagai contoh, auditor sering kali meningkatkan resiko pengendalian ketika perusahaan memiliki jaringan yang terdiri dari beberapa serve yang terletak di beberapa lokasi karena adanya operasi jaringan yang terdesentralisasi sering kali kekurangan dan pengawasan manajemen terhadap ragam serve yang terhubung keabsahannya, setiap tanda tangan secara digital di tandatangani oleh private key yang di jaga oleh otoritas yang memberi sertifikasi.

Auditor harus memahami sifat dari firewall dan pengendalian enkripsi untuk menyakinkan bahwa firewall dan pengendalian enkripsi telah di terapkan dan di pantau

dengan tepat. Sebuah sistem pengamanan firewall yang tidak memadai dapat meningkatkan kemungkinan perubahan yang tidak diotorisasi terhadap perangkat lunak dan data. Sehingga, auditor mungkin perlu untuk menguji pengendalian di seputar penggunaan firewall untuk menjamin bahwa pengendalian aplikasi otomatis digunakan untuk mendukung penilaian risiko pengendalian di bawah tingkat maksimum belum diubah tanpa sepengetahuan auditor. Demikian pula, auditor mungkin perlu memahami dan menguji pengendalian enkripsi untuk memenuhi tujuan saldo akun dan transaksi. Kegagalan untuk melakukan enkripsi transaksi atau data akun dengan tepat dapat berakibat pada perubahan dalam jumlah-jumlah yang mendukung transaksi atau saldo-saldo akun tersebut.

2. Masalah Masalah Ketika Klien Mensubkontrakkan Kebutuhan Teknologi Informasi

Banyak klien yang mensubkontrakkan beberapa atau semua kebutuhan Teknologi Informasinya kepada pusat layanan komputer independen, termasuk penyediaan layanan aplikasi (*application service provider*-ASP), dibandingkan dengan pusat Teknologi Informasi internal. Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil sering mensubkontrakkan fungsi penggajian relatif sama di satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, dan banyak penyedia jasa penggajian yang andal yang tersedia. Seperti halnya semua keputusan pesubkontrakkan, perusahaan memutuskan apakah akan mensubkontrakkan fungsi Teknologi Informasi dengan alasan efisiensi biaya.

Ketika perusahaan mensubkontrakkan Teknologi Informasi pada suatu pusat layanan komputer, klien memasukan data input, yang kemudian di proses oleh pusat layanan komputer dengan harga pembayaran tertentu, dan mengembalikan hasil output dan input

original yang di sepakati. Untuk penggajian, perusahaan memasukkan data waktu kerja pegawai, dan formulir pajak kepada pusat layanan.pusat layanan kemudian mengembalikan slip-slip gaji, jurnal dan data input setiap minggu serta formulir pajak di setiap akhir tahun. Pusat layanan komputer bertanggung jawab untuk merancang sistem komputer dan memberikan pengendalian yang memadai untuk menyaakinkan bahwa pemrosesan dapat di andalkan.

3. Memahami Pengendalian Internal

Auditor Menghadapi kesulitan ketika mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal klien dalam situasi tersebut karena banyak pengendalian yang terletak di pusat layanan, dan auditor tidak dapat menganggap pengendalian sudah di lakukan dengan tepat karena pusat layanan tersebut merupakan perusahaan independen. Standar audit mengharuskan auditor unyuk mempertimbangkan kebutuhan untuk mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian internal pusat layanan tersebut jika aplikasi pusat layanan tersebut melibatkan data finansial yang signifikan besarnya sebagai contoh, banyak pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi penggajian terletak pada program perangkat lunak yang di jaga dan di dukung oleh perusahaan penyedia jasa penggajian,dan bukan pada klien audit.

Ketika mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian pusat layanan, auditor harus menggunakan kriteria yang sama dengan yang di gunakan untuk pada kompleksitas sistem dan keleluasaan pengendalian yang di andalkan untuk mengurangi resiko.kedalaman pemahaman juga bergantung pada keleluasaan di mana pengendalian-pengendalian kunci terhadap tujuan audit terkait transaksi terletak pada pusat layanan jasa untuk audit pengendalian internal perusahaan publik.jika auditor menyimpulkan

bahwa keterlibatan aktif di pusat layanan merupakan satu-satunya cara untuk melakukan audit.maka penting untuk mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal di pusat layanan dan menguji pengendalian dengan menggunakan data yang di uji serta pengendalian atas pengendalian lainnya.

4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Auditor

Dalam beberapa Tahun terakhir merupakan hal yang wajar bagi pusat layanan untuk meleakukan kontrak dengan suatu KAP untuk mendapatkan pemahaman dan menguji pengendalian internal di pusat layanan serta menerbitkan laporan untuk di gunakan oleh semua pelanggan da para auditor independennya. Tujuan dari penilaian independen ini adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai pada seluruh pelanggan pusat layanan mengenai kecukupan pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pusat layanan serta untuk menghapus pengauditan yang berulang ulang yang di lakukan oleh para pelanggan pusat layanan tersebut.jika pusat layan tersebut memiliki banyak pelanggan dan masing-masing mengharuskan adanya pemahaman atas pengendalian internal pusat layanan oleh para auditor independennya,halangan dan biaya bagi pusat layanan dapat menjadi besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kator Akuntan Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)
- Agus Prasetyo Utomo. 2006. Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Proses Auditing dan Pengendalian Internal. Universitas Stikubank Semarang
- Agus Maulana. 2014. Kecurangan (Fraud) dalam Akuntansi dan Etika Profesi kuntansi. Bogor: Universitas Gunadarama.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. Jakarta.
- Arens, Alvin A, Randal K. Elder, Mark S. Beasley. 2014. Auditing and Assurance Services an Integrated Approach. Edisi kelimabelas. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mulyadi. 2004. Auditing 1: Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- Tatik Amani, Elok Dwi Vidiyastutik, Khusnik Hudzafidah. 2017. Dampak Teknologi Informasi terhadap Audit Internal. Jember: Universitas Panca Marga.

BAB 13

PROGRAM AUDIT

Oleh Tri Irawati

13.1 Pendahuluan

Pelaksanaan audit akan dilakukan oleh auditor dengan proses yang sistematis berdasarkan informasi yang disajikan dari laporan keuangan yang disusun sesuai dengan konsep dasar akuntansi (Mulyadi, 2002). Program audit dilaksanakan oleh perusahaan yang secara rutin ditetapkan dalam agenda rutin perusahaan. Dalam penugasan audit, auditor diawali dengan proses penyusunan perencanaan audit. Perencanaan audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan dari pelaksanaan dapat dicapai dengan standar yang memenuhi kualitas, ekonomis, efisien dan efektif. Auditor dalam melakukan perencanaan audit, akan menetapkan sasaran, metodologi dan ruang lingkup, serta pengokasian sumber daya. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan audit yang dibuat auditor sering disebut dengan nama program kerja audit (PKA).

Program Kerja Audit (PKA) dibuat oleh auditor berisikan rangkaian dari perancangan prosedur serta teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh auditor pada saat pelaksanaan audit dalam mencapai tujuan audit. PKA ini akan disusun oleh auditor setelah mengetahui tujuan audit yang akan dilaksanakan. Harapan dari penyusunan PKA akan dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan atau *guidance* auditor dalam menjalankan tugas auditnya. Dalam program kerja audit maka perlu memahami apa audit program.

Audit program berisi tentang rincian atau daftar prosedur dari proses pelaksanaan audit yang akan dilakukan untuk melakukan koordinasi dan integrasi pada bagian atau unit yang akan dilakukan pemeriksa. Pembuatan audit program ini diharapkan dapat memperoleh suatu gambaran menyeluruh atas satu audit proses yang dilakukan. Pembuktian yang harus cukup diperoleh melalui proses pengamatan, tanya jawab dan teknik lainnya sebagai suatu dasar yang layak untuk pemberian dari pendapat atas ikhtisar keuangan yang diperiksa.

Pemeriksaan merupakan aktivitas audit yang seharusnya direncanakan sebaik-baiknya dan jika dalam pelaksanaan maka diperlukan tim atau tenaga pembantu, mereka harus dipimpin dan diawasi dengan baik. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang telah mengikuti kegiatan latihan teknis yang cukup dan memiliki keahlian sebagai akuntan. Hal ini terkait dengan pelaksanaan penugasan, akuntan harus selalu senantiasa mempertahankan kebebasan tindak dan pendapatnya. Dalam melaksanakan kegiatan atas pemeriksaan dan menyusun laporan akuntan serta wajib menjalankan keahlian yang dimiliki oleh akuntan sesuai dengan jabatan dan kemahiran jabatannya.

Program audit merupakan prosedur yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan urutan pekerjaan yang ditetapkan. Pemeriksaan dalam penetapan program audit ini disusun menurut kaidah yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tergantung pada ruang lingkup auditnya yang harus diikuti oleh akuntan (auditor) dalam melakukan audit. Dalam melaksanakan program audit berdasarkan rangkaian kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam menentukan bagaimana pelaksanaan evaluasi bisnis atau proses audit akan dilakukan. Audit Program dilakukan dengan menetapkan petunjuk khusus yang terdiri dari rangkaian tentang apa yang akan dilakukan, bukti

audit yang harus dikumpulkan dan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mengumpulkan dan menganalisis data yang terkait dengan proses audit kapan harus dilakukan. Berdasarkan jenis audit program digunakan disesuaikan dengan jenis usaha atau bisnis yang dijalankan, hal ini perbedaan jenis akan berbeda juga dalam penyusunan program audit yang akan digunakan. Ketika audit program dilakukan maka rencana tindakan auditor akan merincikan pekerjaan apa yang harus diselesaikan, penetapan tes audit dan prosedur yang harus diikuti, selain itu juga menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan oleh tim tersebut. Pelaksanaan program audit juga mempertimbangkan periode waktu yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan.

Berdasarkan Pendapat Boyton dalam melakukan perencanaan audit atau audit *perencanaan* akan terdiri dari keterlibatan pengembangan dari suatu strategi secara menyeluruh. Auditor dalam melakukan perencanaan audit menentukan dengan sikap *skeptisme* dengan mempertimbangkan integritas manajemen, menghindari kekeliruan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perencanaan dan adanya ketidakberesan dalam menetapkan perencanaan, serta yang terkait dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan melawan hukum (Boyton, 2006).

13.2 Tujuan Program Audit

Berdasarkan pendapat dari Arens and Loebbecke, bahwa dalam pelaksanaan program audit maka ada tiga hal dilakukan dalam tahapan. Adapun tiga tahap tersebut antara lain terdiri dari pengujian atas transaksi yang telah dilakukan, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo buku besar yang disajikan (Arren, 1996). Sedangkan bagi auditor program audit dirancang akan menjadi dasar dan pedoman mengenai apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan

kegiatan dilakukan, pihak yang akan melakukan kegiatan dan berapa jangka waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan audit. Program audit menjadi sarana yang digunakan untuk menghubungkan survei pendahuluan atas pekerjaan yang akan dilakukan dengan pekerjaan lapangan yang dilaksanakan. Survei pendahuluan dilakukan oleh auditor untuk mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan tujuan operasi audit dilakuka, risiko atas pelaksanaan audit, hal lain terkait dengan kondisi-kondisi operasi dan kontrol yang akan diterapkan dalam pelaksanaan proses audit.

Adapun pelaksanaan program audit yang dilakukan oleh perusahaan sebaiknya memiliki beberapa tujuan:

1. Dasar acuan dalam pengumpulan data dan pelaksanaan proses evaluasi terhadap tugas audit
2. Dasar pedoman yang bersifat spesifik dan tahapan yang akan diikuti dalam proses pengumpulan bukti audit yang akan dilaksanakan
3. Sarana yang digunakan dalam membandingkan data dikumpulkan oleh perusahaan dari periode sebelumnya
4. Alat yang digunakan untuk melakukan pengawan dan kontrol atas pelaksanaan serta melakukan pencatatan atas pekerjaan audit.
5. Dasar bukti pelaksanaan audit yang digunakan untuk mendukung atas hasil pendapat yang akan disampaikan oleh auditor.

Program audit dilakukan untuk melakukan pengaturan yang dilakukan secara procedural dari suatu prosedur audit yang akan dilaksanakan selama proses kegiatan audit berlangsung. Pembuatan program audit diharapkan dapat mengungkapkan prosedur audit yang diyakini oleh auditor dalam penetpan tujuan audit akan dilakukan. Pembuatan program audit diharapkan dapat menyimpan data yang berisi rincian kegiatan yang terdiri dari strategi pelaksanaan audit

yang telah ditetapkan oleh auditor. Pelaksanaan program audit oleh auditor dengan melakukan prosedur yang melakukan kesiimbangan dengan konsep prosedur audit secara *top-down* artinya bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dari atas kebawah yang dimaksud adalah keputusan yang diberikan dari pimpinan ke level yang dibawahnya. Selain itu juga kebijakan dengan *bottom-up* artinya dari bawah ke atas yang dimaksud adalah pelaksanaan dari bawah yang dilaporkan pada pimpinan. Pengujian juga dilakukan dalam pelaksanaan program audit sesuai dengan jenis program audit yang terdiri dari :

1. Pengujian prosedur analitis adalah tahapan yang digunakan untuk dalam melihat dan meneliti data yang disajikan perusahaan. Dalam hal ini data yang disajikan dalam perusahaan terdiri dari data keuangan dan data non-keuangan yang saling terkait dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan auditor dalam mengembangkan pencarian atas saldo dari laporan keuangan yang disajikan.
2. Pengujian prosedur awal adalah tahapan yang digunakan oleh auditor dalam memahami bisnis yang dijalankan oleh auditee. Dalam pemahaman atas bisnis ini juga termasuk pemahaman mengenai faktor dan persaingan bisnis yang dijalankan, struktur organisasi dan tugas wewenang yang diberikan pada setiap jenjang organisasi yang telah ditetapkan, termasuk juga dalam hal ini sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan. Selain itu auditor juga melakukan pengamatan atas pelaksanaan transaksi dan sistem pencatatan atas transaksi kedalam jurnal dan perlibatan dalam penggunaan buku besar dan buku pembantu serta pengendalian atas pelaksanaan pembukuan tersebut.
3. Pengujian prosedur atas estimasi akuntansi. Pengujian atas estimasi akuntansi merupakan pengujian yang dilakukan atas saldo dari masing-masing rekening buku besar. Tahap

pengujian ini sering disebut juga dengan uji substantif atas saldo buku besar.

4. Prosedur pengujian prosedur atas pengendalian. Sistem pengendalian yang dilakukan oleh auditee merupakan awal dari pengendalian intern yang ditetapkan dalam strategi audit. Sistem pengendalian intern yang baik maka menandakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh auditee sudah terarah dan terencana, sehingga penanggung jawab atas segala pelaksana transaksi dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya. Maka pengendalian intern ini yang diamati auditor dalam penetapan strategi audit.
5. Prosedur pengujian atas transaksi. Yang dimaksud dengan pengujian ini adalah tahapan dari uji substantif melakukan penelusuran atau sering disebut dengan *tracing* / *vouching* berdasarkan bukti transaksi sebagai pendukung analisa dalam pendokumentasian transaksi yang dilaksanakan oleh auditee.
6. Prosedur pengujian atas Saldo. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah saldo dari masing-masing akun yang ada telah sesuai. Pengujian atas saldo mempertimbangkan item-item yang terkait dengan transaksi dan pencatatan yang dilakukan dalam mementu saldo dari akun yang bersangkutan. Konsistensi dalam pengakuan saldo ini sangat penting terkait dengan jumlah yang harus diakui pada masing-masing rekening.
7. Prosedur pengujian atas penyajian dan pengungkapan. Penyusunan laporan keuangan oleh auditee tidak terlepas dari peraturan yang mengikat pada pelaporan yang disusun. Standar yang digunakan tergantung pada tingkatan dan jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Standar di Indonesia yang berlaku saat ini ada standar ETAP, PSAK dan standar kebijakan lainnya sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Ketidak sesuaian dalam

penerapan standar berdampak pada pembuatan hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.

13.3 Manfaat Audit Program

Penyusunan program audit diharapkan dapat membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan program audit diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai dasar pedoman yang memberikan rencana yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahap pekerjaan audit yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Sebagai dasar bagi penugasan auditor dalam melaksanakan program audit yang telah disepakati antara auditor dengan auditee.
3. Sebagai dasar yang digunakan dalam melakukan evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dan juga sebagai sarana pengawasan atas kemajuan pekerjaan auditor yang telah ditetapkan.
4. Sebagai dasar pertimbangan bagian supervisor audit untuk dapat melakukan perbandingan pekerjaan yang telah direncanakan dengan realisasinya. Juga bagi manajer sebagai bagian dari penilaian kinerja yang telah dilaksanakan.
5. Sebagai dasar para auditor untuk melakukan pelaksanaan audit lanjutan yang telah ditetapkan. Selain itu juga akan mengenal jenis pekerjaan audit yang dilakukan sesuai dengan program yang disepakati serta dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.
6. Sebagai dasar bagi kinerja supervisor dalam melakukan prediksi waktu yang dibutuhkan dalam perencanaan audit yang telah ditetapkan.
7. Permulaan untuk nilai kinerja dari bagian audit internal dalam melakukan evaluasi untuk melakukan audit yang telah dilakukan

8. Menentukan jangka waktu yang digunakan dalam menyiapkan program Audit yang akan dilakukan dengan kesepakatan dengan auditee, sehingga dengan menentukan waktu tersebut akan memudahkan dalam melakukan proses audit.

Pelaksanaan dari audit program yang baik seharusnya mencamtumkan :

1. Menetapkan tujuan dilakukan proses pemeriksaan.
2. Melakukan prosedur atas audit yang akan dilakukan.
3. Membuat kesimpulan atas pemeriksaan yang dilakukan dalam proses audit.

Ketika akan menjalankan prosedur audit maka diperlukan maka adanya beberapa prosedur yang akan dilakukan yaitu:

1. Uji *Compliance* atau disebut *complaiance test*.
2. Uji *Substantive* atau disebut *substantive test*.
3. Audit program dari kedua uji audit diatas.

13.4 Program Kerja Audit

Kegiatan dari program kerja audit merupakan langkah kerja yang akan dilakukan auditor dalam melaksanakan program audit yang telah disepakati di auditee. Program audit disusun secara rinci yang disepakati oleh kedua pihak dalam penetapan program kerja yang disepakati. Dalam program audit makan akan menetapkan beberapa aktivitas audit yang akan dilaksanan. Harapan penetapan program kerja audit ini agar dapat melakukan dengan kinerja yang baik dengan tim yang ditetakan. Namun demikian program kerja audit ini bukanlah suatu program yang kaku dengan peraturan dan kesepakatan yang dilakukan. Tetapi program kerja bersifat

dinamis dapat berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan pada saat pelaksanaan audit

Program kerja audit dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Tahap kegiatan akan disusun secara sistematis dalam setiap tahapan yang ditetapkan dan dapat dikomunikasikan dengan tim audit yang telah ditunjuk.
2. Menjadi acuan untuk supervisor pada saat melakukan penilaian kinerja auditor dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.
3. Sebagai media yang digunakan dalam melakukan penilaian hasil audit yang dilakukan dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan auditor. Selain itu juga disesuaikan dengan persyaratan undang undang yang ada dalam penyusunan laporan kinerja yang ada atau persyaratan yang harus dipenuhi.
4. Sebagai media auditor dalam menetapkan program kerja audit berdasarkan ruang lingkup, tujuan serta langkah-langkah pelaksanaan kegiatan audit. Sehingga bagi auditor pemula sangat membantu dengan adanya penetapan program kerja audit ini.
5. Sebagai sarana yang digunakan auditor dalam melakukan perbandingan atas pekerjaan sekarang dengan pekerjaan sebelumnya. Sehingga tidak akan ada tumpeng tindih atas pekerjaan audit saat ini.
6. Sebagai saranan yang digunakan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kerja auditor yang dilakukan oleh supervisor yang ada.

Program kerja audit disusun tidak semuanya sama antara audit keuangan dengan audit manajemen. Audit keuangan penyusunanya akan lebih fleksibel dan mudah dibandingkan dengan audit manajemen yang penuh ketidak pastian dalam pengaturan kinerja auditee. Program audit

manajemen akan lebih sulit dan menantang karena akan melibatkan berbagai elemen dari sistem perencanaan dan pengendalian manajemen atas kegiatan operasional unit organisasi yang diperiksa.

Untuk membuat program kerja audit maka perlu melihat informasi yang harus ada yaitu informasi pendahuluan, pernyataan tujuan audit, instruksi-instruksi khusus dan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan. Program kerja audit manajemen disusun agar bisa dijadikan sarana pengendalian dalam pelaksanaan audit. Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun program kerja audit adalah :

1. Terdapatnya kejelasan dari tujuan audit harus dinyatakan secara jelas dan dapat dicapai oleh auditor berdasarkan pekerjaan yang direncanakan dalam program kerja audit.
2. Adanya kegiatan program kerja audit disusun sesuai penugasan yang telah ditetapkan oleh tim auditor yang telah ditunjuk.
3. Penetapan langkah kerja yang menjelaskan dan merinci pekerjaan yang akan dilakukan dan memberi dari alasan-dari setiap langkah yang ditetapkan.
4. Langkah kerja harus dibuat fleksibel sehingga setiap perubahan dalam pelaksanaan dapat mudah disesuaikan dan dengan persetujuan dari atasan auditor.
5. Program kerja yang dibuat oleh auditor berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat dalam pelaksanaan audit.
6. Menghindari penggunaan informasi dari file permanen karena akan mengganggu privasi dari auditee dan mengurangi kebebasan auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.
7. Dapat memberikan atau atau memprediksikan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan audit sehingga tidak

mengganggu pekerjaan auditee selama pelaksanaan auditor dilakukan.

8. Dalam pembuatan program kerja audit harus dilakukan persiapan dengan anggota tim yang terlibat. Dalam hal ini tim audit terdiri dari pengawas dan seluruh anggota auditor.

Pembuatan program kerja audit diperlukan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan agar audit manajemen dapat terarah sehingga lebih efektif dan efisien. Program kerja audit yang dilakukan penyusunan dengan baik dan diharapkan dapat digunakan serta dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh auditor. Apabila program kerja audit tidak disusun dengan baik maka akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan audit akan terkendala, oleh karena itu perlu penetapan sebelum pelaksanaan program kerja audit.

13.5 Implementasi Program Audit

Untuk mempermudah pemahaman tentang program audit. Maka disini disusun suatu kegiatan tahapan audit. Contoh implementasi dari tahap perencanaan audit atas kelompok rekening yang terdapat pada kelompok Aktiva, Utang dan Ekuitas. Dalam implementasi ini akan dijelaskan beberapa prosedur perencanaan audit pada kas, utang dan ekuitas yaitu (Novianty, 2020):

1. Melakukan penyusunan pengendalian internal pada rekening buku besar kas dan rekening buku besar bank beserta transaksi atas penerimaan dan pengeluaran kas dan bank, antara lain :
 - a. Menentukan pemisahan tugas dan tanggungjawab yang terlibat dalam pengelolaan kas dan bank yaitu bagian penerimaan kas, bagian mengeluarkan kas, pihak yang melakukan pencatatan dan pihak yang memberikan

- otorisasi atas pengeluaran dan atas penerimaan Kas dan bank.
- b. Menetapkan pegawai yang membuat atau melakukan rekonsiliasi bank yang mana harus berbeda dengan pegawai yang mengerjakan buku bank. Menetapkan pihak / pegawai yang akan melakukan rekonsiliasi bank pada setiap bulan dan hasil rekonsiliasi harus ditelaah dan dicermati oleh kepala bagian akuntansi.
 - c. Dilakukan penetapan penggunaan metode pengelolaan kas kecil misalnya dengan menggunakan metode *imprest fund system* atau *fluctuation fund*.
 - d. Penetapan pada bagian penerimaan kas, check atau giro tidak diperkenankan ada pengendapan dana di perusahaan dalam jangka waktu lama. Jangka waktu yang ditetapkan maksimal satu hari berikutnya dan kas yang disetor ke bank harus sejumlah penuh sesuai dengan bukti penerimaan yang ada.
2. Melakukan penyusunan penendalian internal yang terjadi pada rekening utang dan ekuitas yaitu dengan melakukan konfirmasi pada pihak bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya saldo yang cukup dalam melakukan pembayaran atas utang yang dimiliki dan diharapkan mempertahankan nilai likuiditas maupun solvabilitas yang tetap stabil. Hal ini juga pada posisi ekuitas perusahaan harus diperhatikan saldonya.
3. Melakukan perencanaan strategi atas audit yang dilaksanakan. Hal ini perlu mempertimbangkan kondisi yang terjadi atas hasil audit yang dilakukan dan resiko yang akan terjadi yang berpengaruh terhadap posisi aktiva, utang dan ekuitas.

Perencanaan audit atas saldo kas, utang dan ekuitas yang dilakukan perlu mempertimbangkan pula sistem pengendalian internal. Hal dilakukan dengan harapan bahwa pengendalian

interen atas saldo yang ada pada ketiga rekening terkendali dengan baik. Perpaduan yang tepat antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas serta control terhadap saldo bank yang juga akan memberikan pengaruh pada saldo utang dan ekuitas. Akuntan publik sebagai auditor meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam saldo kas dan bank telah berjalan secara efektif. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan berdampak pada tingkat uji substantif pemeriksaan lebih dapat dipersempit. Ciri pengendalian internal yang baik dari pengelolaan rekening kas dan bank atas transaksi penerimaan dan pengeluaran antara lain :

1. Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab yang berbeda pada bagian penerimaan kas, pengeluaran kas, pencatatan transaksi dan pihak yang memberikan otorisasi atas transaksi yang terjadi pada rekening kas dan bank. Adapun rinciannya berikut :
 - a. Petugas yang melakukan rekonsiliasi bank harus berbeda dengan petugas yang mengerjakan buku Bank. Rekonsiliasi bank dibuat setiap bulan dan harus ditelaah (*di-review*) oleh Kepala Bagian Akuntansi .
 - b. Penetapan penggunaan metode pengelolaan kas kecil yang digunakan dalam pengenalan dapat menentukan menentukan salah satu metode yaitu metode dana tetap(*imprest fund system*) maupun metode dana tidak tetap (*fluctuation fund system*).
 - c. Adanya bagian yang menerima kas, check atau giro bertanggungjawab atas saldo yang diterima dengan tidak melakukan penundaan penyetoran dana pada bank maksimal satu hari berikutnya, dan dilakukan penyetoran penuh sejumlah kas yang diterima.
 - d. Tersedianya sarana yang digunakan dalam penyimpanan kas yang ada dalam perusahaan. Selain itu terjamin keamanan dalam penyimpanan dengan pembatas jumlah

dana yang tersimpan secara tunai untuk menghindari adanya penyalahgunaan kas. Adapun sarana penyimpanan ini apat berupa *cash box* atau brankas.

- e. Pengelolaan uang kas dikelola dengan baik, artinya tidak membiarkan adanya dana menganggur dan atau terlalu banyak disimpan pada rekening giro. Adanya uang kas yang menganggur sebaiknya dilakukan pengeloaan dengan menginvestasikan ke hal lain seperti dipindahkan saldonya dalam dalam deposito berjangka atau dibeli surat berharga yang sewaktu-waktu bisa diuangkan, sehingga dapat menghasilkan bunga atau dividen atas investasi tersebut.
- f. Adanya sistem yang aman dalam penyimpanan blanko check dan giro agar tidak disalahgunakan, selain itu harus dihindari penandatanganan check dalam bentuk blanko. Ketika dilakukan penandatanganan atas check atau giro maka pemohon diharuskan melampirkan bukti-bukti pendukung yang lengkap.
- g. Penggunaan cek atau giro harus menuliskan atas nama dan check/giro yang ditandatangani oleh 2 orang. Penandatanganan ini dilakukan untuk menghindari adanya penyalahgunaan blanko tersebut.
- h. Pihak pemegang kas atau kasir bertanggungjawab penuh atas dana kas yang tersedia, hal ini diharapkan agar pemegang kas bertanggung jawab jika terjadi selisih maka harus menyesuaikan dengan laporan yang disusun, Hal ini diantisipasi dengan memberikan jaminan kepada kasir untu menyimpan uang jaminan atau mngasuransikan kerugian atas pertanggungjawaban yang dilakukan.
- i. Adanya kuitansi yang diterbitkan dengan nomor urut tercetak. Hal ini merupakan bentuk pengendalian intern dari transaksi agar tidak sembarangan membuat kuitansi untuk pengeluaran maupun penerimaan yang dilakukan.

- j. Adanya penggunaan bukti pendukung dari transaksi pengeluaran kas maka seharusnya diberikan stempel lunas. Hal ini dilakukan untuk kontrol bagian penerimaan dalam proses pembayaran yang dilakukan lebih dari satu kali.
2. Dilakukan pemeriksaan atas saldo rekening kas dan bank pada laporan posisi keuangan pada tanggal penyusunan laporan posisi keuangan dilakukan dan dimiliki perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar auditor yakin atas saldo kas dan bank baik yang ada di tangan / perusahaan maupun saldo kas dan bank. Jika ditemukan selisih saldo dengan laporan maka bagian akuntan diharapkan telah membuat laporan rekonsiliasi bank dengan dikonfirmasi dengan pihak perbankan.
3. Dilakukan pemeriksaan ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas maupun bank. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan antisipasi atas pembayaran utang yang telah atau akan jatuh tempo. Jika terdapat dana yang diinvestasikan pada perusahaan lain yang merupakan pembelian saham dan obligasi maka harus dilaporkan penadpatan atas investasi tersebut baik berupa deviden maupun bunga. Jika dana yang disisihkan untuk pembayaran utang yang akan jatuh tempo sebaiknya tidak dicatat dalam aktiva lancar. Selain itu jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lancar. Hal tersebut harus dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan yang disusun.
4. Jika pada melakukan pemeriksaan terdapat saldo kas dan bank dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI). Tingkat kurs yang digunakan ini diperhatikan sesuai dengan tanggal laporan posisi keuangan dilakukan. Dan jika ada selisih kurs yang terjadi sudah

dibebankan atau dikreditkan ke laporan Laba-Rugi pada tahun berjalan.

5. Melakukan pemeriksaan apakah penyajian saldo kas dan bank pada laporan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan (PSAK). Berdasarkan PSAK : bahwa Kas dan Bank disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aktiva lancar (*Current Assets*). Saldo kas dan bank yang penggunaannya dibatasi dimasukkan dalam aktiva lancar, apabila ada penyesihan atas dana kas maka tidak boleh lebih dari satu periode akuntansi. Jika terdapat saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok utang lancar atau utang jangka pendek.

Perumusan perencanaan audit merupakan tahap yang penting bagi auditor. Hal ini karena perencanaan audit merupakan konsep awal yang perlu mendapatkan perhatian auditor sebelum melakukan kegiatan audit dilaksanakan dalam menghasilkan atas laporan audit yang baik. Alasan dilakukan perencanaan audit ini terutama terkait dengan waktu dan dana kegiatan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu untuk menyipakan data yang ada dalam proses pemeriksaan oleh baguan yang ditunjuk sehingga dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dapat sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Selain itu juga untuk menghindari adanya salah sangka dari kedua pihak dalam proses pelaksanaan audit.

Pelaksanaan perencanaan audit maka hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor antara lain terkait dengan sifat, ruang lingkup, dan batasan waktu. Selain itu perencanaan audit harus dibuat secara tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perencanaan audit ini sebagai dasar dalam pelaksanaan audit yang tidak bersifat kaku. Tetapi perencanaan audit yang tertuang didalam program kerja audit harus bersifat dinamis dan fleksibel sehingga mudah menyesuaikan keadaan auditor maupun perusahaan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian atas suatu organisasi yang dirancang dalam mencegah dan mendeteksi terhadap kesalahan yang akan terjadi, selain itu untuk mengendalikan dan melindungi seluruh aktivitas organisasi dari penyimpangan lainnya yang merugikan perusahaan. Sistem pengendalian internal mempunyai empat tujuan utama, yaitu :

1. Mengamankan atas aktiva organisasi, memastikan akurasi dan menciptakan keandalan dari catatan atas informasi akuntansi.
2. Mempromosikan efisiensi atas operasi perusahaan
3. Melakukan pengukuran kesesuaian dengan Kebijakan yang telah ditetapkan
4. Menetapkan prosedur yang telah ditetapkan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arren, A. d. 1996. *Auditing : Pendekatan Terpadu* . Jakarta: Salemba Empat.
- Boyton, W. C. (2006). *Modern Auditing: Assurance Services and The Integrity of Financial Reporting, 8th ed.* United State of Amerika: John Wiley & Sons Inc.
- Mulyadi. 2002. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novianty. 2020. Audit Plan, Audit Program Dan Audit Prosedur Pada Harta, Utang Dan Modal. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi, Vol 7 No. 2,,* 173-189.

BAB 14

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Oleh Sri Suharti

14.1 Pendahuluan

Terdapat beberapa pengertian terkait kertas kerja pemeriksaan. Menurut SA Seksi 339 paragraf 03, kertas kerja pemeriksaan adalah *“catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya”*. Definisi lainnya adalah menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya yang berjudul Auditing (2012) , kertas kerja yaitu: *“semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, yang berasal dari: pihak klien, dan analisis yang dibuat oleh auditor dan dari pihak ketiga”*.(Sukrisno Agus, 2012). Kedua definisi tersebut menyatakan bahwa kertas kerja merupakan dokumen yang diperoleh auditor selama proses pemeriksaan sejak awal sampai berakhirnya penugasan, yang berasal dari berbagai sumber terkait.

Keberadaan kertas kerja sangat penting dalam suatu pemeriksaan, karena akan mempengaruhi kualitas laporan audit(Maisyarah Renny, 2019). Oleh karena itu auditor perlu memperhatikan penyusunan, pendokumentasian dan penyimpanannya serta menjaga kerahasiaan kertas kerja tersebut.

14.2 Fungsi Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja memiliki peranan penting dalam penyusunan laporan audit, oleh karena itu sudah seharusnya auditor dapat menjamin tersedianya kertas kerja yang baik dalam setiap penugasan. Kertas kerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut (Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer and James H. Scheiner, 2005):

1. Menyediakan bahan penyusunan laporan audit. Laporan audit termasuk opini yang akan diberikan, disusun berdasarkan bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Kertas kerja audit menyediakan bukti dan data serta informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan tersebut. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam kertas kerja, merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelayakan suatu temuan untuk dilaporkan atau tidak.
2. Sebagai alat untuk mendokumentasikan data dan informasi yang diperoleh auditor dalam pelaksanaan proses dan tahapan audit, yang berasal dari kuesioner, wawancara, observasi, inspeksi dan analisis serta kesimpulan.
3. Sebagai bukti hukum. Kertas kerja menjadi dokumen yang berisikan bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Kertas kerja merekam proses audit sehingga dapat merekam bahwa audit telah direncanakan dengan baik, bukti yang dikumpulkan cukup secara kuantitas dan kualitas serta relevan. Kertas kerja juga menunjukkan bahwa opini yang diberikan telah sesuai dengan bukti yang diperoleh. Oleh karena itu dalam hal terjadi proses hukum, kertas kerja dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk membebaskan auditor dari tindakan hukum. Sebagai contoh, kasus kesalahan dalam melakukan audit yang dialami oleh beberapa KAP pada perusahaan publik, diantaranya PT Garuda Indonesia Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk dan PT Hanson International Tbk di Indonesia, sebagaimana diberitakan oleh cnbcindonesia.com pada tanggal 9 Agustus 2019. Atas kesalahan tersebut, mereka dikenakan sanksi

administrasi dan ada diantaranya berupa pembekuan izin selama waktu tertentu.(Dwi Ayuningtyas, 2019)

4. Memudahkan dalam penyusunan *audit plan* untuk audit berikutnya. Kertas kerja pemeriksaan berisikan informasi terkait kecukupan *internal control*, permasalahan yang ada pada klien, program dan hasil audit serta berbagai *permanent file* lainnya. Dokumen tersebut merupakan dasar pertimbangan auditor dalam menetapkan keluasan skop pemeriksaan, sehingga dapat memprediksi lamanya waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut akan mempercepat penyusunan audit plan berikutnya.
5. Dasar untuk menilai kecukupan dan kompetensi bukti audit. *Supervisor* memiliki kewajiban untuk mensupervisi dan memeriksa hasil kerja asistennya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa bukti audit yang diperoleh telah mencukupi dan kompeten.
6. Mengkoordinasikan dan mengorganisir tahapan audit. Kertas kerja sebagai bahan evaluasi untuk menilai apakah audit telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan metode audit yang tepat.
7. Menjadi referensi dalam hal ada pertanyaan dari pihak pajak, bank maupun klien. Kertas kerja yang lengkap dan tersusun rapi serta sistematis akan memudahkan auditor untuk menjawab pertanyaan apapun terkait pemeriksaan.

14.3 Jenis Dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan sumbernya, kertas kerja pemeriksaan dibagi dalam 3(tiga) kelompok yaitu:

1. Dokumen atau berkas berasal dari klien:
 - Neraca saldo (*trial balance*).
 - Rincian kas dan setara kas.
 - Rekonsiliasi bank
 - Rincian persediaan per-akhir periode.
 - Rincian umur piutang dan analisisnya.
 - Rincian *asset* termasuk didalamnya: *asset* tetap, peralatan dan *asset* tidak berwujud.

- Rincian utang, termasuk didalamnya utang dagang, utang beban, utang bank, dan utang lainnya.
- Daftar rincian beban-beban, termasuk didalamnya: beban administrasi, beban operasional, beban penjualan, beban penyusutan dan beban-beban lainnya.
- Akta pendirian.
- Notulen rapat.
- Sistem dan prosedur termasuk sistem pengendalian internal.
- Manual akuntansi.
- Surat pernyataan pelanggan.
- Tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh *auditee*.
- Kontrak-kontrak.

2. Dibuat oleh auditor:

- Rencana audit (*audit plan*).
- Program audit (*audit program*) termasuk didalamnya prosedur dan tujuan pemeriksaan.
- Penelaahan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang dilaksanakan oleh *Auditee*.
- Korespondensi dengan pihak ketiga.
- Uji analisis transaksi.
- Penelaahan analitis.
- Catatan atas wawancara dan observasi.
- Kesimpulan yang dibuat oleh Auditor.
- Berita acara pemeriksaan fisik kas.
- Berita acara pemeriksaan fisik persediaan.
- Berita acara pemeriksaan fisik *asset* tetap berwujud.
- Analisis kecukupan penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance for bad debts*)
- *Supporting schedule* dan *top schedule*.
- *Working balance sheet* (WBS) dan *working profit and loss* (WPL).
- *Management letter*.

- Konsep laporan audit.
 - Laporan audit.
3. Dokumen atau berkas yang diperoleh dari pihak ketiga:
- Rekening koran bank
 - Pernyataan bank terkait saldo kas milik perusahaan.
 - Surat konfirmasi piutang.
 - Surat konfirmasi utang.

Berdasarkan lamanya waktu penggunaan dokumen/berkas, kertas kerja pemeriksaan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Dokumen atau berkas permanen (*permanent file*). Berkas permanen merupakan dokumen yang *relative* tidak cepat berubah, sehingga dapat digunakan oleh auditor dalam beberapa periode pemeriksaan, misalnya:
 - Akta pendirian.
 - Struktur organisasi.
 - Standar operasional prosedur (SOP).
 - Kebijakan akuntansi.
 - Manual akuntansi.
 - Kontrak-kontrak jangka panjang.
 - Anggaran dasar dan rumah tangga pendirian perusahaan klien.
 - Keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS).
2. Dokumen atau berkas tahun berjalan (*current file*). Berkas tahun berjalan merupakan dokumen yang dapat digunakan auditor hanya untuk satu periode pemeriksaan, karena data dan informasi yang ada didalamnya hanya relevan untuk tahun berjalan, misalnya:
 - Neraca saldo.
 - Rincian kas, utang, piutang dan *asset*.
 - Rincian pendapatan dan beban.
 - *Audit program*

- Kontrak jangka pendek.
- Neraca saldo.
- Ringkasan jurnal koreksi dan reklasifikasi.
- Rincian akun neraca dan laba-rugi.
- Jawaban konfirmasi piutang dan utang.
- Rekening koran bank.
- Rekonsiliasi bank.

14.4 Isi Kertas Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan SA seksi 399 paragraf 05 Isi kertas kerja pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kecocokan catatan akuntansi dengan laporan keuangannya atau informasi lain yang dilaporkan dan penerapan standar pekerjaan lapangan. Kertas kerja pemeriksaan memuat hal-hal sebagai berikut (Siti Kurnia Rahayu and Ely Suhayati, 2013) :

1. Bukti pelaksanaan pekerjaan lapangan, yang menunjukkan bahwa:
 - Telah dipenuhinya standar pekerjaan lapangan yang pertama, yaitu: perencanaan dan supervisi terhadap pekerjaan lapangan telah dilakukan dengan baik. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh *audit program* dan *review sheet*.
 - Telah dipenuhinya standar pekerjaan lapangan yang kedua, yaitu: diperoleh pemahaman yang memadai terkait dengan penerapan pengendalian internal, yang digunakan untuk penyusunan rencana audit, menentukan sifat dan keluasan lingkup pengujian. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: *internal control questioner*, *flowchart internal control*, dan analisa kecukupan penerapan *internal control*.
 - Telah dipenuhinya standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yaitu: telah diperolehnya bukti audit yang kompeten dan memadai untuk penyusunan laporan dan pernyataan pendapat. Prosedur audit yang telah diterapkan serta pengujian yang telah dilakukan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh berita acara pemeriksaan fisik persediaan, konfirmasi, lembaran analisis, *supporting schedule* dan *top schedule*.

2. Bukti yang menunjukkan terdapat kecocokan antara catatan akuntansi dan informasi lainnya dengan laporan keuangan.
3. Penjelasan dan pengecualian serta kesimpulan yang dibuat oleh auditor terhadap aspek tertentu yang penting didalam perusahaan klien.

14.5 Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi Kertas Kerja Pemeriksaan

14.5.1 Kepemilikan

Berdasarkan SA seksi 399 paragraf 06, Kertas kerja tidak dimiliki oleh auditor secara pribadi namun dimiliki oleh kantor akuntan publik (KAP), meskipun kertas kerja pemeriksaan disusun oleh auditor. Auditor pada saat melakukan pemeriksaan, bekerja atas nama KAP dan menerima pembayaran atas penugasan yang diberikan oleh KAP pula, oleh karena itu maka auditor memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga kerahasiaan kertas kerja. Kertas kerja juga bukan milik klien, meskipun objek pemeriksaan merupakan milik klien, ditempat klien, dibayar klien dan penugasan diberikan oleh klien. Hal tersebut disebabkan, didalam kertas kerja tidak hanya berisi dokumen dan informasi yang berasal dari klien, tetapi juga termasuk dokumen dan informasi yang dibuat oleh auditor. Dengan alasan-alasan tersebut, maka sudah sewajarnya kertas kerja dimiliki oleh KAP.

14.5.2 Kerahasiaan Informasi Kertas Kerja Pemeriksaan

Aturan Etika nomor 309 terkait dengan kerahasiaan kertas kerja, berbunyi "*Anggota Kompartemen Akuntan Publik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan klien*". Pembatasan tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, yang dapat melanggar ketentuan terkait kerahasiaan.

Terkait kerahasiaan kertas kerja, paragraf nomor 08, menetapkan keharusan auditor untuk menerapkan prosedur memadai, yang dapat menjamin keamanan kertas kerja. Auditor harus dapat menjaga kerahasiaan semua berkas/dokumen, data dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan. Kertas kerja bersifat rahasia, oleh karena itu auditor dilarang untuk menyebarkan informasi apapun terkait perusahaan klien. Pengecualian hanya dapat dilakukan dalam proses hukum dan pada saat *peer review*. Auditor sebagai bagian dari warganegara memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang diketahuinya, termasuk informasi yang terdapat didalam kertas kerja pemeriksaan, kepada kejaksaan atau hakim di pengadilan. Hal ini dapat dilakukan tanpa izin klien. Pengecualian lainnya adalah pada saat dilakukan *peer review* oleh kantor akuntan publik lainnya. Salah satu objek untuk menilai kepatuhan auditor terhadap standar pemeriksaan adalah melalui pemeriksaan kertas kerja. Pemberian informasi pada kondisi demikian juga tidak perlu meminta izin dari klien. Larangan memberikan informasi terkait kertas kerja pemeriksaan tidak hanya ditujukan kepada pihak eksternal perusahaan klien, tetapi juga ditujukan kepada pihak internal eksternal, misalnya pemberian informasi kepada pihak internal yaitu serikat pekerja atau pegawai, terkait kebijakan pembagian bonus untuk Direktur dan Komisaris. Pemberian informasi kepada perusahaan eksternal, misalnya informasi terkait perhitungan harga pokok penjualan.

Pemberian informasi kepada pihak lain hanya dapat dilakukan, apabila ada persetujuan dari klien. Selain mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, KAP juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan kertas kerja dalam periode yang sesuai dengan kebutuhan praktik dan ketentuan hukum tentang penyimpan dokumen yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan lain terkait.

14.6 Dokumentasi Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan merupakan berkas penting, oleh karena itu perlu didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi kertas kerja yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menggunakan bentuk dan susunan yang konsisten. Pimpinan perlu membuat kebijakan untuk menstandarisasi bentuk, jenis dan susunan serta indeks kertas kerja, agar tercipta keseragaman. Hal ini akan memudahkan auditor dalam membuat dan mendokumentasikan kertas kerja.
2. Menjaga kerapian kertas kerja. Kertas kerja yang rapi akan memudahkan auditor untuk menggunakannya pada saat diperlukan, terutama pada saat dibutuhkan sebagai bukti hukum. Kertas kerja harus ditulis dengan rapi agar mudah dibaca dan dipahami.
3. Jelas dan dapat dipahami. Kertas kerja harus mudah dipahami oleh setiap auditor yang membacanya tanpa membutuhkan penjelasan tambahan. Kertas kerja harus dapat memberikan informasi terkait prosedur yang telah dilakukan, metode yang telah diterapkan, bukti yang ditemukan dan kesimpulan yang dibuat serta keputusan yang diambil. Oleh karena itu kertas kerja harus ringkas, sistematis dan lengkap.
4. Kertas kerja relevan. Kertas kerja hanya berisikan data dan informasi yang material dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Oleh karena itu tujuan audit harus jelas dan program audit harus dikoordinasikan dengan baik.
5. Keekonomisan kertas kerja. Auditor menggunakan sebanyak mungkin pengujian dalam satu lembar kertas kerja dan menghindari penulisan ulang data. Auditor juga dapat memaksimalkan penggunaan kertas kerja tahun sebelumnya, terutama dokumen yang bersifat permanen. Dokumen tersebut diperbaharui sesuai dengan kondisi tahun berjalan.
6. Kecukupan kertas kerja. Kertas kerja lengkap memuat seluruh informasi, catatan apa yang harus dilakukan dan catatan pengembangan pemeriksaan yang diperlukan. Kertas

kerja harus diberikan indeks dan mencantumkan *schedule* pemeriksaan. *Supervisor* mencatat hasil supervisinya dan mencantumkan tanggal serta menandatangani. Pertanyaan dari *supervisor* seluruhnya telah terjawab dan tidak ada lagi yang tertinggal.

7. Kertas kerja lengkap, memuat nama perusahaan, nama perkiraan, tahun buku pemeriksaan, tanggal pembuatan kertas kerja, paraf auditor, indeks dan kesimpulan serta komentar yang diperlukan.
8. Menjaga kesederhanaan kertas kerja. Kertas kerja menggunakan kode dan istilah untuk menjaga keekonomisannya. Dalam hal demikian auditor harus membuat penjelasan arti kode dan istilah tersebut dalam daftar istilah.
9. Paralel dengan program pemeriksaan. Kertas kerja harus disusun berdasarkan subjek pemeriksaan. Subjek berbeda menggunakan lembaran kerja yang berbeda, sehingga kertas kerja mudah dijadikan referensi baik pada saat audit maupun setelah audit.
10. Kertas kerja memuat sifat dan perkiraan yang diperiksa dan prosedur pemeriksaan. Auditor membuat kesimpulan di setiap kertas kerja. Kesimpulan dapat dijadikan auditor untuk mengevaluasi kecukupan kertas kerja.

Contoh:

Klien : PT ABC

Schedule : Uji transaksi penjualan dan piutang

Periode : 31/12/2021

Tabel 14.1 Kertas kerja *schedule* uji transaksi penjualan dan piutang

No	Surat Jalan		Faktur		Nama pelanggan	Besar Uang	A	B	C	Periksa Posting		
	No.	Tanggal	No.	Tanggal						L	R	P
1.	01	1/12	10	2/12	PD Umar	100.000	√	√	√	√	√	√
2.	02	1/12	11	2/12	PT Duma	500.000	√	√	√	√	√	√
3.	05	3/12	20	5/12	PT Intan	900.000	√	√	√	√	√	√
4.	10	6/12	30	8/12	CV Lina	600.000	√	√	√	√	√	√
Penjelasan Simbol:												
A. Kelengkapan dokumen												
B. Kebenaran perhitungan												
C. Otorisasi												
L. Buku besar												
R. Kartu piutang												
P. Buku Penjualan												
Dibuat Oleh:				Di review oleh:		Indeks: P5						
Tanggal/paraf				Tanggal/tanggal								

14.7 Indeks Kertas Kerja

Pemberian indeks pada kertas kerja memudahkan auditor untuk mendokumentasikan dan menemukannya pada saat dibutuhkan. Indeks, sub indeks dan *cross index* (indeks silang), dicantumkan pada kertas kerja disaat pemeriksaan telah selesai dilakukan. Pencantuman indeks yang umum dilakukan auditor adalah sebagai berikut (Sukrisno Agoes and Estranita Trisnawati, 2018):

1. Indeks dapat diletakan di sudut kanan bawah atau di kanan atas atau dibagian mana saja sesuai standar format yang ditetapkan masing-masing KAP.

2. Pemberian indeks silang pada kertas kerja, sebagai berikut:
 - a. Akun laba pada kertas kerja neraca (*working balance sheet*) menunjuk akun laba pada kertas kerja laba dan rugi (*working profit and loss*).
 - b. Rincian jumlah pada *schedule* pendukung dengan menunjuk jumlah pada *schedule* utama.
 - c. Ringkasan jurnal koreksi dan reklasifikasi menunjuk akun *schedule* pendukung.
 - d. Indeks pada *schedule* utama dicantumkan pada *working trial balance*.
 - e. Indeks pada kertas kerja pemeriksaan dicantumkan pada program audit, untuk menunjukkan bahwa program tersebut telah diselesaikan.
 - f. Jumlah pada akun *schedule* pendukung menunjuk jumlah pada akun *schedule* pendukung lainnya.

Indeks silang memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Memudahkan *supervisor* menelaah kertas kerja. Hubungan antar kertas kerja lebih mudah terbaca dengan diberikannya referensi indeks yang menunjukkan jumlah suatu akun berasal.
- Memudahkan auditor berikutnya menelaah kertas kerja, sehingga memudahkan pekerjaan audit periode yang akan datang.

Berikut adalah contoh indeks silang yang menunjukkan hubungan Akun laba ditahan pada *WBS* dengan akun laba ditahan akhir periode pada *WBL*, pada Tabel 14.2 dibawah ini:

Klien : PT ABC
Schedule : *Working balance sheet*
Periode : 31/12/2021

Uraian	Ref.KK	Saldo Per 31/12/2021	Penyesuaian		Saldo Audit Per 31/12/2021	Saldo Per 31/12/2020
			Dr	Cr		
Saldo laba awal tahun		100.000.000				100.000.000
Laba ditahan	WPL1	150.000.000	-	-	150.000.000	
Dibuat Oleh:		Di review oleh:			Indeks: WBS 1	
Tanggal/paraf		Tanggal/tanggal				

Klien : PT ABC
Schedule : *Working profit and loss*
Periode : 31/12/2021

Tabel 14.2 Hubungan kertas kerja *WBS* dan *WBL*

Uraian	Ref.KK	Saldo Per	Penyesuaian		Saldo Audit Per	Saldo Per
		31/12/2021	Dr	Cr	31/12/2021	31/12/2020
Laba bersih setelah pajak		50.000.000				
Saldo laba awal tahun		100.000.000	-	-	100.000.000	
Laba ditahan akhir tahun		150.000.000				
Dibuat Oleh:		Di review oleh:			Indeks: WPL1	
Tanggal/paraf		Tanggal/tanggal				

Berikut adalah contoh hubungan kertas kerja ringkasan jurnal koreksi dan reklasifikasi dengan *schedule* piutang, pada gambar 17.3 dibawah ini:

Klien : PT ABC

Schedule : Ringkasan Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi

Periode : 31/12/2021

No.	Uraian	Ref. KK	Debit	Kredit
1.	Piutang lain-lain	P3	10.000.000	
	Piutang usaha	P1		10.000.000
2.	Biaya usaha	E1	20.000.000	
	Biaya pegawai	E2		20.000.000
3.	Pendapatan	R2	1.000.000	
	Diskon penjualan	R3		1.000.000

Klien : PT ABC

Schedule : *Supporting schedule* piutang

Periode : 31/12/2021

Tabel 14.3 Hubungan *supporting schedule* dengan jurnal koreksi.

Nama Pelanggan	Ref	Saldo menurut Klien	Penyesuaian		Saldo Audit Per
			Dr	Cr	31/12/2021
PD Umar	PS 10	50.000.000		10.000.000	40.000.000
PT Duma	PS 11	20.000.000	-	-	20.000.000
PT Intan	PS 20	10.000.000	-	-	9.000.000
CV Lina	PS 30	5.000.000	-	-	4.000.000
Dibuat Oleh:		Di review oleh:			Indeks: P1
Tanggal/paraf		Tanggal/tanggal			

Contoh pencantuman indeks pada kertas kerja, dapat dilihat pada Tabel 14.4 dibawah ini:

Tabel 14.4 Pencantuman Indeks pada Audit Program

No.	Prosedur audit	Dikerjakan Oleh	
		Indeks	Paraf
	Penjualan		
1.	Siapkan schedule utama penjualan.	P4	
2.	Minta buku penjualan dan cocokan dengan buku besar	P5	
3.	Periksa kelengkapan pencatatan penjualan. Periksa keakuratan pencatatan pada buku besar, kartu piutang dan buku penjualan. Periksa secara <i>sampling</i> kelengkapan dokumen pendukung, ketepatan matematis dan otorisasi.	P5	
Dibuat Oleh:		Di review oleh:	
Tanggal/paraf		Tanggal/tanggal	
		Indeks: -	

Setiap auditor/KAP mempunyai metode sendiri dalam memberikan indeks, yang berbeda dengan auditor/KAP lainnya. Metode pemberian indeks adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2011):

- Indeks angka, yaitu pada bagian kertas kerja diberikan indeks dengan menggunakan simbol angka, misalnya:

Schedule utama kas

: 1

Kas dan bank

: 1.1

Rekonsiliasi bank

: 1.2

Kas kecil

: 1.3

Kas kecil departemen SDM

: 1.3.1

Schedule utama piutang

: 2

- | | |
|-----------------------------|-------|
| <i>Supporting schedule</i> | : 2.1 |
| Rincian konfirmasi piutang | : 2.2 |
| <i>Schedule</i> utama biaya | : 5 |
2. Indeks huruf, yaitu pada bagian kertas kerja dicantumkan indeks dengan menggunakan simbol huruf. Misalnya:
- | | |
|------------------------------------|-------|
| <i>Schedule</i> utama kas | : K |
| Kas dan bank | : KB |
| Rekonsiliasi bank | : RK |
| Kas kecil | : KK |
| <i>Schedule</i> utama piutang | : P |
| <i>Supporting schedule</i> piutang | : PP |
| <i>Schedule</i> utama pendapatan | : R |
| <i>Working balance sheet</i> | : WBS |
3. Indeks gabungan angka dan huruf, yaitu kertas kerja dicantumkan indeks menggunakan simbol dalam bentuk huruf dan angka. Misal:
- simbol huruf dan angka:
- | | |
|---|---------|
| <i>Schedule</i> utama kas | : K |
| Kas dan bank | : K.1 |
| Rekonsiliasi bank | : K.1.1 |
| Kas kecil | : K.1.2 |
| <i>Schedule</i> utama piutang | : P |
| <i>Supporting schedule</i> piutang | : P.1 |
| Uji transaksi penjualan | : PO.2 |
| Rincian konfirmasi piutang | : PO.3 |
| <i>Schedule</i> utama pembelian dan utang | : U |
| <i>Supporting schedule</i> utang | : U.1 |

14.8 Kertas Kerja Elektronik

Perkembangan teknologi telah mendorong KAP menggunakan aplikasi berbasis komputer dalam membuat kertas kerja pemeriksaan. Penyusunan kertas kerja secara *manual* dengan menggunakan *paper* sudah mulai ditinggalkan. Kertas kerja elektronik meningkatkan fleksibilitas pembuatan dan dokumentasi kertas kerja. Penggunaan perangkat teknik

audit berbantuan *computer* (*computer assisted audit techniques-CAAT*), telah mengakibatkan proses analisis, pengembangan pemeriksaan lebih mudah dan lebih cepat, sehingga mampu mempercepat penyelesaian proses pemeriksaan. Komputerisasi juga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendokumentasian kertas kerja. Kertas kerja disimpan dalam bentuk *file*, memudahkan proses penyimpanan dengan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, dan mempercepat proses pemanggilan pada saat dibutuhkan.

Melalui perangkat tersebut kertas kerja sudah dapat diakses secara *online*, sehingga auditor dapat berkerja dimana saja dan kapan saja. *File* kertas kerja dapat digunakan secara bersamaan dalam waktu yang sama, hal ini sangat membantu auditor dalam melakukan pengujian silang antar dokumen yang berbeda. Pemberian indeks dan halaman kertas kerja dapat diotomasi, sehingga menutup kemungkinan terjadinya kesalahan pencantuman data.

Kertas kerja elektronik memiliki banyak manfaat, namun terdapat kelemahan juga, yaitu kemungkinan dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak memiliki otorisasi. Oleh karena itu perlu sekali adanya kebijakan pembatasan akses, melalui penggunaan *password* dan pemberian akses terbatas, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini penting untuk menghindari adanya penyusup yang dapat mengacaukan bukti audit. Perlindungan data dan informasi dari berbagai bentuk ancaman baik oleh yang berasal dari manusia maupun bencana alam, mutlak dilakukan dengan cara membuat *backup data* yang diletakkan ditempat berbeda.

Aplikasi perangkat audit berbantuan *computer* saat ini telah banyak dijual dipasaran, antara lain: *Database Management System (SQL, Oracle)*, *Generalized Audit Software (ACL, IDEA, Arbutus Analyzer)*, *Query and Reporting Application (MS.Query)*, *Spreadsheet Application (Quatro-Pro, Open Office)*.

14.9 Penelaahan Kertas Kerja

Berdasarkan standar lapangan pertama, bahwa *supervisor* harus melakukan supervisi yang cukup. Penelaahan diperlukan untuk menjamin kualitas audit sesuai standar pemeriksaan yang berlaku. Penelaahan dibuktikan oleh paraf/tandatangan, nama *supervisor* dan tanggal pada kertas kerja. Hal-hal yang harus menjadi perhatian *supervisor* dalam melaksanakan supervisi adalah:

1. Keyakinan bahwa auditor telah merealisasikan dan mengikuti seluruh program audit dan seluruh instruksi telah dipatuhi.
2. Kertas kerja telah mengandung bukti yang mendukung temuan-temuan audit. Bukti yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan.
3. Seluruh prosedur audit telah dilaksanakan dan diperoleh keyakinan bahwa tidak ada yang terlewat.
4. Kesimpulan yang dibuat relevan, wajar objektif dan valid serta logis.
5. Temuan-temuan telah dikomunikasikan dan disepakati dengan klien, serta hasil diskusi telah dicatat dengan baik.
6. Semua catatan dari *supervisor* telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Pertanyaan telah dijawab seluruhnya.
7. Kertas kerja telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang diterapkan di KAP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Ayuningtyas (2019) "Gara-gara Lapkeu, Deretan KAP Ini Malah Kena Sangsi OJK," *CNBC Indonesia*, 9 August.
- Lawrence B. Sawyer, Mortimer A. Dittenhofer and James H. Scheiner (2005) *Internal Auditing*. 5th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Maisyarah Renny (2019) "Pengaruh Penyusunan Kertas Kerja Audit Terhadap Kualitas," *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), pp. 85–97. Available at: elib.untag-banyuwangi.ac.id (Accessed: August 17, 2022).
- Mulyadi (2011) *Auditing*. 6th edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu and Ely Suhayati (2013) *AUDITING*. 1st edn. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukrisno Agoes and Estralita Trisnawati (2018) *Praktikum Audit Intruksi Umum, Berkas Permanen, Permasalahan, dan Kertas Kerja Pemeriksaan Tahun Lalu*. 3rd edn. Edited by Maryani. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agus (2012) *Auditing*. 4th edn. Edited by Novianty Aulia. Jakarta: Salemba Empat.

BIODATA PENULIS



Dini Haryati, S.E., M.Ak., CPMP., CSEM., CPHA., APHA
Dosen IAI Nusantara Batanghari

Penulis lahir di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 01 Januari 1992. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi (S.E) di prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi Magister Akuntansi (M.Ak) di prodi Akuntansi Universitas Jambi tahun 2017. Penulis memiliki gelar non akademik dengan aktif mengikuti training Performance Management Professional (CPMP), Strategic Entrepreneurial Mindset (CSEM), Professional Handwriting Analyst (CPHA), Advanced Professional Handwriting Analyst (APHA). Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi, pengauditan dan perbankan. Sebagai Dosen tetap di IAI Nusantara Batanghari dengan jabatan Asisten Ahli.

Dengan Pengalaman mengajar 3 (Tiga) tahun yang bersangkutan telah menghasilkan beberapa karya ilmiah baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi dan juga aktif dalam menulis beberapa buku dibidang akuntansi, statistik, transformasi digital, kepemimpinan, dan perilaku. Selain seorang Dosen, yang bersangkutan juga aktif di di bidang Keuangan dan Perbankan. Email Penulis: Diniharyati@iainbatanghari.ac.id, diniharyati14@gmail.com

*I don't want to miss out on the chance and keep
spirit having work for future*

BIODATA PENULIS



Sasmita Nabila Syahrir, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA.,ACPA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Penulis lahir di Kendari tanggal 2 Mei 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Halu Oleo Kendari dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Muslim Indonesia Makassar.

BIODATA PENULIS



Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A.

**Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

Penulis lahir di Gresik tanggal 30 Juli 1993. Penulis adalah dosen PNS pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga dan S2 pada Jurusan Magister Akuntansi Universitas Airlangga. Penulis menekuni bidang Akuntansi Keuangan, Audit dan Perpajakan. Dalam menekuni bidang Akuntansi dan Perpajakan, penulis telah menyelesaikan sertifikasi brevet Pajak A dan B. Penulis juga aktif menulis beberapa jurnal penelitian nasional terakreditasi dan jurnal internasional yang bertemakan Akuntansi dan Perpajakan.

BIODATA PENULIS



Fitria Ningrum Sayekti, SE., M.Acc

Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Nusantara (UNINUS)

Penulis lahir di Jayapura pada tanggal 16 Desember 1988. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nusantara (UNINUS). Menyelesaikan pendidikan D3 Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran (UNPAD) , dan S1 di Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan (UNPAS) dan melanjutkan Magister di Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada (UGM). Penulis menekuni bidang Akuntansi sesuai dengan latar belakang bidang pendidikannya.

Bekerja sebagai Dosen Tetap di Universitas Islam Nusantara sejak tahun 2017, mengajar Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya, Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntansi Sektor Publik. Ketertarikan pada audit telah menghasilkan beberapa penelitian di bidang audit di sektor swasta maupun di sektor publik.

BIODATA PENULIS



Dr. Dra. Nurchayati, SE, MSi, Ak
Staf Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penulis lahir di Semarang, penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pendidikan S1 Manajemen tahun 1987, S2 Akuntansi tahun 2002 dan Program Pendidikan Profesi Akuntan tahun 2013 pada Universitas Diponegoro Semarang, S1 Akuntansi tahun 2012 pada Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dan S3 Manajemen tahun 2021 pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

BIODATA PENULIS



Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si, Ak, BKP, CA

Dosen Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: nita.andriyani@umk.ac.id

BIODATA PENULIS

Dr. Rabiyyatul Jasiyah, S.E., M.Ak

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton

Penulis dilahirkan di Kota Surabaya. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Buton sejak tahun 2001. Menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur tahun 1998 dan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Airlanggatahun 2010 kemudian lulus program doktor Pasca sarjana (S3) Universitas Muslim Indonesia tahun 2018. Penulis menekuni bidang ilmu manajemen dan akuntansi manajemen. Penulis aktif sebagai peneliti dengan judul the impact of Islamic work ethics on organisational culture among Muslim staff (Q1), The consciousness of excellent quality service to improve effectiveness of TQM and kaizen-PDCA quality management dll. Juga aktif sebagai Penulis buku sesuai bidang kepakaran seperti Pengantar Manajemen, Metode Penelitian Ekonomi, Sistem informasi Sumber daya manusia, Buku Ajar MSDM, Perkembangan Perekonomian Indonesia saat Pandemi Covid 9, buku ajar pengantar manajemen, Teori Akuntansi manajemen. Penulis juga aktif dalam organisasi baik di kampus maupun diluar kampus.

Email Penulis: jasiyah_jesy@yahoo.com

BIODATA PENULIS



Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR., C.FR., C.Ftax.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh-Yusuf
(UNIS) Tangerang

Penulis adalah dosen yang telah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Ia adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S-2 Akuntansi di Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta pada tahun 2016. Pada 2 pendidikan tersebut memperoleh predikat *Cumlaude*. Pada 2021 telah menyelesaikan sertifikasi profesi peneliti. Penulis memiliki kepakaran di bidang Akuntansi, Pajak, Keuangan serta Audit dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya dan hasil penelitian telah didanai oleh internal perguruan tinggi serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada dewan redaksi di beberapa OJS. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan

ilmiah dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu. Di sisi lain, penulis juga aktif dalam menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang nantinya dapat menjadi ilmu jariyah dan ladang pahala demi mencerdaskan anak bangsa.

Email Penulis: rristiyana@unis.ac.id

BIODATA PENULIS



Arnadi Chairunnas, SE., M.Acc., Ak., CA.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Penulis lahir di Ujung Pandang, 11 Januari 1991. Penulis saat ini merupakan salah satu dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Penulis menempuh pendidikan S1 pada Prodi Akuntansi, Universitas Halu Oleo. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Profesi dan Magister di Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki pengalaman mengajar di berbagai kampus swasta di Sulawesi Tenggara dan juga memiliki pengalaman sebagai praktisi di bidang akuntansi.

BIODATA PENULIS



Tri Irawati, SE, M.Si.

Dosen Program Studi Sistem Informasi Akuntansi
STMIK Sinar Nusantara Surakarta

Penulis lahir di Gunungkidul tanggal 24 September 1974. Sebagai anak ketiga dari keluarga yang tinggal di desa bercita-cita menjadi Guru pada waktu itu. Dengan perjalanan waktu setelah selesai SD lanjut di SMP dan Tahun 1992 telah tamat di SMEA kalau sekarang SMK program studi Akuntansi. Karena ingin meneruskan cita-cita baru tahun 1994 melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Alhamdulillah pada bulan Februari 1999 dinyatakan lulus Statra 1 dengan gelah SE. Selama menjalani studi penulis aktif di kegiatan mahasiswa tingkat universitas di KOPMA. Aktif di kegiatan UKM juga tidak menyurutkan untuk tetap aktif di fakultas menjadi asisten dosen di laboratorium. Setelah lulus program sarjana penulis bekerja di CV Ramadhani penerbit dan percetakan sebagai staf accounting dan menjalani pekerjaan sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi. Sambil tetap menekuni pengajaran dibidang akuntansi dan komputer penulis mengajar juga di beberapa LPK di kota Solo. Dengan segala perjuangan

pada tahun 2000 penulis diterima menjadi Dosen tetap di STMIK Sinar Nusantara sampai sekarang. Beberbagi keterlibatan penulis dibidang Tri Dharma perguruan tinggi yang tidak hanya mengajar saja tetapi juga melaksanakan penelitian dan pengabdian Masyarakat. Beberapa kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan pendanaan dari DIKTI yang berupa hibah baik dosen pemula, kajian wanita maupun hibah bersaing. Sedangkan bidang pengabdian yang dilakukan merupakan keterlibatan dengan pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan kuliah kerja magang, kuliah kerja praktek maupun tugas akhir dan skripsi. Selain itu mengadakan pengabdian masyarakat secara mandiri maupun tim di UMKM maupun instansi swasta maupun pemerintah dibidang akuntansi maupun komputer. Penulis juga memiliki keahlian dibidang komputer dengan mengikuti ujian Office internasional dengan memiliki sertifikat MOS. Dalam meningkatkan kemampuan dan upgrade keilmuan yang dimiliki penulis juga mengikuti pelatihan Brevet AB di PPA UMS pada tahun 2022. Selain itu juga menulis beberapa buku modul kuliah baik teori maupun praktik dibidang akuntansi dan perpajakan.

BIODATA PENULIS



Parju

Staf Dosen Program Studi Akuntansi UNTAG Semarang

Penulis lahir di Sragen Tanggal 21 Oktober 1963. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNTAG Semarang. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di UNTAG Semarang tahun 1989, S1 Akuntansi di UNTAG Semarang tahun 2002 dan S2 Manajemen Keuangan Di Universitas Hasanudin Tahun 1998